



ANALISA GENDER KABUPATEN SIDOARJO 2019



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Kata Pengantar

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa memandang atribut gender. Dengan demikian, setiap individu berhak untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya dan berhak pula untuk memilih jalan hidupnya sendiri tanpa takut mengalami diskriminasi gender. Karena tujuan mulia tersebut, maka diperlukan suatu analisis untuk memastikan kalau pembangunan yang tengah dilaksanakan tidak menguntungkan gender tertentu.

Kehadiran publikasi “Analisa Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019” Ini berusaha untuk menjawab kebutuhan akan analisis dimaksud. Publikasi ini menggunakan framework (kerangka pikir) kesetaraan gender dari Bank Dunia tahun 2012 agar hasil analisis bisa lebih bermakna, dapat diterima secara teoretis, dan bisa digeneralisir. Menurut Bank Dunia, rumahtangga memegang peranan penting dalam pembangunan gender karena rumahtangga menyediakan pilihan-pilihan (*choices*), insentif (*incentives*), bahkan hambatan-hambatan (*constraints*) kepada individu. Harapannya, publikasi ini dapat menambah wawasan dan bahan diskusi mengenai pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk selama penulisan publikasi ini. Tidak ada karya yang sempurna dan luput dari kesalahan, oleh karena itu saran dan kritik membangun bagi perbaikan publikasi ini di masa depan akan diterima dengan senang hati.

Sidoarjo, April 2019

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Tabel | vi |
| Daftar Grafik | vii |
| Daftar Gambar | viii |
| Bab 1 Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tujuan | 2 |
| 1.3. Ruang Lingkup | 3 |
| 1.4. Sistematika Publikasi | 3 |
| Bab 2 Metodologi | 5 |
| 2.1. Konsep Definisi | 5 |
| 2.2. Asal Mula Ketimpangan Gender | 6 |
| 2.3. Framework Kesetaraan Gender dari Bank Dunia | 9 |
| Bab 3 Analisis Gender | 13 |
| 3.1. Karakteristik Demografi | 13 |
| 3.2. Faktor Endowment..... | 16 |
| 3.2.1. Pendidikan | 17 |
| 3.2.2. Kesehatan | 20 |
| 3.3. Faktor Kesempatan Ekonomi | 24 |
| 3.3.1. Indikator Ketenagakerjaan Ekstensif | 24 |
| 3.3.2. Indikator Ketenagakerjaan Margin Intensif | 31 |
| 3.3.3. Indikator Ketenagakerjaan tentang Produktifitas | 35 |
| 3.4. Faktor Agency | 36 |

| | |
|---|-----------|
| Bab 4 IPG dan IDG | 39 |
| 4.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 39 |
| 4.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 42 |
| Bab 5 Kesimpulan dan Saran | 44 |
| 5.1. Kesimpulan | 44 |
| 5.2. Saran | 45 |
| Daftar Pustaka..... | 46 |
| Lampiran | 48 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Rasio Ketergantungan menurut Kelompok Kesejahteraan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 15 |
| Tabel 3.2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin KRT dan Tingkat Kesejahteraan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (Persen) | 16 |
| Tabel 3.3. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 18 |
| Tabel 3.4. Rasio Laki-laki dan Perempuan menurut Rumpun Ilmu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 19 |
| Tabel 3.5. Indikator Ketenagakerjaan menurut Karakteristik Individu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 25 |
| Tabel 3.6. Kegiatan Seminggu Yang Lalu Istri, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 26 |
| Tabel 3.7. Karakteristik Pekerjaan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018..... | 32 |
| Tabel 3.8. Rata-rata Jam Kerja dari Seluruh Pekerjaan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 34 |
| Tabel 3.9. Rata-rata Upah Buruh per Bulan dari Pekerjaan Utama menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 35 |
| Tabel 3.10 Kepemilikan Tabungan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (Persen) | 37 |

Daftar Grafik

| | |
|--|----|
| Grafik 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 14 |
| Grafik 3.2. Angka Kesakitan (kiri) dan Angka Disabilitas (Kanan) <i>mean smoothed</i> menurut Kelompok Umur, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 22 |
| Grafik 3.3. Peluang Kematian menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 23 |
| Grafik 3.4. TPAK laki-laki menurut Tahun, Kabupaten Sidoarjo | 28 |
| Grafik 3.5. TPAK perempuan menurut Tahun, Kabupaten Sidoarjo | 28 |
| Grafik 3.6. Hubungan TPAK perempuan dan PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018..... | 30 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1. Framework Kesetaraan Gender dari Bank Dunia | 10 |
|---|----|

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan manusia sebagaimana termaktub dalam laporan pembangunan manusia (*Human Development Report*) tahun 1990 adalah memperbanyak pilihan-pilihan manusia sehingga setiap individu memiliki kebebasan untuk menjadi apa saja dan mencapai apa saja dalam hidup agar bermakna secara sosial. Kebebasan ini kemudian diterjemahkan dalam tiga dimensi pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM) yakni hidup lama dan sehat, berpengetahuan, dan standar hidup layak. Diyakini, kalau seseorang mempunyai tubuh yang sehat, berpendidikan tinggi, dan standar hidup layak, maka hal-hal tersebut selanjutnya akan menjadi kapasitas pribadinya untuk mencapai kebebasan.

Tentu saja manfaat pembangunan manusia tersebut harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh manusia tanpa memandang atribut, apakah ia laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, hidup di kota atau di desa; semua harus merasakan manfaat dari upaya pembangunan manusia yang sedang dilakukan. Meski demikian, banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa individu dengan atribut tertentu menikmati manfaat pembangunan lebih besar dibanding atribut yang lain, salah satunya ketimpangan menurut jenis kelamin (gender). Kenyataan bahwa gender tertentu tidak bisa mencapai potensi maksimalnya untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan tentu menimbulkan keprihatinan semua pihak.

Sebagai contoh, pada zaman dulu perempuan sering mendapatkan diskriminasi dalam memperoleh pendidikan sebagaimana dituangkan dengan jelas oleh Kartini dalam kumpulan surat-suratnya “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Namun sekarang partisipasi sekolah perempuan di berbagai belahan dunia terus meningkat, bahkan melebihi partisipasi laki-laki. Dengan menggunakan data hasil Sensus Penduduk, Adioetomo (2005) mengkonfirmasi hal ini dengan menunjukkan bahwa jurang (*gap*) capaian pendidikan menurut jenis kelamin memang semakin menyempit.

Dalam bidang kesehatan, angka harapan hidup perempuan saat ini lebih tinggi daripada laki-laki, padahal sejarah menunjukkan bahwa angka harapan hidup laki-laki pernah melampaui angka harapan hidup perempuan (Max Roser, 2019). *Our world in data* menunjukkan bahwa rendahnya angka harapan hidup perempuan zaman dulu disebabkan oleh banyaknya perempuan yang meninggal saat melahirkan atau mengandung. Seiring perkembangan teknologi dan industrialisasi, perempuan sekarang menjadi lebih sehat saat bersalin dan mengandung, sementara laki-laki mulai melakukan kebiasaan buruk seperti merokok dan minum-minuman keras yang justru merusak kesehatannya. Akibatnya, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada angka harapan hidup laki-laki.

Ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan tentu menimbulkan berbagai dampak tertentu di masyarakat. Sosiolog membuktikan bahwa ketimpangan gender akan menyebabkan perbedaan peluang dalam mendapatkan kekuatan, hak milik, dan kewibawaan (*power, property, and prestige*) (Risman, Froyum, dan Scarborough, 2018). Sementara itu, Bank Dunia meyakini bahwa ketimpangan gender akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (*World development Report* tahun 2012). Dengan kata lain, *if development is not engendered, it is endangered*; jika pembangunan mengabaikan aspek gender, maka aktifitas pembangunan sangat berbahaya karena pembangunan akan salah mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada segolongan orang saja.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah memberi gambaran mengenai kondisi pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo. Kondisi pembangunan gender perlu dipantau karena kesetaraan gender mempunyai dua nilai/manfaat, yakni intrinsik dan instrumental. Bernilai intrinsik karena hidup yang sesuai pilihan pribadi dan terhindar dari kekurangan kebutuhan dasar tanpa melihat gender adalah hak asasi setiap manusia; kedua bernilai instrumental, artinya kesetaraan gender berkontribusi terhadap efisiensi ekonomi dan pencapaian output pembangunan lainnya.

1.3. Ruang Lingkup

Analisis pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo dalam publikasi ini akan menerapkan kerangka pikir (*framework*) yang disusun oleh Bank Dunia *Household-Centered Framework to Gender Analysis* (2012). Kerangka pikir ini secara garis besar menyatakan bahwa kesetaraan gender akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomis suatu wilayah. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan kebijakan tertentu akan mendorong kesetaraan gender. Lebih lanjut, Bank Dunia menggambarkan bahwa kesetaraan gender bersumber dari interaksi di tingkat rumahtangga, institusi formal-informal yang ada, dan kondisi pasar (*market*). Publikasi ini hanya akan membahas disparitas gender pada tingkat rumahtangga saja, yang meliputi aspek *endowments* (modal manusia), kesempatan ekonomi, dan *agency*.

Sumber data yang akan digunakan dalam analisis bersumber dari survei sosial ekonomi nasional (susenas), survei angkatan kerja nasional (sakernas), dan data/publikasi sekunder lainnya. Sebagian analisis juga akan menggunakan software AdePT modul gender yang dibuat oleh Bank Dunia. Metode dekomposisi upah menurut gender diolah menggunakan software Stata SE13.

1.4. Sistematika Publikasi

Publikasi ini tentang analisis gender di Kabupaten Sidoarjo ini akan terbagi menjadi lima bab, yakni :

Bab I Latar belakang yang berisi tentang pendahuluan, tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup analisis, dan sistematika publikasi

Bab II Metodologi yang akan membahas tentang konsep dan definisi dari beberapa istilah yang dipakai dalam publikasi ini dan kerangka pikir (*framework*) yang digunakan untuk analisis

Bab III Analisis Pembangunan gender pada tingkat rumahtangga dengan menggunakan *framework* yang dibangun oleh Bank Dunia. Analisis akan membahas faktor *endowment* (pendidikan dan kesehatan), faktor kesempatan ekonomi (indikator ketenagakerjaan), dan faktor *agency*.

Bab IV Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sidoarjo yang akan membahas series kedua indeks tersebut dari tahun ke tahun

Bab V Kesimpulan dan Saran yang akan menggarisbawahi temuan dan posisi pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo

2.1. Konsep dan Definisi

Berikut ini adalah beberapa istilah yang sering digunakan dalam analisis gender sebagaimana dikutip dari laman internet Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia :

Sex adalah perbedaan-perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Contoh: perempuan dapat melahirkan, laki-laki memproduksi sperma.

Gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Peran gender bersifat dinamis dan berubah antar waktu.

Kesetaraan Gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat, dan akses terhadap pelayanan.

Analisa Gender adalah metodologi untuk pengumpulan dan pengolahan informasi tentang gender. Analisa gender membutuhkan data terpilih berdasarkan jenis kelamin dan suatu pengertian dari konstruksi sosial dari peran gender, bagaimana pembagian kerja, dan dinilai. Analisa gender adalah proses dari analisa informasi supaya menjamin manfaat dan sumberdaya pembangunan secara efektif dan adil ditujukan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Analisa Gender digunakan juga untuk mengantisipasi dan menolak akibat negatif dari pembangunan yang mungkin terjadi pada perempuan atau karena relasi gender. Analisa gender dilakukan menggunakan bermacam alat dan kerangka kerja.

Sementara itu, merangkum definisi gender yang digunakan oleh WHO dan UNDP, pengertian gender mengacu pada karakteristik yang dikonstruksikan secara sosial dan psikologis, didefinisikan, atau ditautkan terhadap perempuan dan laki-laki seperti norma-norma, peran, relasi, hak-hak, dan kewajiban, serta

identitas yang dapat berbeda dan berubah antar masyarakat, antar lokasi, dan antar waktu. (Handayani dan Pardede, 2017, p.341).

Oleh karena itu, Handayani dan Pardede (2017) mengingatkan bahwa menganalisis data menurut jenis kelamin tidak sama dengan ulasan mengenai disparitas gender, karena yang dimaksud dengan analisis gender adalah mengulas mengapa disparitas ini terjadi. Lebih lanjut, mereka mengingatkan bahwa istilah gender bukanlah mengacu atau menggantikan istilah perempuan, tapi menggambarkan laki-laki dan perempuan.

2.2. Asal Mula Ketimpangan Gender

Kata kesetaraan dalam gender sebenarnya berasal dari terjemahan dua kata yang berbeda, yakni *equality* dan *equity*. *Equality* terkait dengan pernyataan bahwa manusia itu diciptakan setara (*equal*) tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Dalam bahasa sederhana, ketika laki-laki mendapat satu bagian, maka perempuan juga mendapat satu bagian, atau tidak berbeda. Sementara itu, *equity* merujuk pada perlakuan yang adil dan setara berdasarkan kebutuhan. Sebagai contoh, angka kematian ibu yang sering dipakai sebagai indikator kesetaraan gender, memang tidak menggambarkan kondisi laki-laki namun merujuk pada perlakuan yang adil bagi perempuan sesuai kebutuhannya.

Secara umum penyebab disparitas gender dapat dikelompokkan dalam dua golongan besar, yakni penyebab alamiah (*nature*) dan penyebab yang dibentuk atau dikonstruksi (*nurture*). Bahasan mengenai penyebab disparitas gender ini juga dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu, yakni biologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya.

Dari sudut pandang biologi, laki-laki dan perempuan memang diciptakan berbeda karena secara kodrati laki-laki dan perempuan memiliki bentuk kelamin yang berbeda. Dalam perkembangan ilmu biologi, maskulinitas laki-laki dan feminitas perempuan ditentukan oleh kehadiran dua kromosom yang berbeda yakni kromosom XY untuk laki-laki dan XX untuk perempuan. Namun, penjelasan ini kemudian banyak diperdebatkan karena tiap individu sebenarnya memiliki dua kromosom ini dengan kadar yang berbeda. Dua kromosom ini terhubung dengan kerja otak yang akan menentukan bentuk tubuh dan tingkah laku

seseorang. Sayangnya, hingga saat ini para ahli biologi belum mengetahui secara pasti kadar kromosom ini dalam tubuh dan mekanisme hubungannya dengan otak sehingga seseorang bisa digolongkan maskulin atau feminin.

Psikolog membedakan gender dari sifat-sifat personalitas yang dimiliki oleh individu. Seseorang dikatakan maskulin kalau dalam dirinya terdapat sifat cerdas, berpikir strategis, dan logis. Kalau dalam diri seseorang melekat sifat penyayang, empati, dan hangat, maka ia akan dikatakan sebagai feminin. Dalam perkembangannya, disadari bahwa sifat personal bukanlah seperti dua kutub yang saling berjauhan yang dapat dibedakan secara pasti, namun sifat-sifat personal ini bisa terdapat dalam diri seseorang sekaligus dalam kadar yang berbeda (*co-vary*).

Sosiolog menyatakan bahwa gender dibentuk dari perbedaan simbol, tingkah laku, interaksi, konteks, dan pengalaman hidup sehari-hari. Interaksi memegang peranan penting dalam ilmu sosiologi karena dari interaksi akan terbentuk peran gender (*gender roles*) yang diharapkan oleh lingkungan. Konsep peran gender (*roles*), yang mengacu pada kesamaan tingkah laku individu yang diharapkan oleh masyarakat lintas tempat, waktu, atau grup, banyak dikritik karena peran gender mengabaikan unsur kekuatan (*power*) dan keunggulan (*privilege*). Perempuan memang diharapkan berperan sebagai ibu dalam rumah tangga, namun konsep peran gender tidak menaruh perhatian pada kuasa perempuan dalam rumah tangga dan kelebihan/keunggulan sebagai ibu.

Dalam karyanya yang terkenal, West dan Zimmerman (1987) kemudian memperkenalkan konsep *doing gender*. Menurut mereka, tingkat maskulinitas dan feminitas diukur dari apa yang individu lakukan. Laki-laki yang memasak dan membantu merawat buah hati bisa dikategorikan sebagai feminin, sebaliknya perempuan yang bekerja bisa digolongkan sebagai maskulin. Dalam bahasa populernya, *to claim a sex category, we do gender*. Para sosiolog mengakui bahwa bukan atribut gender saja yang menyebabkan disparitas kesempatan antar individu, namun atribut-atribut lain turut memperparahnya (*intersectional theory*), misalnya kemiskinan, minoritas, dan lainnya. Dalam perkembangannya, sosiolog menggolongkan kategori sex bukan hanya laki-laki

dan perempuan saja, namun juga seseorang dengan kondisi antara laki-laki dan perempuan dengan kehadiran *queer theory*.

Dalam ilmu ekonomi, disparitas gender antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan oleh model modal manusia dan model segmentasi pasar kerja. Fokus dari model modal manusia adalah isu ketenagakerjaan, dimana perbedaan penghasilan laki-laki dan perempuan disebabkan oleh kepemilikan modal manusia yang berbeda, misalnya pendidikan. Sementara itu menurut model segmentasi pasar kerja, pasar kerja laki-laki dan perempuan memang berbeda, dimana laki-laki cenderung bekerja di sektor utama (*primary*) dengan jabatan yang lebih tinggi, sementara perempuan bekerja di sektor kedua (*secondary*) dengan jabatan dan upah yang lebih rendah.

Sumber-sumber disparitas menurut ekonom juga dapat diterangkan oleh beberapa teori berikut : *taste discrimination theory* oleh Gary Backer (1957), *statistical differences in characteristics*, dan *overcrowding theory*. Menurut Backer, diskriminasi upah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan dapat dipahami dari asal diskriminasi : dari sisi pengusaha, dari sisi pekerja, dan dari sisi pembeli. Dari sisi pengusaha, diskriminasi terjadi jika pengusaha memiliki dugaan tentang kelebihan pekerja laki-laki dibanding perempuan sebelumnya. Dari sisi pekerja, laki-laki membutuhkan upah lebih tinggi jika harus bekerja dengan kolega perempuan. Dari sisi pembeli, jika pembeli lebih tertarik pada produk yang dijual oleh gender tertentu maka akan terjadi disparitas gender.

Statistical discrimination menyatakan bahwa ketika laki-laki atau perempuan yang memiliki kualitas yang sama dan menginginkan pekerjaan yang sama, meski pengusaha tidak memiliki dugaan terhadap jenis kelamin tertentu, tapi dia mengetahui bahwa perempuan cenderung memiliki waktu bekerja lebih sedikit karena tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga, maka perempuan akan cenderung dikeluarkan sebagai kandidat terbaik.

Menurut teori *overcrowding*, jika perempuan bekerja di tempat yang kelebihan penawaran atau kurang diminati, maka upah perempuan akan lebih rendah daripada laki-laki apapun lapangan pekerjaan atau tingkat produktifitasnya.

2.3. Framework Kesetaraan Gender dari Bank Dunia

Bank Dunia mengamati bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan memang terjadi di sebagian besar dunia dalam berbagai dimensi sosial dan ekonomi sepanjang siklus hidup. Kadang-kadang perbedaan ini berakibat buruk bagi laki-laki, namun sebagian besar membawa dampak kurang baik bagi perempuan. Disparitas antara laki-laki dan perempuan ini merupakan akibat dari interaksi yang kompleks pada tingkatan rumahtangga, pasar, dan institusi.

Salah satu cara untuk menggambarkan interaksi yang kompleks antara rumahtangga, pasar, dan institusi yang berakibat pada ketimpangan gender adalah dengan mengetahui bagaimana suatu rumahtangga berfungsi. Pada tingkat rumahtangga, kita akan mengetahui jenis kelamin apa yang menyerap pengeluaran paling besar khususnya untuk pendidikan dan kesehatan, apakah laki-laki atau perempuan yang menjalankan tugas dan kewajiban tertentu, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut selanjutnya akan mengakibatkan ketimpangan gender yang terjadi secara umum di masyarakat.

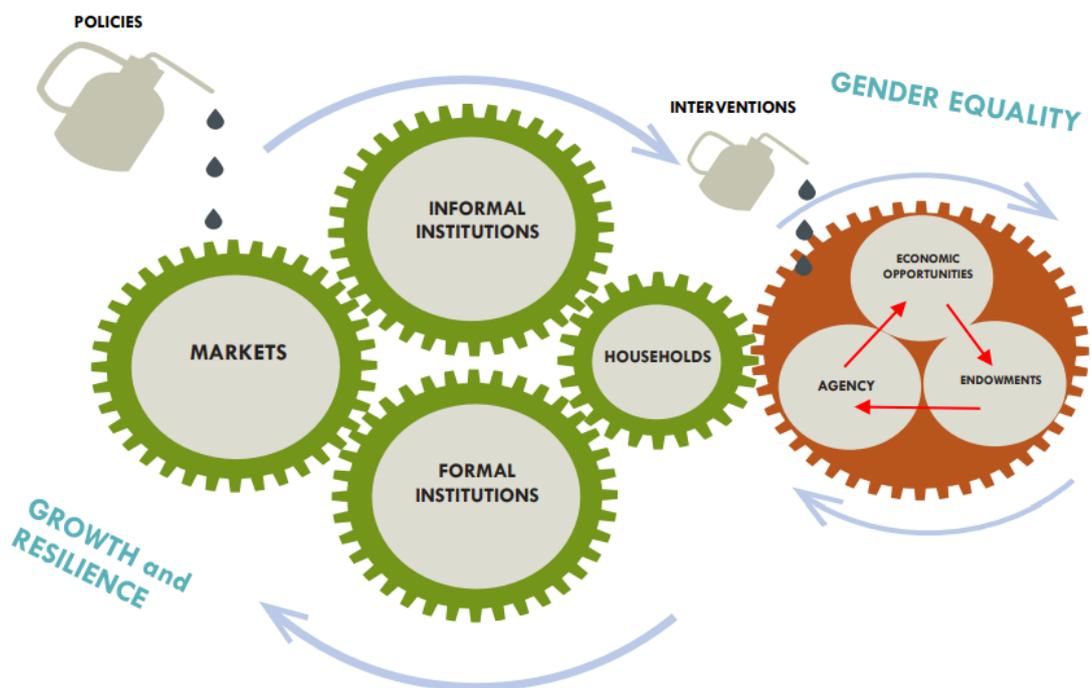
Tentu saja pilihan pembelanjaan dalam rumahtangga untuk gender tertentu dipengaruhi oleh norma-norma sosial, insentif pasar, dan institusi formal. Norma-norma sosial yang memberi perhatian lebih pada gender tertentu akan mempengaruhi alokasi belanja rumahtangga pada gender tersebut. Insentif pasar juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang gender, misal lapangan kerja tertentu membutuhkan lulusan pendidikan tertentu dan jenis kelamin tertentu, maka salah satu jenis kelamin akan menikmati keuntungan lebih tinggi. Selanjutnya, institusi formal yang biasanya melahirkan aturan-aturan berdasarkan ideologi dominan tentang gender di masyarakat secara pasti akan mempengaruhi keluaran pembangunan gender.

Bank Dunia menempatkan rumahtangga pada titik tengah perhatian, karena rumahtangga merupakan tempat membuat pilihan-pilihan (*choices*), menyediakan insentif (*incentives*), atau hambatan (*constraints*). Preferensi dibentuk oleh peran gender, norma-norma sosial, dan jejaring sosial (dalam *framework* diberi label *informal institutions*). Insentif sebagian besar dipengaruhi oleh pasar (meliputi pasar tenaga kerja, pasar barang, kredit, dan tanah) yang menentukan pengembalian atas keputusan dan investasi yang

dibuat oleh rumahtangga. Hambatan muncul sebagai akibat interplay dari *formal institutions* dan *informal institutions*.

Pada tingkat rumahtangga, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari tiga faktor yakni faktor endowment, faktor kesempatan ekonomi, dan faktor agency. *Agency* didefinisikan dengan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan merubahnya menjadi aksi/aktifitas dan output yang diinginkan.

Gambar 2.1. Framework Kesetaraan Gender dari Bank Dunia



Sumber : World Development Report Tahun 2012

Market atau pasar adalah tatanan yang memungkinkan penjual dan pembeli saling tukar barang atau jasa yang tunduk pada aturan tertentu. *Formal institutions* atau institusi formal adalah segala aspek yang memungkinkan berlangsungnya suatu negara, meliputi hukum, aturan, dan mekanisme yang mengatur penyediaan jasa bagi warga negara. *Informal social institutions* atau institusi sosial informal meliputi mekanisme, aturan, dan prosedur yang mengatur interaksi sosial namun tidak berkaitan dengan berfungsinya suatu negara.

Sebagaimana gambar di atas, kesetaraan gender yang besar akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditunjukkan oleh arah panah. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan meningkatkan kesetaraan gender jika disertai dengan kebijakan-kebijakan tertentu.

Framework Kesetaraan Gender Bank Dunia dibentuk berdasar pada teori ekonomi *household labor supply model* dan *the intrahousehold decision model (bargaining model)*. Kedua model ini lebih dekat dengan *taste model* yang ada dalam ilmu ekonomi dari Gary Becker (1957) yang telah diterangkan di atas.

Asumsi dari model *household labor supply* adalah pertama, rumahtangga melakukan produksi barang kebutuhan rumahtangga dari bahan baku yang dibeli di pasar namun tergantung dari waktu yang dimiliki. Oleh karena itu, penggunaan waktu terbagi untuk : a) bekerja di pasar kerja, b) produksi barang kebutuhan rumahtangga di rumah, c) bersantai. Asumsi kedua, sebagian besar rumahtangga memiliki lebih dari satu orang dewasa. Asumsi ketiga, ada dimensi waktu yang harus diperhatikan. Model ini dapat digunakan untuk menerangkan beberapa fenomena antara lain meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan, menurunnya tingkat kelahiran, dan meningkatnya investasi pendidikan anak perempuan.

Sebagai contoh adalah meningkatnya partisipasi kerja perempuan di pasar kerja. Dengan memperoleh upah, dia bisa mengalihdayakan (-*outsources*) tugas-tugas mengurus rumahtangga, atau membagi tugas rumahtangga dengan suami seiring meningkatnya posisi rebut tawarnya (*bargaining position*) dalam rumahtangga. Dengan demikian, perempuan masih bisa membagi waktunya dengan bekerja di pasar kerja, mengurus rumahtangga, dan menikmati waktu santainya. Kehadiran teknologi alat-alat rumahtangga juga akan menyediakan insentif lanjutan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah karena tugas-tugas rumahtangga cepat selesai.

Berbeda dengan model yang pertama, model *the intrahousehold decision* mengasumsikan bahwa keputusan dalam rumahtangga dibuat bersama oleh anggota rumahtangga. Dalam mengambil keputusan bersama, kekuatan budget dan harga relatif akan mempengaruhi “kekuatan” masing-masing anggota rumahtangga, dimana kedua hal tersebut dipengaruhi oleh faktor *endowment*

(modal manusia dan sumber produktif), norma sosial, dan aturan legal setempat. Oleh karena itu, model ini disebut juga *collective model*. Tentu saja, model ini berbeda dengan *unitary model solutions* dan *individual optimal choices*.

Menurut *unitary model solution*, dalam berbagai kesempatan percobaan, jika terjadi transfer masuk dalam rumahtangga dan penerimanya adalah perempuan, maka dia akan mengalokasikan transfer tersebut untuk kesehatan dan pendidikan, sementara jika penerimanya adalah laki-laki maka uang tersebut lebih cenderung dibelanjakan untuk kebutuhan laki-laki. Hipotesis ini kemudian banyak disanggah, yang kemudian disusul oleh *intrahousehold model* yang mengatakan bahwa bagaimana anggaran rumahtangga akan dibelanjakan tergantung dari kekuatan (*power*) dari perempuan dalam rumahtangga. Oleh karena itu, muncullah framework Bank Dunia Tahun 2012.

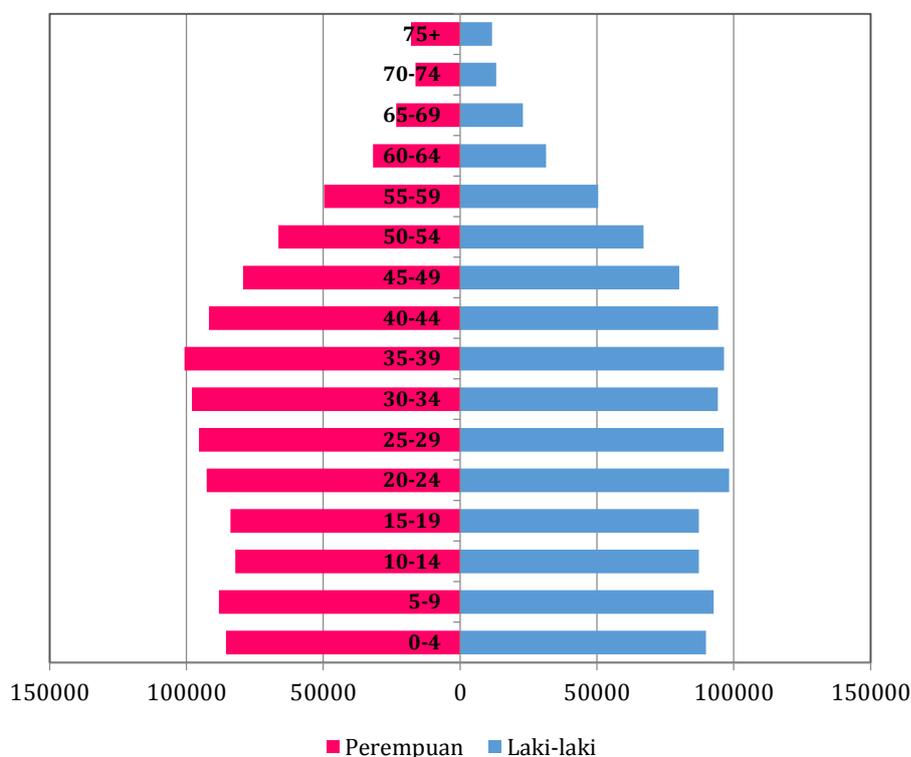
Tujuan dari pembuatan publikasi ini adalah memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo. Deskripsi ini akan membahas tiga faktor dalam rumahtangga yang menurut Bank Dunia akan menghasilkan kesetaraan gender di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni faktor *endowment*, faktor kesempatan ekonomi, dan faktor *agency* (kemampuan membuat pilihan untuk mencapai hasil yang diinginkan). Meski demikian, deskripsi lengkap akan diawali dengan bahasan mengenai karakteristik demografi laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sidoarjo.

3.1. Karakteristik Demografi

Analisis tentang pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo akan diawali dengan pembahasan distribusi penduduk menurut karakteristik demografi, yakni kelompok umur, jenis kelamin kepala rumahtangga, tingkat kesejahteraan, dan angka ketergantungan. Pembahasan distribusi gender menurut karakteristik demografi menjadi sangat penting untuk memastikan apakah keberadaan perempuan telah representatif atau masih termarginalkan dalam karakteristik demografi tertentu. Keberadaan perempuan yang marginal biasanya akan memperparah tingkat kesenjangan gender yang terjadi, atau disebut *intersection*.

Sebaran penduduk menurut kelompok umur sering ditampilkan dalam bentuk piramida penduduk. Selain menampilkan struktur penduduk menurut kelompok umur, piramida penduduk juga mampu mendeteksi mengenai hilangnya (*missing*) jenis kelamin tertentu. Piramida penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 dapat dilihat pada grafik 3.1. berikut.

Grafik 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018



Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

Secara umum terlihat bahwa penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Sidoarjo hampir seimbang yang mengindikasikan tidak adanya penduduk jenis kelamin tertentu yang hilang (*missing*). Bank Dunia mencatat hilangnya jenis kelamin tertentu ini dapat disebabkan oleh perbedaan paparan terhadap resiko kesehatan, seperti aborsi selektif untuk jenis kelamin tertentu, kematian yang berlebihan semisal peperangan, atau kematian ibu yang akut. Seimbangny jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tidak adanya kejadian tertentu yang beresiko terhadap kesehatan penduduk.

Rasio jenis kelamin menurut kelompok umur berkisar antara 95 hingga 105. Sebelum usia 60 tahun, rasio jenis kelamin di Kabupaten Sidoarjo lebih dari 100 yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan. Namun, rasio ini kemudian turun drastis setelah usia 60 tahun dibawah angka 80 yang mengindikasikan lebih panjangnya kelangsungan hidup perempuan dibanding laki-laki. Hal ini dikuatkan dengan tingginya angka

harapan hidup perempuan dibanding laki-laki sehingga jumlah lansia perempuan tentunya lebih banyak dibanding lansia laki-laki. Sementara itu, tingginya penduduk laki-laki pada usia produktif di Kabupaten Sidoarjo sering dikaitkan dengan fenomena migrasi masuk sehubungan dengan peran Sidoarjo sebagai penyangga perkembangan industri Kota Surabaya.

Ukuran demografi lain yang menggunakan karakteristik umur adalah rasio ketergantungan. Dari sisi demografi, ukuran ini dimaksudkan untuk melihat potensi rumahtangga dalam menghasilkan pendapatan. Jika suatu rumahtangga memiliki lebih banyak anggota usia produktif daripada non produktif (anak-anak dan lansia), maka rumahtangga tersebut diharapkan mempunyai sumber penghasilan yang cukup untuk menanggung beban anggota rumahtangga yang non produktif. Penduduk usia produktif didefinisikan sebagai penduduk pada kelompok umur 15-64, anak-anak berumur 0-14, dan lansia berumur 65+.

Tabel 3.1. Rasio Ketergantungan menurut Kelompok Kesejahteraan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Kelompok Kesejahteraan | Jenis Kelamin | |
|------------------------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) |
| Pendapatan Rendah | 45,27 | 45,72 |
| Pendapatan Menengah | 36,66 | 35,28 |
| Pendapatan Tinggi | 35,17 | 27,50 |

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

Tabel 3.1. menunjukkan rasio ketergantungan menurut tingkat kesejahteraan dan jenis kelamin. Secara umum terlihat bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan maka rasio ketergantungan semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada rumahtangga yang telah sejahtera, jumlah anggota rumahtangga (ART) non produktif yang harus ditanggung oleh ART produktif semakin sedikit. Hal ini selanjutnya akan memberi kesempatan kepada ART produktif untuk menumpuk kekayaan. Hal ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan.

Karakteristik demografi selanjutnya adalah komposisi penduduk menurut jenis kelamin kepala rumahtangga (KRT). Sekitar 89 persen kepala rumahtangga

di Sidoarjo berjenis kelamin laki-laki dan sisa 11 persennya berjenis kelamin perempuan. Ketiadaan *male breadwinner* pada rumahtangga yang dikepalai perempuan membuat rumahtangga ini tergolong rentan karena memiliki keterbatasan untuk mengakses sumber daya. Meski demikian, interpretasi terhadap angka ini memerlukan kehati-hatian mengingat kepala rumahtangga perempuan bisa juga terbentuk karena keberadaan suami yang bekerja di luar daerah.

Penduduk yang tinggal di rumahtangga yang dikepalai perempuan juga tidak proporsional. Banyaknya perempuan yang tinggal di rumah tangga jenis ini sejumlah 14 persen, lebih banyak dibandingkan laki-laki yang hanya berjumlah 7 persen. Ketimpangan gender biasanya lebih parah pada jenis rumahtangga yang dikepalai oleh perempuan daripada jenis rumahtangga yang dikepalai oleh laki-laki. Dilihat dari tingkat kesejahteraan, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan untuk tiap tingkat kesejahteraan hampir sama dan merata, yakni sekitar 20 persen untuk tiap kuantil pengeluaran.

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin KRT dan Tingkat Kesejahteraan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (Persen)

| Karakteristik Rumahtangga | Jenis Kelamin | | |
|---------------------------|---------------|-----------|-------|
| | Laki-laki | Perempuan | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Jenis Kelamin KRT | | | |
| Laki-laki | 92,60 | 85,60 | 89,10 |
| Perempuan | 7,40 | 14,40 | 10,90 |
| Tingkat Kesejahteraan | | | |
| Kuintil Terendah | 19,60 | 20,00 | 20,00 |
| Kuintil 2 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Kuintil 3 | 19,70 | 20,00 | 19,90 |
| Kuintil 4 | 21,00 | 19,20 | 20,10 |
| Kuintil Tertinggi | 19,70 | 20,40 | 20,00 |

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

3.2. Faktor Endowment

Menurut framework kesetaraan gender Bank Dunia (2012), ketika tingkat pendapatan suatu negara meningkat, maka hal ini akan berpengaruh pada faktor

endowment penduduknya, terutama tingkat pendidikan. Orang tua dulu yang hanya mengirim anak laki-lakinya sekolah, maka kini anak perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah. Jika *endowment* terutama tingkat pendidikan perempuan meningkat, maka perempuan bisa berkontribusi terhadap pendapatan keluarga.

Selanjutnya, permintaan jasa pendidikan yang besar oleh rumahtangga akan memaksa pemerintah (*formal institutions*) untuk menyediakan pendidikan yang murah dan berkualitas. Hal ini tentu saja akan mengurangi biaya pendidikan yang harus ditanggung rumahtangga, baik biaya langsung maupun tidak langsung, serta biaya kesempatan (*opportunity cost*). Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan ini selanjutnya akan direspon oleh pasar dengan memberi upah yang lebih tinggi.

Bagian ini akan membahas disparitas faktor *endowment* dalam rumahtangga yang kemudian diterjemahkan oleh ekonom kepada modal manusia yang meliputi pendidikan dan kesehatan.

3.2.1. Pendidikan

Modal manusia pertama yang akan dibahas adalah partisipasi sekolah. Menurut Bank Dunia (2012), partisipasi sekolah mengandung nilai investasi dan nilai instrumental yang akan menentukan perbedaan kesempatan di masa depan. Yang dimaksud nilai investasi adalah seseorang yang bersekolah cenderung akan mempunyai kesehatan yang baik dan pekerjaan yang layak. Selanjutnya, yang dimaksud mengandung nilai instrumental adalah seseorang yang bersekolah relatif mempunyai tingkat pendapatan yang lebih baik. Oleh karena itu, disparitas pada modal manusia (terutama pendidikan) akan memperparah dan mengekalkan kesenjangan gender yang ada.

Tak lupa, perempuan yang berpendidikan relatif mampu memutus kesenjangan gender bagi generasi berikutnya. Perempuan berpendidikan akan mampu membuat keputusan yang baik tentang alokasi belanja bagi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Selanjutnya, anak-anak ini akan tumbuh menjadi pekerja yang produktifitasnya tinggi di kemudian hari dan

memperoleh pendapatan yang lebih baik, bahkan menjadi calon ibu yang sehat dan hebat.

Tabel 3.3. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Partisipasi Sekolah | Jenis Kelamin | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Angka Partisipasi Sekolah (APS) | | | |
| 7-12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13-15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16-18 | 86,09 | 86,34 | 86,23 |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) | | | |
| SD | 104,54 | 107,87 | 106,20 |
| SMP | 96,72 | 107,04 | 101,41 |
| SMA | 121,73 | 105,85 | 112,98 |
| Angka Partisipasi Murni (APM) | | | |
| SD | 98,50 | 100,00 | 99,25 |
| SMP | 87,27 | 92,57 | 89,68 |
| SMA | 74,35 | 66,83 | 70,21 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Tabel 3.3 menunjukkan partisipasi sekolah menurut jenis kelamin di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2018 seluruh penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun saat itu tengah bersekolah yang ditunjukkan oleh angka partisipasi sekolah (APS). APS yang mencapai 100 menunjukkan keterbukaan peluang untuk bersekolah di Kabupaten Sidoarjo tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini jelas menunjukkan ketiadaan kesenjangan gender dalam dunia pendidikan, padahal pada masa dulu perempuan mempunyai keterbatasan akses dalam dunia pendidikan. Beberapa sebab meningkatnya partisipasi sekolah perempuan adalah program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, imbal balik pendidikan yang semakin besar, dan meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk.

Mengenai angka partisipasi kasar (APK), indikator ini berguna untuk melihat adanya murid yang belum cukup umur atau lebih umur namun tengah bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. Dengan kata lain, sekolah di

Kabupaten Sidoarjo mampu menampung murid lebih banyak daripada target. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa nilai APK untuk semua jenjang baik untuk laki-laki maupun perempuan lebih dari 100, kecuali untuk laki-laki di jenjang SMP. Hal ini menunjukkan keberadaan penduduk usia sekolah yang memasuki jenjang pendidikan tertentu lebih telat atau terlalu cepat dibanding teman sebayanya. Perempuan cenderung terlalu cepat memasuki SD dan SMP yang ditunjukkan oleh tingginya APK untuk kedua jenjang pendidikan tersebut.

Indikator angka partisipasi murni (APM) menunjukkan proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. Secara umum, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah nilai APM. Hal ini menunjukkan adanya fenomena murid bersekolah tidak sesuai umur pada tahun-tahun sebelumnya. Selisih nilai yang positif antara APK dan APM mengindikasikan kejadian telat masuk jenjang pendidikan tertentu atau mengulang atau drop out.

Tabel 3.4. Rasio Laki-laki dan Perempuan menurut Rumpun Ilmu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Rumpun Ilmu | Rasio Laki-laki/Perempuan |
|-----------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) |
| Ilmu Agama | 0,97 |
| Ilmu humaniora | 0,40 |
| Ilmu Sosial | 0,60 |
| Ilmu Alam | 1,18 |
| Ilmu Formal | 2,85 |
| Ilmu Terapan | 1,00 |
| Kesehatan& Pendidikan | 0,58 |
| Teknik dan Mesin | 1,82 |
| Lainnya | 1,85 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Meski disparitas partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil, namun stereotipe gender dalam bidang pendidikan masih tetap terjadi. Tabel 3.4 menunjukkan rasio laki-laki dan perempuan (L/P) dalam hal jurusan pendidikan yang diambil saat kuliah. Jika rasio bernilai tepat 1, maka jumlah laki-laki dan perempuan yang mengambil jurusan tersebut hampir sama. Namun, jika rasio bernilai kurang dari 1, maka jurusan tersebut mempunyai

mahasiswa perempuan lebih banyak. Sebaliknya, jika rasio bernilai lebih dari 1, maka sebagian besar muridnya adalah laki-laki.

Dari tabel 3.4 di atas terlihat bahwa jurusan ilmu agama, humaniora (seni dan sastra), dan ilmu sosial (ekonomi& sosial politik) menarik lebih banyak mahasiswa perempuan. Sementara itu, jurusan ilmu alam (fisika, kimia, biologi) dan ilmu formal (matematika, Teknologi Informasi), lebih banyak menarik perhatian mahasiswa laki-laki. Secara garis besar, ilmu terapan memiliki mahasiswa laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang. Namun, kalau diteliti lebih jauh dalam rumpun ilmu terapan, perempuan lebih terkonsentrasi ke bidang pendidikan dan kesehatan daripada laki-laki yang lebih senang ke bidang tehnik dan mesin.

Perbedaan kemampuan kognitif antara laki-laki dan perempuan telah menarik perhatian banyak peneliti. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keunggulan dalam bidang matematis dan *visuospatial*, sementara perempuan memiliki keunggulan dalam hal mengingat dan berbicara, namun tidak ada perbedaan diantara keduanya dalam hal kefasihan berbicara (*fluency*) (Oksuzyan, Doblhammer, dan Guma, 2018 p.68). Namun, seiring membaiknya perekonomian dan terbukanya akses pendidikan, diperkirakan kemampuan kognitif antara laki-laki dan perempuan akan semakin membaik dan tidak berbeda.

3.2.2. Kesehatan

Tingkat kesehatan laki-laki dan perempuan harus diakui memang berbeda. Ada setidaknya tiga faktor yang mempengaruhi disparitas kesehatan dan kelangsungan hidup antara laki-laki dan perempuan, yakni faktor hormonal dan genetika, faktor yang berhubungan dengan gaya hidup, dan faktor sosial (Oksuzyan, Doblhammer, dan Guma, 2018).

Penelitian yang ada menunjukkan bahwa hormon perempuan (estrogen) memberi keuntungan dalam hal pemberian proteksi kekebalan tubuh. Dengan hormon tersebut, perempuan relatif lebih kebal terhadap penyakit menular daripada laki-laki, setidaknya jika laki-laki dan perempuan sakit dengan penyebab yang sama, maka sakit laki-laki lebih parah dibanding perempuan.

Begitu pula dengan reaksi terhadap vaksinasi, kekebalan tubuh perempuan akan lebih kuat dibanding reaksinya terhadap tubuh laki-laki. Hal ini selanjutnya akan menentukan perbedaan tingkat kesakitan dan kematian antara laki-laki dan perempuan (Oksuzyan, Doblhammer, dan Guma, 2018 p.78).

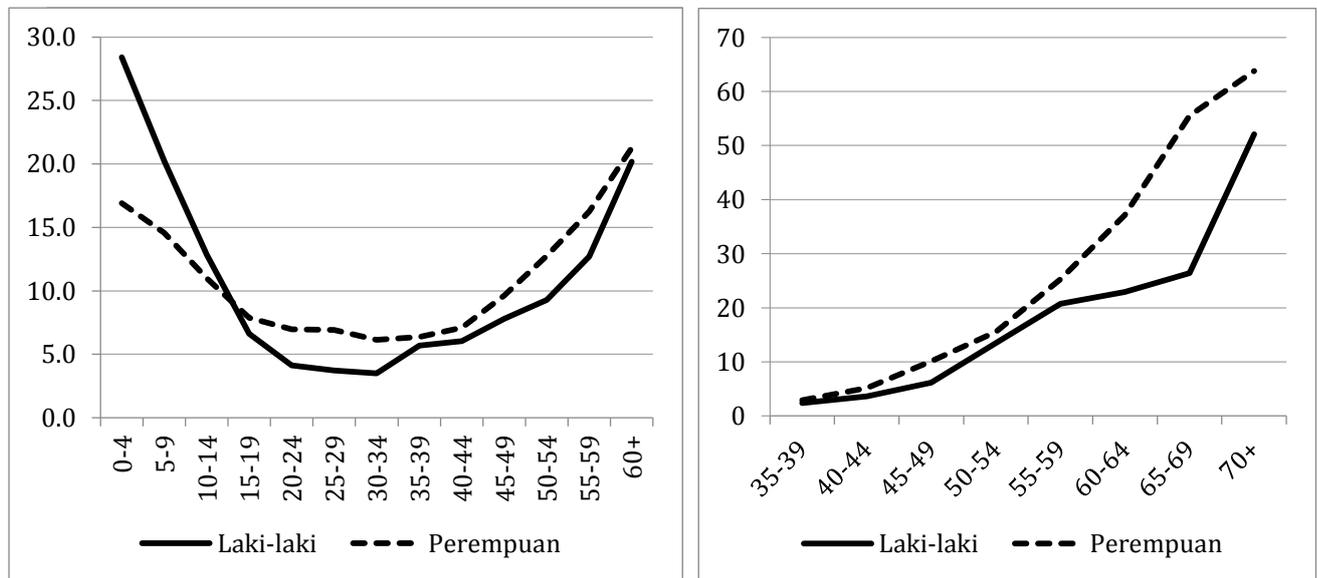
Dalam hal kromosom, sebagaimana diketahui bahwa tubuh laki-laki mengandung kromosom XY dan tubuh perempuan mengandung kromosom XX. Dalam satu kromosom X terkandung 1100 gen yang berhubungan dengan proses fisiologis dan satu kromosom Y terkandung kurang dari 100 gen yang akan menentukan jenis kelamin laki-laki. Keberadaan dua kromosom X dalam tubuh perempuan tentu memberi kekebalan tubuh lebih kuat terkait dengan penyakit yang berhubungan dengan kromosom X-seperti hemophilia A. Tambahan lagi, setengah gen dari kromosom X pada perempuan bersifat aktif dan setengahnya lagi bersifat non aktif, sementara pada laki-laki seluruh gen pada kromosom X bersifat aktif. Hal ini juga meningkatkan resiko laki-laki terhadap paparan penyakit yang disebabkan oleh kromosom X dibanding perempuan. Hal ini kemudian memberi keuntungan kesehatan lebih kepada perempuan daripada laki-laki secara biologis.

Dalam faktor gaya hidup, kebiasaan merokok dan minum-minuman keras jelas membedakan tingkat kesehatan antara laki-laki dan perempuan. Kebiasaan perempuan untuk mengatur pola makannya dengan asupan makanan sehat dan bergizi jelas menguntungkan perempuan, sementara laki-laki yang melakukan hal yang sama dianggap kurang maskulin. Kebiasaan olahraga perempuan yang kontinyu sepanjang hidupnya juga memberi manfaat lebih pada perempuan, sementara aktifitas olahraga pada laki-laki biasanya terhenti setelah dewasa. Hal ini disebabkan motivasi laki-laki untuk berolahraga memang untuk prestasi dan menunjukkan kekuatan fisiknya, sementara untuk perempuan memang cenderung untuk menjaga kesehatan.

Penjelasan dari sisi sosial, tingkat pendidikan jelas memberi pengaruh positif terhadap tingkat kesehatan dalam hal kemudahan akses terhadap pengetahuan untuk menjaga kesehatan dan akses terhadap jaminan kesehatan. Tingkat kesehatan juga berbeda antara pengangguran dan pekerja, yang berupah/gaji tinggi dengan yang lebih rendah meski temuan ini mungkin

mengandung *selection bias*. Maksudnya adalah sebenarnya bukan status menganggur/bekerja yang membedakan tingkat kesehatan seseorang, tapi secara logika kondisi sehat memungkinkan seseorang (terseleksi) untuk bekerja.

Grafik 3.2. Angka Kesakitan (kiri) dan Angka Disabilitas (Kanan) *mean smoothed* menurut Kelompok Umur, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018



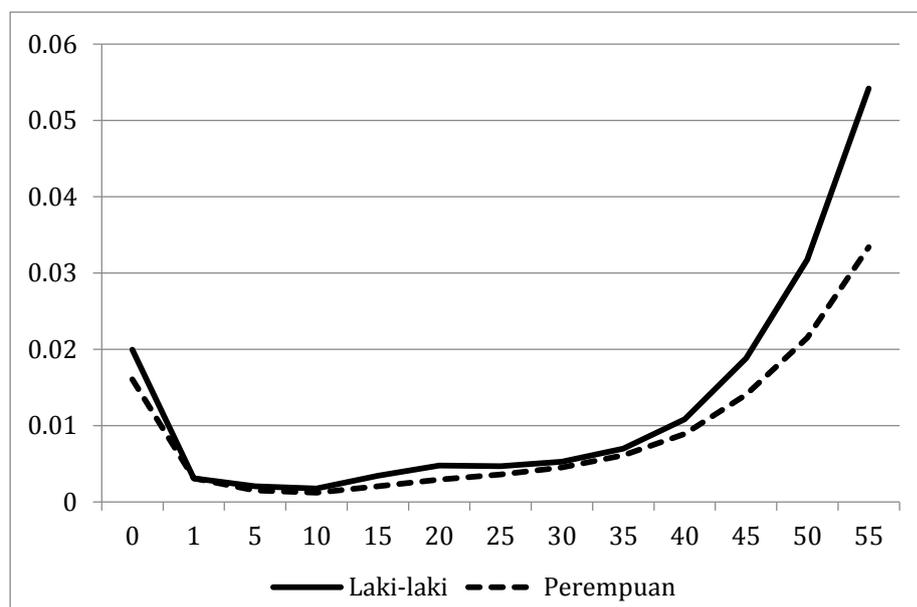
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

Dari grafik 3.2 di atas terlihat bahwa tingkat kesehatan laki-laki dan perempuan bervariasi menurut kelompok umur. Pada kelompok umur muda proporsi laki-laki yang sakit dan terganggu kegiatannya lebih besar dibanding perempuan. Menginjak umur remaja hingga lansia, angka kesakitan perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Beberapa alasan mengapa angka kesakitan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki adalah pertama, perempuan cenderung memiliki kondisi kronis pada fungsi tubuhnya sementara laki-laki memiliki kondisi kronis yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya, seperti penyakit jantung, dan lainnya. Alasan kedua adalah perempuan dianggap lebih mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya dan laki-laki enggan untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter atau mengakui kelemahan tubuhnya sendiri (Oksuzyan, Doblhammer, dan Guma, 2018).

Pola yang sama ditemui untuk angka disabilitas menurut kelompok umur, dimana proporsi perempuan yang menyandang disabilitas relatif lebih tinggi dibanding laki-laki pada setiap kelompok umur. Disabilitas di Susenas

menggunakan konsep *Activities of Daily Living* (ADL) atau keterbatasan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, seperti naik tangga, menggerakkan jari, berkomunikasi, mengurus diri sendiri, dan lainnya. Menurut Verbrugge dan Jette (1994), analisis disabilitas sebaiknya dilakukan pada usia dewasa atau lansia sebagai akibat berkurangnya fungsi tubuh (*disablement process*) daripada usia anak-anak yang kemungkinan disebabkan oleh banyak hal. Ternyata, sumber disabilitas di Kabupaten Sidoarjo sebagian besar bersumber pada gangguan/ kesulitan untuk melihat dan naik tangga.

Grafik 3.3. Peluang Kematian menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018



Sumber : Angka Harapan Hidup, diolah dengan program Mortpak aplikasi MATCH model New Coale-Demeny West

Tingginya angka disabilitas pada perempuan ini bukan berarti laki-laki memiliki kondisi kesehatan yang lebih prima. Sebagaimana terlihat pada grafik 3.3 di atas, probabilitas kematian untuk laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan yang mengindikasikan besarnya peluang laki-laki untuk meninggal pada setiap kelompok umur. Sebagai konsekuensi logis, umur harapan hidup perempuan pada saat ini lebih tinggi daripada laki-laki. Namun umur panjang perempuan tersebut menjadi kurang bermakna jika harus disertai dengan penurunan fungsi tubuh/disabilitas. Oleh karena itu, perhatian memang layak diberikan kepada perempuan yang secara matematis mempunyai umur lebih panjang, namun mereka juga memiliki proporsi disabilitas yang lebih besar.

3.3. Faktor Kesempatan Ekonomi

Dalam hal kesempatan ekonomi, arah sebaliknya dari framework Bank Dunia akan digunakan. Dalam rumahtangga, jika alokasi waktu yang digunakan perempuan untuk mengurus rumahtangga lebih banyak daripada laki-laki; dan institusi formal melakukan segregasi/pengelompokan pekerjaan berdasar gender & abai dengan aturan dan infrastruktur bagi perempuan; serta pasar sendiri membuat diskriminasi berdasar gender, maka hal ini akan menghalangi seseorang dengan gender tertentu untuk meraup kesempatan ekonomi.

Faktor kesempatan ekonomi biasanya dilihat dari indikator-indikator ketenagakerjaan. Keputusan seseorang untuk menangkap kesempatan ekonomi yang ada biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain : (1) keberadaan anak kecil, untuk melihat beban keluarga, (2) tingkat pendidikan, untuk menangkap imbal balik dari investasi modal manusia, (3) umur, untuk melihat siklus hidup, seperti kelahiran. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai anak kecil, mempunyai tingkat pendidikan tinggi, dan sedang tidak mengandung/melahirkan cenderung akan menangkap kesempatan ekonomi yang tersedia.

Kesempatan ekonomi dibagi menjadi 4 kategori, yakni ekstensif, margin intensif, produktifitas, dan akses kepada sumber daya. Keempat kategori tersebut secara komprehensif akan memberi gambaran mengenai pasar kerja suatu daerah. Indikator ketenagakerjaan yang bersifat ekstensif meliputi partisipasi angkatan kerja dan pengangguran, sementara itu yang termasuk margin intensif adalah jam kerja dan jenis pekerjaan. Produktifitas biasanya diukur dengan upah buruh.

3.3.1. Indikator Ketenagakerjaan Ekstensif

Indikator ketenagakerjaan yang bersifat ekstensif meliputi partisipasi angkatan kerja dan pengangguran. Kedua indikator ini berfungsi untuk melihat sejauh mana penyerapan pasar kerja seiring bertambahnya penduduk usia kerja. Dalam konteks Indonesia, penduduk usia kerja ini secara demografi didefinisikan sebagai penduduk berusia 15-64 tahun. Dalam bahasa lain, penduduk usia kerja ini biasanya disebut sebagai tenaga kerja (*manpower*).

Partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar kerja, baik aktif bekerja maupun aktif mencari kerja. Penduduk usia kerja yang bekerja ini selanjutnya disebut pekerja dan penduduk usia kerja yang mencari kerja disebut penganggur. Untuk melihat seberapa besar porsi penduduk usia kerja yang benar-benar aktif dalam pasar kerja, maka indikator ketenagakerjaan yang biasa dipakai adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

Tabel 3.5. Indikator Ketenagakerjaan menurut Karakteristik Individu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Karakteristik Individu | TPAK | | % Pekerja | | TPT | | BAK | |
|------------------------|-------|-------|-----------|-------|------|------|-------|-------|
| | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Status Perkawinan | | | | | | | | |
| Belum Kawin | 59,22 | 42,31 | 51,05 | 34,81 | 8,18 | 0,08 | 40,78 | 57,69 |
| Kawin | 90,99 | 52,26 | 89,14 | 51,69 | 1,85 | 0,01 | 9,01 | 47,74 |
| Cerai Hidup | 92,31 | 91,72 | 92,31 | 91,72 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 8,28 |
| Cerai Mati | 57,95 | 40,44 | 57,95 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 42,05 | 59,56 |
| Tingkat Pendidikan | | | | | | | | |
| Tidak Sekolah | 60,18 | 36,35 | 60,18 | 36,35 | 0,00 | 0,00 | 39,82 | 63,65 |
| SD | 71,41 | 38,13 | 68,75 | 38,13 | 2,66 | 0,00 | 28,59 | 61,87 |
| SMP+SMA | 79,32 | 47,59 | 74,65 | 45,44 | 4,67 | 0,02 | 20,68 | 52,41 |
| >SMA | 87,73 | 72,89 | 85,57 | 68,03 | 2,16 | 0,05 | 12,27 | 27,11 |
| Kelompok Umur | | | | | | | | |
| 15-24 | 41,23 | 34,49 | 32,46 | 26,92 | 8,77 | 0,08 | 58,77 | 65,51 |
| 25-34 | 96,11 | 65,32 | 91,43 | 63,62 | 4,68 | 0,02 | 3,89 | 34,68 |
| 35-44 | 97,40 | 57,94 | 95,05 | 57,08 | 2,35 | 0,01 | 2,60 | 42,06 |
| 45-54 | 95,98 | 56,09 | 93,74 | 56,09 | 2,24 | 0,00 | 4,02 | 43,91 |
| 55-59 | 47,78 | 22,65 | 47,33 | 22,65 | 0,45 | 0,00 | 52,22 | 77,35 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Keterangan :

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

BAK : Bukan Angkatan Kerja

Lk : Laki-laki

Pr : Perempuan

Secara sederhana, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dihitung dengan rumus jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, syarat tergabung dalam angkatan kerja adalah penduduk harus aktif dalam pasar kerja, baik sebagai pekerja maupun penganggur. Sebagai konsekuensi, penduduk yang tidak aktif dalam pasar kerja, meliputi anak sekolah, ibu rumahtangga, dan lainnya, akan dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja (BAK).

Tabel 3.5. di atas menunjukkan indikator ketenagakerjaan yang bersifat ekstensif menurut karakteristik individu. Mengenai partisipasi kerja menurut status perkawinan, partisipasi terendah terdapat pada penduduk yang belum kawin dan cerai mati, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Rendahnya partisipasi kerja pada penduduk *single/bujangan* ini kemungkinan disebabkan oleh belum adanya tanggung jawab dalam keluarga dan sifatnya yang masih mencari-cari pekerjaan yang cocok. Sementara itu, status cerai mati biasanya terjadi pada usia tua sehingga mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pasar kerja dan hanya menerima transfer dari anggota rumahtangga yang lain atau sumber lainnya.

Tabel 3.6. Kegiatan Seminggu Yang Lalu Istri, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Tingkat Kesejahteraan | Jenis Kegiatan | | |
|-----------------------|----------------|----------------------|---------|
| | Bekerja | Mengurus Rumahtangga | Lainnya |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Bawah | 35,2 | 63,0 | 1,8 |
| Menengah | 36,9 | 62,9 | 0,2 |
| Atas | 53,1 | 46,7 | 0,2 |

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

Menyandang status kawin, partisipasi kerja laki-laki meningkat pesat sebagai tanggung jawab laki-laki menyediakan nafkah bagi keluarga. Sementara itu, partisipasi perempuan hanya naik sedikit yang kemungkinan disebabkan oleh kesibukan perempuan untuk mengurus rumahtangga, misal mengurus anak atau orang tua jompo, sebagaimana diterangkan oleh model *household labor supply* di atas. Meski demikian, perlu penelitian lanjutan untuk menjawab mengapa partisipasi perempuan relatif rendah saat kawin. Dugaan bahwa fenomena ini disebabkan oleh penghasilan suami yang sudah lebih dari cukup sepertinya kurang mendapat dukungan bukti empiris. Hasil Susenas Tahun

2018 menunjukkan bahwa perempuan yang berstatus sebagai istri cenderung untuk bekerja seiring meningkatnya tingkat kesejahteraan, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 3.6 di atas.

Dilihat dari tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka partisipasi angkatan kerja Sidoarjo semakin meningkat, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa insentif untuk bekerja semakin meningkat seiring meningkatnya tingkat pendidikan. Dengan terjun ke pasar kerja, seseorang akan mempunyai kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperolehnya dan memperoleh penghasilan (imbal balik) dari investasi pendidikan yang telah dilakukannya.

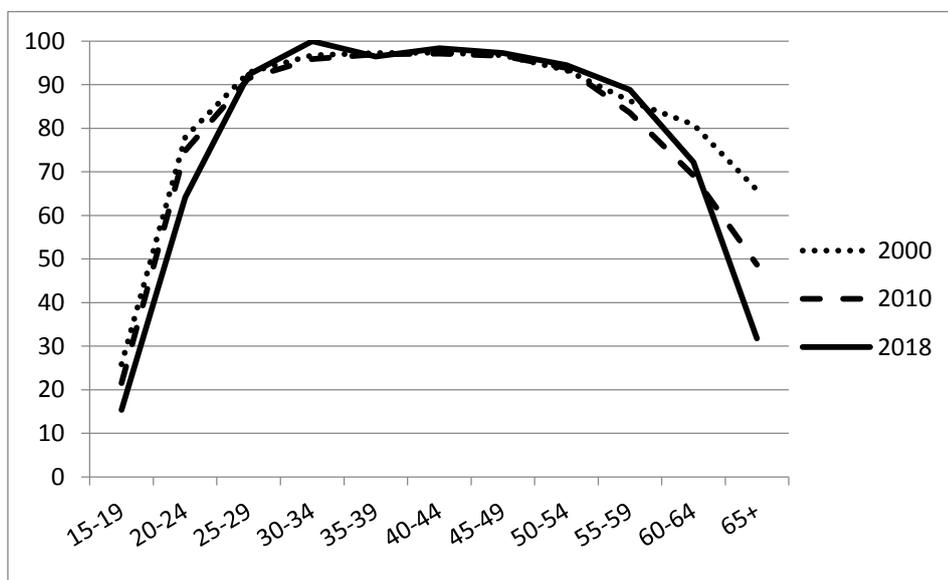
Pada umumnya, laki-laki yang berpendidikan tinggi akan menikah dengan perempuan yang berpendidikan tinggi (teori *assortive matching*). Dengan kondisi imbal balik (*rate of return*) yang semakin tinggi seiring meningkatnya tingkat pendidikan di Indonesia, maka menikah dengan orang yang berpendidikan tinggi akan menambah pendapatan dalam keluarga. Dengan demikian, menikah dengan laki-laki berpendidikan tinggi akan memberi peluang kepadanya untuk keluar dari pasar kerja. Namun faktanya tidak demikian, TPAK perempuan berpendidikan tinggi di Sidoarjo justru meningkat dibanding perempuan yang berpendidikan rendah. Hal ini sekaligus menolak dugaan bahwa perempuan Sidoarjo akan keluar dari pasar kerja jika pendapatan suami sudah lebih dari cukup.

Dilihat dari segi usia, partisipasi kerja terendah terdapat pada kelompok umur muda dan kelompok umur tua. Pada kelompok umur muda, pemuda masih mencoba-coba pekerjaan yang cocok sehingga mereka sering berganti-ganti pekerjaan dan mencari-cari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahliannya. Sementara pada umur tua, penduduk usia ini sudah mulai memasuki masa pensiun sehingga keluar dari pasar kerja. Dilihat secara grafik, angka partisipasi ini akan menunjukkan kurva huruf U terbalik, baik untuk laki-laki maupun perempuan (lihat grafik 3.4 dan grafik 3.5 di bawah ini).

Dari tahun ke tahun, pola grafik TPAK laki-laki relatif hampir sama dimana pada umur muda partisipasi bekerjanya rendah kemudian meningkat

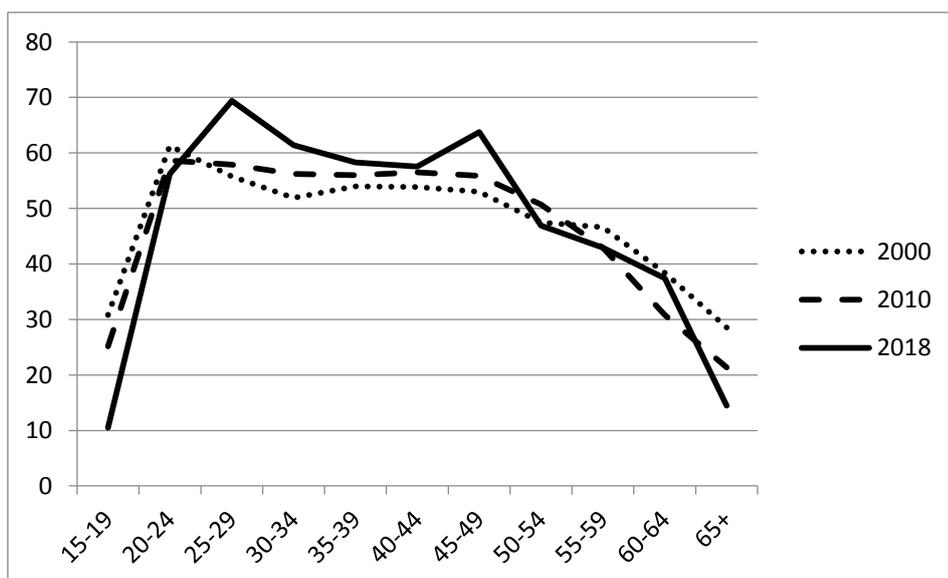
seiring bertambahnya usia hingga mencapai puncak kemudian turun perlahan. Pola yang sama juga terlihat pada grafik TPAK perempuan. Perbedaan grafik TPAK dari tahun ke tahun biasanya terlihat pada kelompok umur muda dan kelompok umur tua. Pada kelompok umur muda, angka partisipasi kerja biasanya cenderung menurun seiring meningkatnya akses terhadap pendidikan. Pada kelompok umur tua, angka partisipasi kerja diperkirakan terus menurun sejalan dengan membaiknya jaminan hari tua sehingga lansia tidak perlu bekerja lagi di hari tuanya sebagaimana lansia yang lalu.

Grafik 3.4. TPAK laki-laki menurut Tahun, Kabupaten Sidoarjo



Sumber : BPS, SP2000, SP2010, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Grafik 3.5. TPAK perempuan menurut Tahun, Kabupaten Sidoarjo



Sumber : BPS, SP2000, SP2010, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Ada hal menarik jika grafik TPAK perempuan Sidoarjo dicermati lebih jauh. Meski TPAK cenderung turun pada umur muda dan umur tua, namun pada umur-umur diantara keduanya TPAK perempuan Sidoarjo sebenarnya relatif meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya (lihat grafik 3.5). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Sidoarjo sebenarnya ingin terlibat dalam pasar kerja meski keterlibatannya tidak sebesar laki-laki. Setidaknya ada dua hal yang menghalangi keterlibatan perempuan dalam pasar kerja, yaitu alokasi waktu dalam pekerjaan rumah tangga dan faktor siklus hidup seperti perkawinan dan melahirkan.

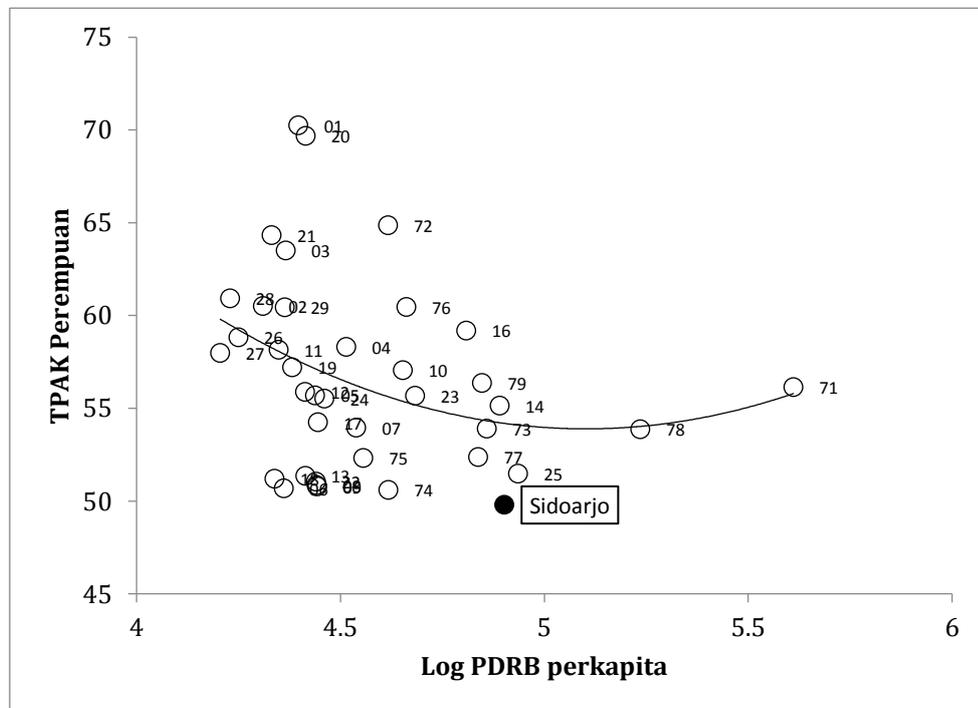
Grafik TPAK Sidoarjo mencapai puncaknya pada usia 25-29 kemudian menurun sesudahnya dan naik lagi pada usia 45-49. Keberadaan dua puncak pada grafik TPAK Perempuan Sidoarjo sebenarnya jamak terjadi di wilayah lain. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Sidoarjo sempat tergabung dalam pasar kerja sebelum menikah dan melahirkan. Ketika anak-anak sudah besar, perempuan Sidoarjo akan kembali tergabung dalam pasar kerja dan partisipasinya ini akan terus menurun seiring bertambahnya usia.

Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menurut ahli ekonomi berhubungan dengan besarnya PDRB suatu daerah. Hubungan antara partisipasi kerja perempuan dan perkembangan ekonomi ini akan berbentuk huruf U sesuai dengan hipotesis Goldin (1995) yang menyatakan bahwa partisipasi kerja perempuan biasanya relatif tinggi pada daerah-daerah yang didominasi oleh sektor pertanian sebagai pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga. Seiring perkembangan sektor industri yang memproduksi barang-barang komersial dengan teknologi baru, maka partisipasi kerja perempuan akan menurun. Dengan membaiknya struktur industri dan munculnya sektor jasa, maka partisipasi kerja perempuan akan meningkat kembali.

Goldin (1995) menambahkan partisipasi kerja perempuan yang rendah di negara-negara berkembang bisa disebabkan oleh faktor urbanisasi dan produksi barang non pertanian untuk komersial. Sayangnya, lapangan kerja ini tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja perempuan sebagaimana di sektor pertanian. Untuk bisa berpartisipasi lagi dalam lapangan kerja non pertanian, tingkat pendidikan perempuan perlu ditingkatkan lebih dari pendidikan dasar. Pada

pendapat yang lain, menurunnya partisipasi kerja perempuan bisa disebabkan oleh diskriminasi gender, terbatasnya fisik perempuan, kesulitan menyeimbangkan peran pekerja dan ibu rumah tangga, dan kondisi sosial budaya setempat.

Grafik 3.6. Hubungan TPAK perempuan dan PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018



Sumber : BPS

Pada tahun 2018 partisipasi kerja perempuan Sidoarjo sedang berada pada posisi paling rendah dari kurva U meski sektor industri tengah berkembang sebagaimana terlihat pada grafik 3.6. Merujuk pada hipotesis Goldin di atas, hal ini mungkin disebabkan oleh preferensi pengusaha akan tenaga kerja laki-laki karena kekuatan fisiknya, kesulitan perempuan untuk mengalokasikan waktu bagi pekerjaan di sektor industri dan tugas kerumahtanggaan, dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan.

Beralih ke tingkat pengangguran, ketimpangan gender dalam tingkat pengangguran dijelaskan oleh bank Dunia sebagai berikut. Kondisi pertama, perempuan biasanya menghadapi tantangan yang luar biasa dalam menemukan pekerjaan dibanding laki-laki karena jejaring sosial yang terbatas dan keterbatasan informasi. Selain itu, perempuan juga lebih pilih-pilih pekerjaan karena karena harus menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan tanggung

jawab di rumah. Alasan lain, perempuan juga biasanya memilih pekerjaan yang sesuai dengan norma, stereotipe, bahkan prasangka gender, dibandingkan dengan pertimbangan penghasilan atau kecocokan pekerjaan (*job match*). Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dan durasi mencari pekerjaan menjadi lebih lama. Di lain pihak, jika perempuan merasa putus asa setelah mencari pekerjaan yang lama, maka mereka cenderung keluar dari pasar kerja. Jika kondisi ini lebih kuat daripada kondisi pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka tingkat pengangguran perempuan biasanya lebih rendah dan partisipasi perempuan ikut rendah.

Tampak dari tabel 3.5 bahwa tingkat pengangguran laki-laki selalu lebih besar daripada perempuan. Dengan memperhatikan angka pengangguran perempuan Sidoarjo yang rendah dan partisipasi bekerjanya juga rendah, tampaknya kondisi yang terakhir yang lebih cocok untuk menerangkan kondisi kesempatan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Bahwa perempuan kesulitan mencari pekerjaan yang pas dengan kewajibannya mengurus rumahtangga sepertinya lebih pas untuk menerangkan mengapa partisipasi kerja perempuan Sidoarjo relatif rendah.

3.3.2. Indikator Ketenagakerjaan Margin Intensif

Margin intensif digunakan untuk melihat intensitas kerja dari pekerja yang diwakili oleh dua indikator, yakni jenis pekerjaan dan jumlah jam kerja. Kedua jenis indikator ini berfungsi untuk menampilkan sejauh mana keterlibatan pekerja dalam pekerjaan.

Dilihat dari lapangan pekerjaan, porsi laki-laki yang bekerja di sektor sekunder dan sektor jasa hampir sama (tabel 3.7). Sementara itu, pekerjaan perempuan lebih terkonsentrasi ke sektor jasa. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, perempuan cenderung bekerja di sektor jasa yang lebih membutuhkan ketelitian, ketelatenan, dan kesabaran. Pekerjaan di sektor jasa juga menawarkan jam kerja yang lebih fleksibel kepada perempuan yang memungkinkan mereka untuk menyeimbangkan waktu antara bekerja dan mengurus rumahtangga.

Ada perbedaan sistematis antara pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan, baik dalam hal tipe pekerjaan, lapangan usaha, jabatan, dan lain-lain. Istilah *employment segregation* atau *occupational segregation* merujuk pada konsentrasi yang tidak seimbang antara laki-laki atau perempuan pada lapangan pekerjaan tertentu. Misalnya perempuan terkonsentrasi pada sektor jasa sementara laki-laki bekerja di sektor sekunder. Perempuan lebih suka menjadi guru, perawat, tenaga penjualan, dan tenaga jasa lainnya. Sementara laki-laki banyak bekerja di sektor konstruksi dan transportasi. Perempuan juga lebih suka pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu lama atau fleksibel karena harus menyesuaikan dengan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Tabel 3.7. Karakteristik Pekerjaan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Karakteristik | Jenis Kelamin | |
|----------------------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) |
| Jenis Kegiatan | | |
| Bekerja | 75,37 | 47,64 |
| Pengangguran | 3,95 | 2,15 |
| Bukan Angkatan Kerja | 20,68 | 50,21 |
| Jam Kerja | | |
| Paruh Waktu | 8,30 | 19,40 |
| Penuh Waktu | 91,70 | 80,60 |
| Lapangan Usaha | | |
| Primer | 5,30 | 1,50 |
| Sekunder | 47,40 | 34,40 |
| Tersier | 47,30 | 64,10 |
| Status Pekerja | | |
| Formal | 76,00 | 71,70 |
| Informal | 24,00 | 28,30 |
| Status Pekerjaan | | |
| Berusaha | 22,70 | 30,40 |
| Buruh | 69,20 | 59,60 |
| Pekerja Bebas | 6,60 | 2,00 |
| Pekerja Keluarga | 1,50 | 8,00 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Employment segregation bisa diawali dari stereotipe gender. Stereotipe gender ini mempunyai pengaruh yang bersifat deskripsi, “what is” dan preskripsi/ rekomendasi, “what should” (Risman, 2018). Dalam bahasa sederhana, perempuan sering digambarkan dengan pribadi yang lembut, telaten, sabar, bahkan sentimentil; inilah makna “*what is*”, apa itu perempuan. Ketika perempuan digambarkan dengan kondisi seperti di atas, maka pekerjaan yang cocok bagi perempuan adalah perawat, guru, *customer service*; ini adalah makna “*what should*”, apa yang cocok bagi perempuan. Adanya stereotipe gender ini tidak hanya merugikan perempuan, tapi juga laki-laki, karena akan menghalangi kedua gender untuk bekerja dan berkarya di bidang pekerjaan yang lain.

Dilihat dari jam kerja, sekitar 90 persen lebih laki-laki memiliki jam kerja penuh waktu dibanding perempuan yang hanya sekitar 80 persen. Secara ekonomi, jam kerja yang relatif sedikit akan menghalangi perempuan untuk mengumpulkan pendapatan lebih banyak. Oleh karena itu, kondisi ini bisa juga diartikan telah terjadi kesenjangan gender, namun kadang kondisi seperti ini merupakan kondisi yang diharapkan oleh perempuan. Dengan jam kerja yang lebih pendek, perempuan mempunyai keleluasaan untuk menyeimbangkan peran antara pekerja dan ibu rumah tangga. Meski demikian, persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor formal maupun informal jumlahnya hampir sama. Untuk diperhatikan, sektor formal/ informal dan pekerja formal/informal ini mempunyai definisi yang berbeda.

Dirinci menurut status pekerjaan, sebagian besar laki-laki dan perempuan bekerja dengan status sebagai buruh, masing-masing sebesar 69 persen dan 60 persen. Meski demikian, perempuan mempunyai porsi yang relatif lebih besar pada status pekerja keluarga dan pekerja mandiri. Padahal kedua status ini tergolong sebagai pekerja rentan karena sebagian besar tidak mempunyai jaring pengaman sosial, seperti asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan, dan jaminan pensiun. Tiga status pekerjaan, pekerja mandiri, pekerja keluarga, dan pekerja bebas, sering dikelompokkan menjadi pekerja informal. Pekerja informal ini diyakini muncul sewaktu-waktu saat terjadi goncangan ekonomi sebagai strategi bertahan (*coping strategy*), namun dalam jangka panjang semua orang menginginkan berstatus sebagai pekerja formal.

Berlanjut ke jumlah jam kerja, jam kerja laki-laki relatif lebih lama daripada jam kerja perempuan, sebagaimana terlihat pada tabel 3.8 berikut. Hanya satu pengecualian, jam kerja perempuan yang bersatus sebagai pekerja keluarga lebih lama hampir dua kali lipat dibanding jam kerja laki-laki (masing-masing 40 jam dan 28 jam). Meski memiliki jam kerja lebih lama, berstatus sebagai pekerja keluarga membuat penghasilan perempuan tidak terlalu besar atau hampir tidak ada.

Jam kerja perempuan di sektor informal juga relatif sangat rendah dibanding laki-laki. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kadang bekerja di sektor informal dengan jam kerja sedikit merupakan pilihan perempuan untuk menyeimbangkan perannya sebagai pekerja dan ibu rumahtangga. Sebagaimana dimaklumi, bekerja dan mengurus rumahtangga membutuhkan alokasi waktu tersendiri yang saling menggantikan karena keduanya tidak bisa dilakukan secara bersamaan (*incompatible*).

Tabel 3.8. Rata-rata Jam Kerja dari Seluruh Pekerjaan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Karakteristik | Jenis Kelamin | |
|------------------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) |
| Jam Kerja | | |
| Paruh Waktu | 4,0 | 3,0 |
| Penuh Waktu | 51,0 | 50,0 |
| Lapangan Usaha | | |
| Primer | 46,0 | 44,0 |
| Sekunder | 47,0 | 42,0 |
| Tersier | 50,0 | 45,0 |
| Status Pekerja | | |
| Formal | 48,0 | 44,0 |
| Informal | 21,0 | 9,0 |
| Status Pekerjaan | | |
| Berusaha | 49,0 | 44,0 |
| Buruh | 48,0 | 44,0 |
| Pekerja Bebas | 51,0 | 41,0 |
| Pekerja Keluarga | 28,0 | 40,0 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Dilihat dari lapangan usaha, pekerja sektor jasa mencurahkan waktu relatif lebih banyak daripada sektor primer maupun sektor sekunder. Perlu diketahui, ILO menggolongkan pekerja yang bekerja diatas 50 jam seminggu sebagai pekerja *overtime* (ILO, 2016). Bekerja dengan jam kerja berlebih akan berdampak pada kesehatan pribadi (jasmani dan mental) dan kehidupan sosialnya. Tabel 3.8 memperlihatkan bahwa laki-laki yang bekerja di sektor tersier atau berstatus sebagai pekerja bebas sering mempunyai jam kerja berlebih. Selain itu, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja penuh waktu juga cenderung bekerja *overtime*.

3.3.3. Indikator Ketenagakerjaan tentang Produktifitas

Upah secara ekonomi merupakan balas jasa pengusaha kepada pekerja atas produktifitasnya dalam bekerja. Semakin tinggi tingkat produktifitas seseorang, maka upah yang diterimanya haruslah sama besar. Oleh karena itu, besaran upah dapat digunakan untuk mengukur produktifitas pekerja. Dalam sakernas, upah buruh terdiri atas upah uang dan upah barang. Dalam publikasi ini, upah yang dimaksud adalah penjumlahan keduanya dan hanya untuk pekerja yang berstatus sebagai buruh.

Tabel 3.9. Rata-rata Upah Buruh per Bulan dari Pekerjaan Utama menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Karakteristik | Jenis Kelamin | |
|----------------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) |
| Jam Kerja | | |
| Paruh Waktu | 2.667.827 | 1.517.063 |
| Penuh Waktu | 3.714.465 | 3.066.746 |
| Lapangan Usaha | | |
| Primer | 3.264.366 | - |
| Sekunder | 3.538.077 | 2.877.420 |
| Tersier | 3.884.025 | 2.922.254 |
| Total | 3.681.076 | 2.902.114 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Dari tabel 3.9 di bawah ini terlihat bahwa upah laki-laki per bulan sekitar 3,6 juta rupiah dan upah perempuan per bulan sekitar 2,9 juta rupiah. Diantara

keduanya, terdapat perbedaan upah sebesar 700 ribu atau sebesar 19,44 persen. Namun selisih dalam bentuk persentase ini masih kasar (*raw gender wage gap*) karena belum mempertimbangkan variabel tingkat pendidikan dan ketrampilan. Selanjutnya, dilihat menurut jenis pekerjaan dan lapangan usaha, upah laki-laki per bulan selalu lebih tinggi daripada upah perempuan.

Perbedaan besaran upah tersebut selanjutnya dapat didekomposisi untuk mengetahui sumber perbedaan, apakah berasal dari faktor endowment atau faktor diskriminasi. Dalam ilmu ekonomi, metode yang paling sering digunakan untuk mengetahui perbedaan upah menurut gender adalah metode dekomposisi Oaxaca-Blinder. Untuk mengetahui peranan faktor endowment, dua indikator yang digunakan adalah tingkat pendidikan yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan pengalaman kerja yang dihitung dengan rumus *umur-lama sekolah-usia masuk sekolah*.

Hasil dekomposisi metode Oaxaca-Blinder dengan two step Heckman menunjukkan bahwa selisih upah antara laki-laki dan perempuan sebesar 30,86 persen (lihat lampiran 2). Dari 30,86 persen perbedaan tersebut, yang dapat dijelaskan dengan faktor endowment hanya sebesar 12,44 persen dan sisa 87,56 persen disebabkan oleh faktor diskriminasi. Setidaknya ada dua alasan mengapa perempuan diupah rendah oleh perusahaan, pertama adanya stereotipe gender sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kedua, hak-hak pekerja perempuan, seperti hak cuti haid dan hak melahirkan, dianggap merugikan perusahaan (Priyono, 2015).

3.4. Faktor Agency

Di berbagai wilayah perempuan sering tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan, baik pada tingkat rumahtangga, komunitas, bahkan masyarakat. Pada tingkatan rumahtangga, ketidakmampuan perempuan tersebut sering berakhir pada kekerasan rumahtangga. Beberapa hal yang mempengaruhi kekuatan perempuan untuk menyuarakan aspirasinya adalah pendapatan dan kontrol terhadap aset rumahtangga. Penelitian membuktikan perempuan dari kalangan atas relatif mempunyai agency dibanding perempuan

dari kalangan bawah. Namun, sebenarnya faktor yang paling berpengaruh adalah pendapatan dari perempuan itu sendiri.

Pada tingkatan masyarakat, perempuan sering diasosiasikan dengan ketidakmampuannya untuk memimpin. Hal ini tentunya akan merugikan perempuan karena masyarakat tidak akan mampu menilai dengan jelas kapasitas perempuan. Kondisi ini secara nyata tercermin pada keterwakilan perempuan di parlemen. Kurangnya wakil perempuan di parlemen ini mungkin juga disebabkan oleh kurangnya jejaring yang dimiliki perempuan karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengurus rumah tangga.

Sayangnya, sedikit sekali survei pada tingkat rumah tangga yang berusaha mengukur agency perempuan dalam rumah tangga. Dalam publikasi ini, agency akan diwakili oleh indikator kepemilikan rekening tabungan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Dengan memiliki rekening tabungan atas nama sendiri, maka seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan kontrol dan belanja atas uang yang dimiliki.

Tabel 3.10. Kepemilikan Tabungan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (Persen)

| Karakteristik | Jenis Kelamin | |
|-----------------------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) |
| Tingkat Kesejahteraan | | |
| Bawah | 26,4 | 16,6 |
| Menengah | 43,8 | 36,2 |
| Atas | 67,0 | 61,4 |
| Tingkat Pendidikan | | |
| SD ke bawah | 30,60 | 22,11 |
| SMP+SMA | 48,07 | 38,23 |
| Diploma+ | 90,64 | 82,39 |
| Total | 41,6 | 33,5 |

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

Sebagaimana terlihat pada tabel 3.10 di atas, penduduk dari kalangan atas relatif memiliki rekening tabungan daripada penduduk dari kalangan bawah, baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Demikian pula jika dirinci

menurut tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka ia cenderung memiliki rekening tabungan di bank. Secara umum, persentase laki-laki yang memiliki rekening tabungan lebih besar daripada perempuan.

Publikasi ini bertujuan untuk memberi gambaran pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo. Bab sebelumnya telah membahas tiga faktor dalam rumahtangga yang akan menghasilkan kesetaraan gender di masyarakat, yakni faktor endowment, faktor kesempatan ekonomi, dan faktor agency. Meski demikian, tetap diperlukan suatu indikator tunggal yang akan memudahkan semua pihak untuk menilai perkembangan pembangunan gender. Indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.

4.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender atau *Gender Development Index (GDI)* merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender. Penghitungan IPG sebenarnya hampir sama dengan penghitungan IPM tetapi disesuaikan dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, dimensi yang digunakan dalam pengukuran IPG sama persis dengan dimensi IPM, yakni dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Pembaca yang tertarik dengan metodologi penghitungan IPG lebih detail dapat melihat lampiran 1.

Dimensi kesehatan digambarkan oleh Usia Harapan Hidup, dimensi pengetahuan diwakili oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan dimensi standar hidup layak diukur dari pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Dengan mengamati indikator-indikator pembentuk masing-masing dimensi, terlihat bahwa memang terdapat perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, masing-masing 75,54 tahun dan 71,78 tahun. Pada dimensi pengetahuan, rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dari perempuan, yaitu 10,77 tahun dan 9,70 tahun untuk jenis kelamin yang bersesuaian. Untuk lebih jelasnya,

besaran masing-masing indikator pembentuk IPG dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1. Indikator-indikator Pembentuk IPG dan pertumbuhannya, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2018

| Indikator | 2015 | | 2017 | | 2018 *) | |
|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) |
| Proporsi penduduk (%) | 50,24 | 49,24 | 50,24 | 49,76 | 50,25 | 49,75 |
| Dimensi Umur Panjang dan Sehat | | | | | | |
| Angka Harapan Hidup (e ⁰ /Tahun) | 70,99 | 74,94 | 71,78 (1,11) | 75,54 (0,80) | 71,89 (0,15) | 75,66 (0,16) |
| Dimensi Pengetahuan | | | | | | |
| Harapan Lama Sekolah / EYS (Tahun) | 13,61 | 14,14 | 14,37 (5,58) | 14,28 (0,99) | 14,80 (2,99) | 14,66 (2,66) |
| Rata-Rata Lama Sekolah/ MYS (Tahun) | 10,63 | 9,64 | 10,77 (1,32) | 9,70 (0,62) | 10,78 (0,09) | 9,71 (0,10) |
| Dimensi Kehidupan yang Layak | | | | | | |
| Pengeluaran Perkapita (Juta) | 17,91 | 12,56 | 19,05 (6,37) | 13,23 (5,33) | 19,67 (3,25) | 13,64 (3,09) |
| IPM menurut Gender | 80,93 | 76,30 | 82,85 | 77,32 | 83,66 | 78,08 |
| IPG | 94,28 | | 93,325 | | 93,330 | |

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Keterangan :

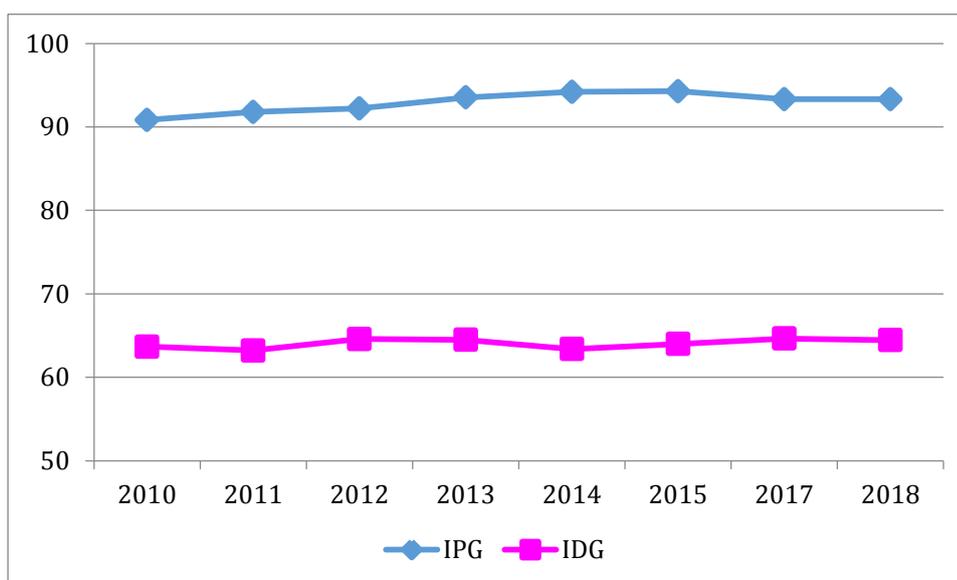
- IPG Tahun 2016 tidak disajikan karena Sakernas tidak dilaksanakan untuk penghitungan angka ketenagakerjaan tingkat kabupaten/kota
- Angka dalam tanda kurung () merupakan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya dalam persen
- *) Angka sementara

Nilai IPG=100 memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan antara laki-laki dengan perempuan sudah setara. Sebaliknya jika angka IPG semakin jauh dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk

menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

IPG Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sebesar 93,33; angka IPG ini lebih tinggi daripada capaian angka IPG Jawa Timur yang sebesar 90,77. IPG Sidoarjo tahun 2018 juga meningkat sangat tipis dibanding tahun 2017 yang sebesar 0,005 poin. Melihat tren perkembangan angka IPG Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik 4.1, angka IPG Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2012 hingga 2018 mengalami fluktuasi dalam kisaran sempit. Untuk diketahui, IPG tahun 2016 tidak bisa disajikan karena survei angkatan kerja nasional (Sakernas) tidak jadi dilaksanakan karena penghematan anggaran oleh pemerintah.

Grafik 4.1. IPD dan IDG Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Secara umum, angka IPG Kabupaten Sidoarjo cenderung naik pada periode 2012-2018. Angka IPG sempat turun pada tahun 2017 sebesar 1,01 persen menjadi 93,33 dibanding tahun 2015 yang sebesar 94,28. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya IPM laki-laki yang relatif lebih tinggi dibanding IPM perempuan. Ada dua komponen yang menyebabkan penurunan IPG Kabupaten Sidoarjo tahun 2017, yakni Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (lihat angka dalam kurung pada tabel 4.1). Rasio pertumbuhan kedua komponen tersebut masing-masing sebesar 5,64 dan 2,13. Artinya,

peningkatan kualitas pembangunan laki-laki di komponen Harapan Lama Sekolah 5,64 kali lebih cepat dibanding perempuan; arti yang sama bahwa Rata-rata Lama Sekolah laki-laki meningkat 2,13 kali lebih cepat dibanding perempuan. Fenomena meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah ini karena pertumbuhan partisipasi sekolah laki-laki di kelompok umur 19-24 lebih besar dibanding perempuan.

Pada tahun 2018 IPG Kabupaten Sidoarjo hampir sama dengan dengan IPG tahun 2017. Sebagaimana terlihat pada tabel 4.1, semua komponen IPM tumbuh sama cepat antara laki-laki dan perempuan. Komponen Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah perempuan meningkat lebih tinggi daripada laki-laki. Sebaliknya, Harapan Lama Sekolah dan Pendapatan perkapita tumbuh lebih cepat pada laki-laki dibanding perempuan. Hal ini yang kemudian menyebabkan IPG Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 tidak begitu berbeda dengan IPG tahun 2017.

4.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement* (GEM) merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusinya dalam aspek ekonomi maupun sosial. Persamaan dalam peran, bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya sekedar dalam persamaan status dan kedudukan, tetapi lebih pada soal pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survei) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan, baik bersifat langsung

maupun tidak langsung, dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasilnya menggambarkan kondisi terkini (*current condition*) peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

Capaian IDG Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sebesar 64,46, kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin jika dibandingkan capaian pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh menurunnya proporsi penduduk perempuan yang berstatus sebagai tenaga kerja profesional sebagaimana terlihat pada tabel 4.1. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa daya tawar perempuan Sidoarjo dalam pengambilan keputusan relatif melemah dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 4.1. Indikator-indikator Pembentuk IDG, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2018

| Indikator | 2015 | | 2017 | | 2018*) | |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) |
| Proporsi penduduk (%) | 50,24 | 49,24 | 50,24 | 49,76 | 50,25 | 49,75 |
| Dimensi Partisipasi Politik | | | | | | |
| Keterwakilan di Parlemen (%) | 76 | 14 | 76 | 14 | 76 | 14 |
| Dimensi Partisipasi Ekonomi & Pengambilan Keputusan | | | | | | |
| Proporsi dari manager, administrasi, profesional dan teknisi (%) | 52,76 | 47,24 | 52,79 | 47,21 | 56,31 | 43,69 |
| Dimensi Penguasaan Sumber Daya Ekonomi | | | | | | |
| Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%) | 71,00 | 29,00 | 70,64 | 29,36 | 70,62 | 29,38 |
| IDG | 63,99 | | 64,65 | | 64,46 | |

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Keterangan :

- IDG Tahun 2016 tidak disajikan karena Sakernas tidak dilaksanakan untuk penghitungan angka ketenagakerjaan tingkat kabupaten/kota

*) Angka sementara

Kesimpulan dan Saran 5

Tujuan penulisan publikasi ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo. Gambaran tersebut menyangkut faktor-faktor kesetaraan gender pada tingkatan rumah tangga, yang meliputi faktor endowment, faktor kesempatan ekonomi, dan faktor agency. Dari analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, berikut disampaikan kesimpulan dan saran yang bisa ditawarkan.

5.1. Kesimpulan

1. Saat ini pembangunan bidang pendidikan telah dapat dinikmati oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi, bahkan perempuan cenderung meraup manfaat lebih besar dengan meningkatnya partisipasi sekolah. Meski demikian, jurusan kuliah yang diambil oleh mahasiswi masih terkonsentrasi ke rumpun ilmu tertentu yang mengindikasikan masih adanya stereotipe gender.
2. Saat ini perempuan juga tengah menikmati hidup yang lebih lama daripada laki-laki. Meski demikian, perempuan juga mempunyai tingkat kesakitan dan tingkat disabilitas yang relatif lebih tinggi daripada laki-laki. Hidup lama namun sakit-sakitan dan menyandang disabilitas tentu bukanlah kondisi yang diharapkan semua orang.
3. Meski perempuan menikmati manfaat pembangunan paling besar, namun partisipasi kerja perempuan masih tetap rendah, bahkan paling rendah se-Jawa Timur. Selain itu, perempuan yang bekerja juga menyandang status sebagai pekerja rentan dan memiliki upah yang relatif lebih rendah dibanding laki-laki.
4. Faktor agency yang diwakili oleh indikator kepemilikan tabungan juga menunjukkan bahwa kemampuan perempuan Sidoarjo untuk membuat keputusan masih kurang menggembirakan
5. Pembangunan manusia perempuan Sidoarjo telah mencapai kategori tinggi, namun kecepatan pertumbuhan masing-masing komponen yang berbeda

antara laki-laki dan perempuan menyebabkan IPG sempat mengalami penurunan dan stagnan pada tahun ini.

6. Upaya pemberdayaan gender tahun ini menghadapi tantangan karena porsi perempuan yang bekerja sebagai manager, profesional, administrasi, dan teknisi mengalami penurunan.

5.2. Saran

1. Pemberian edukasi dan konsultasi tentang kesetaraan gender dan manfaatnya bagi kesejahteraan rumahtangga dan pencapaian tujuan pembangunan lainnya masih perlu dilakukan terus menerus melalui berbagai media dan kepada berbagai pihak. Tanpa kesadaran semua pihak, terutama lembaga pemerintahan, maka pembangunan gender tidak akan mendapat dukungan.
2. Adanya stereotipe gender pada dunia pendidikan perlu ditindaklanjuti dengan pemberian edukasi kepada siswa-siswi bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dan berhak untuk mengambil jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.
3. Perlu dilakukan perumusan strategi dan kebijakan untuk menghadapi meningkatnya jumlah perempuan manula, hidup sendiri, sakit-sakitan, dan menyandang disabilitas. Aksi-aksi yang dilakukan di kabupaten/kota lain perlu direplika dan disesuaikan dengan kondisi setempat.
4. Dunia kerja perlu dibuat seramah mungkin kepada pekerja perempuan, terutama pekerja perempuan yang telah memiliki anak. Karena sebagian besar keluarga di Sidoarjo bertipe keluarga inti, perempuan yang bekerja akan membuat anak tanpa pengasuhan. Oleh karena itu, penyediaan *daycare* yang ramah dan murah perlu mendapat dukungan.
5. Perempuan perlu didorong dan dikondisikan untuk mempunyai suara dalam menentukan kehidupannya sendiri. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan, seperti pendirian koperasi wanita (kopwan), perlu diperluas kepada bidang-bidang lain dengan memperhatikan konteks, budaya, dan norma setempat.

Daftar Pustaka

- Adioetomo, S.M. (2005). *Bonus Demografi : Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Pidato Disampaikan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, Jakarta.
- BPS Kabupaten Sidoarjo (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018*. Sidoarjo : BPS Kabupaten Sidoarjo
- Gary Backer (1957). *The Economics of Discrimination*. Chicago : Chicago University Press
- Goldin, C. (1995). The U-Shaped Female Labor Force Function in Economic Development and Economic History, *NBER Working Paper Series, no: 4707*
- Handayani, Dwini dan Pardede, Elda (2017). Gender : Disparitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi. Dalam Adioetomo dan Pardede Eds (2017). *Memetik Bonus Demografi : Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok : Rajawali Pers
- International Labour Office (2016). *Key Indicators of Labour Market, 9th edition*. Geneva : ILO
- Jann, Ben (2008). The Blinder-Oaxaca decomposition for linear regression models. *The Stata Journal* 8(4) : 453-479
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik (2018). *Pembangunan Manusia berbasis Gender Tahun 2018*. Jakarta : KemenPPPA dan BPS
- Max Roser (2019). *Life Expectancy*. Dipublikasikan online di OurWorldInData.org. Diakses dari : '<https://ourworldindata.org/life-expectancy>' pada tanggal 24 Juni 2019
- Oksuzyan, A., Guma, J., dan Doblhammer, G. (2018). Sex differences in Health and Survival. Dalam Guma, J. dan Doblhammer, G., Eds (2018). *A Demographic perspective on Gender, Family, and Health in Europe*. Cham, Switzerland : Springer Open
- Posadas, J., Paci, P., Sajala, Z., dan Lhoksin, M (2017). *Measuring Gender Inequality : Streamlined Analysis with AdePT Software*. Washington DC : The World Bank
- Priyono, Edy (2015). *Memahami Pasar Tenaga Kerja : Bacaan Ekonomi untuk non Ekonom, cetakan 1*. Jakarta : Pustaka Lentera
- Risman, B.J., Froyum, C.M., dan Scarborough, W.J., Eds (2018). *Handbook of the Sociology of gender, Second Edition*. Cham, Switzerland : Springer International publishing, AG
- Risman, Barbara J. (2018). Gender as a Social Structure. Dalam Risman, B.J., Froyum, C.M., dan Scarborough, W.J., Eds (2018). *Handbook of the Sociology of gender, Second Edition*. Cham, Switzerland : Springer International publishing, AG

- Verbrugge, L. M. dan Jette, A. M (1994). The Disablement Process. *Social Science and Medicine*, 38(1), 1-14
- West, C. dan Zimmerman, D. H. (1987). Doing Gender. *Gender and Society*, 1, 125-151
- World Development Report (2012). *Gender Equality and Development*. Washington DC : The World Bank

Lampiran 1

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Umur Harapan Hidup saat Lahir

Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan lama tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussell dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya.

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks adalah 85 tahun dan terendah sebagai batas bawah adalah 20 tahun.

Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan yang menjadi salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan:

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j

p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : jumlah komoditas

Penyusunan Indeks

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok (Tabel 1). Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel 2. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Tabel 1 : Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

| | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Beras | Pisang lainnya | Rokok kretek tanpa filter |
| Tepung terigu | Pepaya | Rokok putih |
| Ketela | Minyak kelapa | Rumah sendiri/bebas sewa |
| Kentang | Minyak goreng lainnya | Rumah kontrak |
| Tongkol/tuna/cakal | Kelapa | Rumah sewa |
| Kembung | Gula pasir | Rumah dinas |
| Bandeng | Teh | Listrik |
| Mujair | Kopi | Air PAM |
| Mas | Garam | LPG |
| Lele | Kecap | Minyak tanah |
| Ikan segar lainnya | Penyedap | Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat |
| Daging sapi | Mie instan | Perlengkapan mandi |
| Daging ayam ras | Roti manis/roti lainnya | Barang kecantikan |
| Daging ayam | Kue kering | Perawatan kulit,muka,kuku,rambut |
| Telur ayam ras | Kue basah | Sabun cuci |
| Susu kental manis | Makanan gorengan | Biaya RS Pemerintah |
| Susu bubuk | Gado-gado/ketoprak | Biaya RS Swasta |
| Susu bubuk bayi | Nasi campur/rames | Puskesmas/pustu |
| Bayam | Nasi goreng | Praktek dokter/poliklinik |
| Kangkung | Nasi putih | SPP |
| Kacang panjang | Lontong/ketupat sayur | Bensin |
| Bawang merah | Soto/gule/sop/rawon/c | Transportasi/pengangkutan umum |
| Bawang putih | Sate/tongseng | Pos dan Telekomunikasi |
| Cabe merah | Mie bakso/mie | Pakaian jadi laki-laki dewasa |
| Cabe rawit | Makanan ringan anak | Pakaian jadi perempuan dewasa |
| Tahu | Ikan (goreng/bakar | Pakaian jadi anak-anak |
| Tempe | Ayam/daging (goreng | Alas kaki |
| Jeruk | Makanan jadi lainnya | Minyak Pelumas |
| Mangga | Air kemasan galon | Meubelair |
| Salak | Minuman jadi lainnya | Peralatan Rumah Tangga |
| Pisang ambon | Es lainnya | Perlengkapan perabot rumah |
| Pisang raja | Roko kretek filter | Alat-alat Dapur/Makan |

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2 : Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

| Komponen IPM | Satuan | Minimum | Maksimum |
|------------------------------|--------|-----------|------------|
| Angka Harapan Hidup saat | Tahun | 20 | 85 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 0 | 18 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 0 | 15 |
| Pengeluaran per Kapita | Rupiah | 1.007.436 | 26.572.352 |

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara -Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

- Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
- Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
- Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
- Kelompok “rendah” : $IPM < 60$

Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antar gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.

Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

Bagaimana Metode Baru?

IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu:

- 1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- 2) pengetahuan (*knowledge*); dan
- 3) standar hidup layak (*decent standard of living*).

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Pada tahun 2014, UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data SUSENAS. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari SUSENAS.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur output dari dimensi pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup baik indikator input maupun indikator output.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.

Penyusunan Indeks Komposit

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung

sama seperti pada metode lama. Perbedaannya hanya pada batasan untuk masing- masing komponen. Berikut adalah nilai minimum dan maksimum untuk masing- masing komponen.

Tabel 3 : Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG

| Indikator | Minimum | | Maksimum | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| Umur Harapan Hidup (tahun) | 17,55 | 22,5 | 82,5 | 87,5 |
| Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan | 1.007.436 | | 26.572.352 | |

Dalam penyusunan indeks IPM laki-laki dan Perempuan, digunakan rumus yang berlaku untuk masing-masing jenis kelamin, yaitu sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki-laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut.

$$IPM_P = \sqrt[3]{I_{kesehatan_p} \times I_{pendidikan_p} \times I_{pengeluaran_p}}$$

$$IPM_L = \sqrt[3]{I_{kesehatan_L} \times I_{pendidikan_L} \times I_{pengeluaran_L}}$$

Penggunaan rata-rata geometrik ini sangat beralasan, yaitu rata-rata geometrik cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata

aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antardimensi.

Pada metode baru, penghitungan angka IPG tidak lagi dengan membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut.

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} \times 100$$

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

Perubahan Interpretasi

Akibat perubahan metodologi yang terjadi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik,

partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata (*Equally Distributed Equivalent Percentage*). Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Untuk penghitungan masing-masing indeks dapat dilakukan sebagai berikut.

Penyusunan Indeks

4. Indeks keterwakilan di parlemen (I_{par})

$$EDEP_{(par)} = \left(\frac{P_f}{X_f} + \frac{P_m}{X_m} \right)^{-1} \times 100$$

dan

$$I_{(par)} = \frac{\{EDEP_{(par)}\}}{50}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

X_f = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen

X_m = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

5. Indeks Pengambilan Keputusan (I_{DM})

$$EDEP_{(DM)} = \left(\frac{P_f}{Y_f} + \frac{P_m}{Y_m} \right)^{-1} \times 100$$

dan

$$I_{(DM)} = \frac{\{EDEP_{(DM)}\}}{50}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

Y_f = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

Y_m = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

6. Indeks distribusi pendapatan ($I_{inc-dis}$)

Penghitungan indeks distribusi pendapatan menggunakan formula yang sama dengan penghitungan IPM metode lama. Untuk menghitung indeks ini digunakan batas maksimum dan minimum dari pengeluaran perkapita. Batas maksimum dan minimum pengeluaran perkapita pada metode lama adalah sebagai berikut:

| Komponen | Satuan | Minimum | Maksimum |
|------------------------|--------|--|----------|
| Pengeluaran per kapita | Rupiah | a. 300.000 (1996) b. 360.000 (1999 dst) | 732.720 |

$$\text{Rasio Upah}_i = \frac{\text{Upah buruh nonpertanian}_i}{\text{Upah buruh nonpertanian}_m}$$

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Upah}_i &= (\text{Rasio upah}_m \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_m) \\ &+ (\text{Rasio upah}_f \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_f) \end{aligned}$$

$$\text{Rasio Terhadap Rata - rata Upah}_i = \frac{\text{Rasio Upah}_i}{\text{Rata - rata Upah}_m}$$

Sumbangan Pendapatan_i

$$= \text{Proporsi Angkatan Kerja}_i \times \text{Rasio terhadap Rata - rata Upah}_i$$

$$\text{Proporsi Sumbangan Pendapatan}_i = \frac{\text{Sumbangan Pendapatan}_i}{\text{Proporsi Penduduk}_m}$$

dimana

i = Laki-laki (m) atau perempuan (f)

Kemudian menghitung EDEP dengan rumus sebagai berikut.

$$EDEP_{(inc-dis)} = \left(\frac{P_f}{Z_f} + \frac{P_m}{Z_m} \right)^{-1} \times 100$$

dan

$$I_{(inc-dis)} = \frac{(EDEP_{(inc-dis)} \times \text{Pengeluaran per Kapita (yang disesuaikan)}) - 360}{732,72 - 300}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

Z_f = proporsi sumbangan pendapatan perempuan

Z_m = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

7. Indeks pemberdayaan gender

$$IDG = \frac{(I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-dis)})}{3}$$

Lampiran 2

```
. probit lfp i.manu i.service i.fullhour if b4_k6==2

Iteration 0:  log likelihood = -630.44189
Iteration 1:  log likelihood = -157.71459
Iteration 2:  log likelihood = -142.28985
Iteration 3:  log likelihood = -142.02924
Iteration 4:  log likelihood = -142.029
Iteration 5:  log likelihood = -142.029

Probit regression                               Number of obs   =       911
                                                LR chi2(3)      =       976.83
                                                Prob > chi2     =       0.0000
Log likelihood = -142.029                      Pseudo R2       =       0.7747

-----+-----
      lfp |      Coef.  Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-----+-----
      1.manu |    2.857034   .3406239     8.39   0.000     2.189424   3.524645
      1.service |    3.284302   .2969142    11.06   0.000     2.702361   3.866243
      1.fullhour |    1.434451   .3499645     4.10   0.000     .7485331   2.120369
      _cons |   -1.518003   .0867262    -17.50   0.000    -1.687984  -1.348023
-----+-----

. drop xb

. drop mills

. probit lfp i.manu i.service i.fullhour if b4_k6==2

Iteration 0:  log likelihood = -630.44189
Iteration 1:  log likelihood = -157.71459
Iteration 2:  log likelihood = -142.28985
Iteration 3:  log likelihood = -142.02924
Iteration 4:  log likelihood = -142.029
Iteration 5:  log likelihood = -142.029

Probit regression                               Number of obs   =       911
                                                LR chi2(3)      =       976.83
                                                Prob > chi2     =       0.0000
Log likelihood = -142.029                      Pseudo R2       =       0.7747

-----+-----
      lfp |      Coef.  Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-----+-----
      1.manu |    2.857034   .3406239     8.39   0.000     2.189424   3.524645
      1.service |    3.284302   .2969142    11.06   0.000     2.702361   3.866243
      1.fullhour |    1.434451   .3499645     4.10   0.000     .7485331   2.120369
      _cons |   -1.518003   .0867262    -17.50   0.000    -1.687984  -1.348023
-----+-----

. predict xb if e(sample), xb
(903 missing values generated)

. generate mills=normalden(-xb)/(1-normal(-xb))
(903 missing values generated)

. replace mills=0 if b4_k6==1
(903 real changes made)

. oaxaca LNWage MYS exprienc mills, by(b4_k6) adjust(mills) noisily relax

Model for group 1
```

| Source | SS | df | MS | Number of obs = | 420 |
|----------|------------|-----|------------|-----------------|--------|
| Model | 28.5966927 | 2 | 14.2983463 | F(2, 417) = | 59.54 |
| Residual | 100.149606 | 417 | .24016692 | Prob > F = | 0.0000 |
| | | | | R-squared = | 0.2221 |
| | | | | Adj R-squared = | 0.2184 |
| Total | 128.746298 | 419 | .307270402 | Root MSE = | .49007 |

| LNWage | Coef. | Std. Err. | t | P> t | [95% Conf. Interval] | |
|----------|----------|-----------|-------|-------|----------------------|----------|
| MYS | .0922086 | .0085673 | 10.76 | 0.000 | .0753682 | .109049 |
| exprienc | .0088404 | .0018802 | 4.70 | 0.000 | .0051447 | .0125362 |
| mills | 0 | (omitted) | | | | |
| _cons | 9.886116 | .1211891 | 81.58 | 0.000 | 9.647898 | 10.12433 |

(model 1 has zero variance coefficients)

Model for group 2

| Source | SS | df | MS | Number of obs = | 232 |
|----------|------------|-----|------------|-----------------|--------|
| Model | 47.9229094 | 3 | 15.9743031 | F(3, 228) = | 37.57 |
| Residual | 96.9456734 | 228 | .425200322 | Prob > F = | 0.0000 |
| | | | | R-squared = | 0.3308 |
| | | | | Adj R-squared = | 0.3220 |
| Total | 144.868583 | 231 | .627136722 | Root MSE = | .65207 |

| LNWage | Coef. | Std. Err. | t | P> t | [95% Conf. Interval] | |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|----------|
| MYS | .1359543 | .0138396 | 9.82 | 0.000 | .1086844 | .1632242 |
| exprienc | .0077322 | .0036744 | 2.10 | 0.036 | .0004921 | .0149723 |
| mills | -1.256531 | 1.112924 | -1.13 | 0.260 | -3.449462 | .9363999 |
| _cons | 9.099465 | .2123046 | 42.86 | 0.000 | 8.681135 | 9.517794 |

Blinder-Oaxaca decomposition

| | | |
|--------------------|-----------------|--------|
| Group 1: b4_k6 = 1 | Number of obs = | 652 |
| Group 2: b4_k6 = 2 | Model = | linear |
| | N of obs 1 = | 420 |
| | N of obs 2 = | 232 |

| LNWage | Coef. | Std. Err. | z | P> z | [95% Conf. Interval] | |
|--------------|----------|-----------|--------|-------|----------------------|-----------|
| overall | | | | | | |
| group_1 | 11.16868 | .0270984 | 412.15 | 0.000 | 11.11557 | 11.2218 |
| group_2 | 10.82201 | .0522205 | 207.24 | 0.000 | 10.71966 | 10.92436 |
| difference | .3466715 | .0588328 | 5.89 | 0.000 | .2313613 | .4619818 |
| adjusted | | | | | | |
| group_1 | 11.16868 | .0270984 | 412.15 | 0.000 | 11.11557 | 11.2218 |
| group_2 | 10.84534 | .0558137 | 194.31 | 0.000 | 10.73595 | 10.95474 |
| difference | .3233401 | .0620443 | 5.21 | 0.000 | .2017355 | .4449448 |
| endowments | .0382501 | .0350595 | 1.09 | 0.275 | -.0304653 | .1069655 |
| coefficients | .294319 | .0543835 | 5.41 | 0.000 | .1877293 | .4009087 |
| interaction | -.009229 | .0140516 | -0.66 | 0.511 | -.0367695 | .0183116 |
| endowments | | | | | | |
| MYS | .0316306 | .0375602 | 0.84 | 0.400 | -.0419861 | .1052473 |
| exprienc | .0066195 | .0090761 | 0.73 | 0.466 | -.0111693 | .0244084 |
| coefficients | | | | | | |
| MYS | -.51373 | .191425 | -2.68 | 0.007 | -.888916 | -.1385439 |
| exprienc | .0213976 | .0797002 | 0.27 | 0.788 | -.1348119 | .1776071 |
| _cons | .7866514 | .2444587 | 3.22 | 0.001 | .3075212 | 1.265782 |

```

interaction_ |
  MYS | -.0101777 .0126226 -0.81 0.420 -.0349176 .0145622
  exprienc | .0009487 .0037383 0.25 0.800 -.0063781 .0082756

```

(adjusted by mills)

. oaxaca, eform

```

Blinder-Oaxaca decomposition          Number of obs =      652
                                         Model          =      linear
Group 1: b4_k6 = 1                    N of obs 1     =      420
Group 2: b4_k6 = 2                    N of obs 2     =      232

```

| | LNWage | exp(b) | Std. Err. | z | P> z | [95% Conf. Interval] | |
|--------------|--------|----------|-----------|--------|-------|----------------------|----------|
| ----- | | | | | | | |
| overall | | | | | | | |
| group_1 | | 70875.8 | 1920.624 | 412.15 | 0.000 | 67209.67 | 74741.92 |
| group_2 | | 50111.85 | 2616.865 | 207.24 | 0.000 | 45236.64 | 55512.48 |
| difference | | 1.414352 | .0832104 | 5.89 | 0.000 | 1.260314 | 1.587216 |
| ----- | | | | | | | |
| adjusted | | | | | | | |
| group_1 | | 70875.8 | 1920.624 | 412.15 | 0.000 | 67209.67 | 74741.92 |
| group_2 | | 51294.78 | 2862.953 | 194.31 | 0.000 | 45979.52 | 57224.48 |
| difference | | 1.381735 | .0857288 | 5.21 | 0.000 | 1.223524 | 1.560404 |
| endowments | | 1.038991 | .0364265 | 1.09 | 0.275 | .9699941 | 1.112896 |
| coefficients | | 1.342212 | .0729942 | 5.41 | 0.000 | 1.206507 | 1.493181 |
| interaction | | .9908135 | .0139225 | -0.66 | 0.511 | .9638983 | 1.01848 |
| ----- | | | | | | | |
| endowments | | | | | | | |
| MYS | | 1.032136 | .0387673 | 0.84 | 0.400 | .9588831 | 1.110985 |
| exprienc | | 1.006641 | .0091364 | 0.73 | 0.466 | .9888928 | 1.024709 |
| ----- | | | | | | | |
| coefficients | | | | | | | |
| MYS | | .5982599 | .1145219 | -2.68 | 0.007 | .4111011 | .870625 |
| exprienc | | 1.021628 | .0814239 | 0.27 | 0.788 | .8738803 | 1.194356 |
| __cons | | 2.19603 | .5368387 | 3.22 | 0.001 | 1.36005 | 3.545863 |
| ----- | | | | | | | |
| interaction | | | | | | | |
| MYS | | .9898739 | .0124948 | -0.81 | 0.420 | .965685 | 1.014669 |
| exprienc | | 1.000949 | .0037418 | 0.25 | 0.800 | .9936422 | 1.00831 |

(adjusted by mills)

.

Kata Pengantar

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa memandang atribut gender. Dengan demikian, setiap individu berhak untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya dan berhak pula untuk memilih jalan hidupnya sendiri tanpa takut mengalami diskriminasi gender. Karena tujuan mulia tersebut, maka diperlukan suatu analisis untuk memastikan kalau pembangunan yang tengah dilaksanakan tidak menguntungkan gender tertentu.

Kehadiran publikasi “Analisa Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019” Ini berusaha untuk menjawab kebutuhan akan analisis dimaksud. Publikasi ini menggunakan framework (kerangka pikir) kesetaraan gender dari Bank Dunia tahun 2012 agar hasil analisis bisa lebih bermakna, dapat diterima secara teoretis, dan bisa digeneralisir. Menurut Bank Dunia, rumahtangga memegang peranan penting dalam pembangunan gender karena rumahtangga menyediakan pilihan-pilihan (*choices*), insentif (*incentives*), bahkan hambatan-hambatan (*constraints*) kepada individu. Harapannya, publikasi ini dapat menambah wawasan dan bahan diskusi mengenai pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk selama penulisan publikasi ini. Tidak ada karya yang sempurna dan luput dari kesalahan, oleh karena itu saran dan kritik membangun bagi perbaikan publikasi ini di masa depan akan diterima dengan senang hati.

Sidoarjo, April 2019

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Tabel | vi |
| Daftar Grafik | vii |
| Daftar Gambar | viii |
| Bab 1 Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tujuan | 2 |
| 1.3. Ruang Lingkup | 3 |
| 1.4. Sistematika Publikasi | 3 |
| Bab 2 Metodologi | 5 |
| 2.1. Konsep Definisi | 5 |
| 2.2. Asal Mula Ketimpangan Gender | 6 |
| 2.3. Framework Kesetaraan Gender dari Bank Dunia | 9 |
| Bab 3 Analisis Gender | 13 |
| 3.1. Karakteristik Demografi | 13 |
| 3.2. Faktor Endowment..... | 16 |
| 3.2.1. Pendidikan | 17 |
| 3.2.2. Kesehatan | 20 |
| 3.3. Faktor Kesempatan Ekonomi | 24 |
| 3.3.1. Indikator Ketenagakerjaan Ekstensif | 24 |
| 3.3.2. Indikator Ketenagakerjaan Margin Intensif | 31 |
| 3.3.3. Indikator Ketenagakerjaan tentang Produktifitas | 35 |
| 3.4. Faktor Agency | 36 |

| | |
|---|-----------|
| Bab 4 IPG dan IDG | 39 |
| 4.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 39 |
| 4.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 42 |
| Bab 5 Kesimpulan dan Saran | 44 |
| 5.1. Kesimpulan | 44 |
| 5.2. Saran | 45 |
| Daftar Pustaka..... | 46 |
| Lampiran | 48 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Rasio Ketergantungan menurut Kelompok Kesejahteraan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 15 |
| Tabel 3.2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin KRT dan Tingkat Kesejahteraan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (Persen) | 16 |
| Tabel 3.3. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 18 |
| Tabel 3.4. Rasio Laki-laki dan Perempuan menurut Rumpun Ilmu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 19 |
| Tabel 3.5. Indikator Ketenagakerjaan menurut Karakteristik Individu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 25 |
| Tabel 3.6. Kegiatan Seminggu Yang Lalu Istri, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 26 |
| Tabel 3.7. Karakteristik Pekerjaan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018..... | 32 |
| Tabel 3.8. Rata-rata Jam Kerja dari Seluruh Pekerjaan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 34 |
| Tabel 3.9. Rata-rata Upah Buruh per Bulan dari Pekerjaan Utama menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 35 |
| Tabel 3.10 Kepemilikan Tabungan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (Persen) | 37 |

Daftar Grafik

| | |
|--|----|
| Grafik 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 14 |
| Grafik 3.2. Angka Kesakitan (kiri) dan Angka Disabilitas (Kanan) <i>mean smoothed</i> menurut Kelompok Umur, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 22 |
| Grafik 3.3. Peluang Kematian menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 23 |
| Grafik 3.4. TPAK laki-laki menurut Tahun, Kabupaten Sidoarjo | 28 |
| Grafik 3.5. TPAK perempuan menurut Tahun, Kabupaten Sidoarjo | 28 |
| Grafik 3.6. Hubungan TPAK perempuan dan PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018..... | 30 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1. Framework Kesetaraan Gender dari Bank Dunia | 10 |
|---|----|

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan manusia sebagaimana termaktub dalam laporan pembangunan manusia (*Human Development Report*) tahun 1990 adalah memperbanyak pilihan-pilihan manusia sehingga setiap individu memiliki kebebasan untuk menjadi apa saja dan mencapai apa saja dalam hidup agar bermakna secara sosial. Kebebasan ini kemudian diterjemahkan dalam tiga dimensi pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM) yakni hidup lama dan sehat, berpengetahuan, dan standar hidup layak. Diyakini, kalau seseorang mempunyai tubuh yang sehat, berpendidikan tinggi, dan standar hidup layak, maka hal-hal tersebut selanjutnya akan menjadi kapasitas pribadinya untuk mencapai kebebasan.

Tentu saja manfaat pembangunan manusia tersebut harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh manusia tanpa memandang atribut, apakah ia laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, hidup di kota atau di desa; semua harus merasakan manfaat dari upaya pembangunan manusia yang sedang dilakukan. Meski demikian, banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa individu dengan atribut tertentu menikmati manfaat pembangunan lebih besar dibanding atribut yang lain, salah satunya ketimpangan menurut jenis kelamin (gender). Kenyataan bahwa gender tertentu tidak bisa mencapai potensi maksimalnya untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan tentu menimbulkan keprihatinan semua pihak.

Sebagai contoh, pada zaman dulu perempuan sering mendapatkan diskriminasi dalam memperoleh pendidikan sebagaimana dituangkan dengan jelas oleh Kartini dalam kumpulan surat-suratnya “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Namun sekarang partisipasi sekolah perempuan di berbagai belahan dunia terus meningkat, bahkan melebihi partisipasi laki-laki. Dengan menggunakan data hasil Sensus Penduduk, Adioetomo (2005) mengkonfirmasi hal ini dengan menunjukkan bahwa jurang (*gap*) capaian pendidikan menurut jenis kelamin memang semakin menyempit.

Dalam bidang kesehatan, angka harapan hidup perempuan saat ini lebih tinggi daripada laki-laki, padahal sejarah menunjukkan bahwa angka harapan hidup laki-laki pernah melampaui angka harapan hidup perempuan (Max Roser, 2019). *Our world in data* menunjukkan bahwa rendahnya angka harapan hidup perempuan zaman dulu disebabkan oleh banyaknya perempuan yang meninggal saat melahirkan atau mengandung. Seiring perkembangan teknologi dan industrialisasi, perempuan sekarang menjadi lebih sehat saat bersalin dan mengandung, sementara laki-laki mulai melakukan kebiasaan buruk seperti merokok dan minum-minuman keras yang justru merusak kesehatannya. Akibatnya, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada angka harapan hidup laki-laki.

Ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan tentu menimbulkan berbagai dampak tertentu di masyarakat. Sosiolog membuktikan bahwa ketimpangan gender akan menyebabkan perbedaan peluang dalam mendapatkan kekuatan, hak milik, dan kewibawaan (*power, property, and prestige*) (Risman, Froyum, dan Scarborough, 2018). Sementara itu, Bank Dunia meyakini bahwa ketimpangan gender akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (*World development Report* tahun 2012). Dengan kata lain, *if development is not engendered, it is endangered*; jika pembangunan mengabaikan aspek gender, maka aktifitas pembangunan sangat berbahaya karena pembangunan akan salah mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada segolongan orang saja.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah memberi gambaran mengenai kondisi pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo. Kondisi pembangunan gender perlu dipantau karena kesetaraan gender mempunyai dua nilai/manfaat, yakni intrinsik dan instrumental. Bernilai intrinsik karena hidup yang sesuai pilihan pribadi dan terhindar dari kekurangan kebutuhan dasar tanpa melihat gender adalah hak asasi setiap manusia; kedua bernilai instrumental, artinya kesetaraan gender berkontribusi terhadap efisiensi ekonomi dan pencapaian output pembangunan lainnya.

1.3. Ruang Lingkup

Analisis pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo dalam publikasi ini akan menerapkan kerangka pikir (*framework*) yang disusun oleh Bank Dunia *Household-Centered Framework to Gender Analysis* (2012). Kerangka pikir ini secara garis besar menyatakan bahwa kesetaraan gender akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomis suatu wilayah. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan kebijakan tertentu akan mendorong kesetaraan gender. Lebih lanjut, Bank Dunia menggambarkan bahwa kesetaraan gender bersumber dari interaksi di tingkat rumahtangga, institusi formal-informal yang ada, dan kondisi pasar (*market*). Publikasi ini hanya akan membahas disparitas gender pada tingkat rumahtangga saja, yang meliputi aspek *endowments* (modal manusia), kesempatan ekonomi, dan *agency*.

Sumber data yang akan digunakan dalam analisis bersumber dari survei sosial ekonomi nasional (susenas), survei angkatan kerja nasional (sakernas), dan data/publikasi sekunder lainnya. Sebagian analisis juga akan menggunakan software AdePT modul gender yang dibuat oleh Bank Dunia. Metode dekomposisi upah menurut gender diolah menggunakan software Stata SE13.

1.4. Sistematika Publikasi

Publikasi ini tentang analisis gender di Kabupaten Sidoarjo ini akan terbagi menjadi lima bab, yakni :

Bab I Latar belakang yang berisi tentang pendahuluan, tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup analisis, dan sistematika publikasi

Bab II Metodologi yang akan membahas tentang konsep dan definisi dari beberapa istilah yang dipakai dalam publikasi ini dan kerangka pikir (*framework*) yang digunakan untuk analisis

Bab III Analisis Pembangunan gender pada tingkat rumahtangga dengan menggunakan *framework* yang dibangun oleh Bank Dunia. Analisis akan membahas faktor *endowment* (pendidikan dan kesehatan), faktor kesempatan ekonomi (indikator ketenagakerjaan), dan faktor *agency*.

Bab IV Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sidoarjo yang akan membahas series kedua indeks tersebut dari tahun ke tahun

Bab V Kesimpulan dan Saran yang akan menggarisbawahi temuan dan posisi pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo

2.1. Konsep dan Definisi

Berikut ini adalah beberapa istilah yang sering digunakan dalam analisis gender sebagaimana dikutip dari laman internet Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia :

Sex adalah perbedaan-perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Contoh: perempuan dapat melahirkan, laki-laki memproduksi sperma.

Gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Peran gender bersifat dinamis dan berubah antar waktu.

Kesetaraan Gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat, dan akses terhadap pelayanan.

Analisa Gender adalah metodologi untuk pengumpulan dan pengolahan informasi tentang gender. Analisa gender membutuhkan data terpilih berdasarkan jenis kelamin dan suatu pengertian dari konstruksi sosial dari peran gender, bagaimana pembagian kerja, dan dinilai. Analisa gender adalah proses dari analisa informasi supaya menjamin manfaat dan sumberdaya pembangunan secara efektif dan adil ditujukan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Analisa Gender digunakan juga untuk mengantisipasi dan menolak akibat negatif dari pembangunan yang mungkin terjadi pada perempuan atau karena relasi gender. Analisa gender dilakukan menggunakan bermacam alat dan kerangka kerja.

Sementara itu, merangkum definisi gender yang digunakan oleh WHO dan UNDP, pengertian gender mengacu pada karakteristik yang dikonstruksikan secara sosial dan psikologis, didefinisikan, atau ditautkan terhadap perempuan dan laki-laki seperti norma-norma, peran, relasi, hak-hak, dan kewajiban, serta

identitas yang dapat berbeda dan berubah antar masyarakat, antar lokasi, dan antar waktu. (Handayani dan Pardede, 2017, p.341).

Oleh karena itu, Handayani dan Pardede (2017) mengingatkan bahwa menganalisis data menurut jenis kelamin tidak sama dengan ulasan mengenai disparitas gender, karena yang dimaksud dengan analisis gender adalah mengulas mengapa disparitas ini terjadi. Lebih lanjut, mereka mengingatkan bahwa istilah gender bukanlah mengacu atau menggantikan istilah perempuan, tapi menggambarkan laki-laki dan perempuan.

2.2. Asal Mula Ketimpangan Gender

Kata kesetaraan dalam gender sebenarnya berasal dari terjemahan dua kata yang berbeda, yakni *equality* dan *equity*. *Equality* terkait dengan pernyataan bahwa manusia itu diciptakan setara (*equal*) tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Dalam bahasa sederhana, ketika laki-laki mendapat satu bagian, maka perempuan juga mendapat satu bagian, atau tidak berbeda. Sementara itu, *equity* merujuk pada perlakuan yang adil dan setara berdasarkan kebutuhan. Sebagai contoh, angka kematian ibu yang sering dipakai sebagai indikator kesetaraan gender, memang tidak menggambarkan kondisi laki-laki namun merujuk pada perlakuan yang adil bagi perempuan sesuai kebutuhannya.

Secara umum penyebab disparitas gender dapat dikelompokkan dalam dua golongan besar, yakni penyebab alamiah (*nature*) dan penyebab yang dibentuk atau dikonstruksi (*nurture*). Bahasan mengenai penyebab disparitas gender ini juga dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu, yakni biologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya.

Dari sudut pandang biologi, laki-laki dan perempuan memang diciptakan berbeda karena secara kodrati laki-laki dan perempuan memiliki bentuk kelamin yang berbeda. Dalam perkembangan ilmu biologi, maskulinitas laki-laki dan feminitas perempuan ditentukan oleh kehadiran dua kromosom yang berbeda yakni kromosom XY untuk laki-laki dan XX untuk perempuan. Namun, penjelasan ini kemudian banyak diperdebatkan karena tiap individu sebenarnya memiliki dua kromosom ini dengan kadar yang berbeda. Dua kromosom ini terhubung dengan kerja otak yang akan menentukan bentuk tubuh dan tingkah laku

seseorang. Sayangnya, hingga saat ini para ahli biologi belum mengetahui secara pasti kadar kromosom ini dalam tubuh dan mekanisme hubungannya dengan otak sehingga seseorang bisa digolongkan maskulin atau feminin.

Psikolog membedakan gender dari sifat-sifat personalitas yang dimiliki oleh individu. Seseorang dikatakan maskulin kalau dalam dirinya terdapat sifat cerdas, berpikir strategis, dan logis. Kalau dalam diri seseorang melekat sifat penyayang, empati, dan hangat, maka ia akan dikatakan sebagai feminin. Dalam perkembangannya, disadari bahwa sifat personal bukanlah seperti dua kutub yang saling berjauhan yang dapat dibedakan secara pasti, namun sifat-sifat personal ini bisa terdapat dalam diri seseorang sekaligus dalam kadar yang berbeda (*co-vary*).

Sosiolog menyatakan bahwa gender dibentuk dari perbedaan simbol, tingkah laku, interaksi, konteks, dan pengalaman hidup sehari-hari. Interaksi memegang peranan penting dalam ilmu sosiologi karena dari interaksi akan terbentuk peran gender (*gender roles*) yang diharapkan oleh lingkungan. Konsep peran gender (*roles*), yang mengacu pada kesamaan tingkah laku individu yang diharapkan oleh masyarakat lintas tempat, waktu, atau grup, banyak dikritik karena peran gender mengabaikan unsur kekuatan (*power*) dan keunggulan (*privilege*). Perempuan memang diharapkan berperan sebagai ibu dalam rumah tangga, namun konsep peran gender tidak menaruh perhatian pada kuasa perempuan dalam rumah tangga dan kelebihan/keunggulan sebagai ibu.

Dalam karyanya yang terkenal, West dan Zimmerman (1987) kemudian memperkenalkan konsep *doing gender*. Menurut mereka, tingkat maskulinitas dan feminitas diukur dari apa yang individu lakukan. Laki-laki yang memasak dan membantu merawat buah hati bisa dikategorikan sebagai feminin, sebaliknya perempuan yang bekerja bisa digolongkan sebagai maskulin. Dalam bahasa populernya, *to claim a sex category, we do gender*. Para sosiolog mengakui bahwa bukan atribut gender saja yang menyebabkan disparitas kesempatan antar individu, namun atribut-atribut lain turut memperparahnya (*intersectional theory*), misalnya kemiskinan, minoritas, dan lainnya. Dalam perkembangannya, sosiolog menggolongkan kategori sex bukan hanya laki-laki

dan perempuan saja, namun juga seseorang dengan kondisi antara laki-laki dan perempuan dengan kehadiran *queer theory*.

Dalam ilmu ekonomi, disparitas gender antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan oleh model modal manusia dan model segmentasi pasar kerja. Fokus dari model modal manusia adalah isu ketenagakerjaan, dimana perbedaan penghasilan laki-laki dan perempuan disebabkan oleh kepemilikan modal manusia yang berbeda, misalnya pendidikan. Sementara itu menurut model segmentasi pasar kerja, pasar kerja laki-laki dan perempuan memang berbeda, dimana laki-laki cenderung bekerja di sektor utama (*primary*) dengan jabatan yang lebih tinggi, sementara perempuan bekerja di sektor kedua (*secondary*) dengan jabatan dan upah yang lebih rendah.

Sumber-sumber disparitas menurut ekonom juga dapat diterangkan oleh beberapa teori berikut : *taste discrimination theory* oleh Gary Backer (1957), *statistical differences in characteristics*, dan *overcrowding theory*. Menurut Backer, diskriminasi upah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan dapat dipahami dari asal diskriminasi : dari sisi pengusaha, dari sisi pekerja, dan dari sisi pembeli. Dari sisi pengusaha, diskriminasi terjadi jika pengusaha memiliki dugaan tentang kelebihan pekerja laki-laki dibanding perempuan sebelumnya. Dari sisi pekerja, laki-laki membutuhkan upah lebih tinggi jika harus bekerja dengan kolega perempuan. Dari sisi pembeli, jika pembeli lebih tertarik pada produk yang dijual oleh gender tertentu maka akan terjadi disparitas gender.

Statistical discrimination menyatakan bahwa ketika laki-laki atau perempuan yang memiliki kualitas yang sama dan menginginkan pekerjaan yang sama, meski pengusaha tidak memiliki dugaan terhadap jenis kelamin tertentu, tapi dia mengetahui bahwa perempuan cenderung memiliki waktu bekerja lebih sedikit karena tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga, maka perempuan akan cenderung dikeluarkan sebagai kandidat terbaik.

Menurut teori *overcrowding*, jika perempuan bekerja di tempat yang kelebihan penawaran atau kurang diminati, maka upah perempuan akan lebih rendah daripada laki-laki apapun lapangan pekerjaan atau tingkat produktifitasnya.

2.3. Framework Kesetaraan Gender dari Bank Dunia

Bank Dunia mengamati bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan memang terjadi di sebagian besar dunia dalam berbagai dimensi sosial dan ekonomi sepanjang siklus hidup. Kadang-kadang perbedaan ini berakibat buruk bagi laki-laki, namun sebagian besar membawa dampak kurang baik bagi perempuan. Disparitas antara laki-laki dan perempuan ini merupakan akibat dari interaksi yang kompleks pada tingkatan rumahtangga, pasar, dan institusi.

Salah satu cara untuk menggambarkan interaksi yang kompleks antara rumahtangga, pasar, dan institusi yang berakibat pada ketimpangan gender adalah dengan mengetahui bagaimana suatu rumahtangga berfungsi. Pada tingkat rumahtangga, kita akan mengetahui jenis kelamin apa yang menyerap pengeluaran paling besar khususnya untuk pendidikan dan kesehatan, apakah laki-laki atau perempuan yang menjalankan tugas dan kewajiban tertentu, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut selanjutnya akan mengakibatkan ketimpangan gender yang terjadi secara umum di masyarakat.

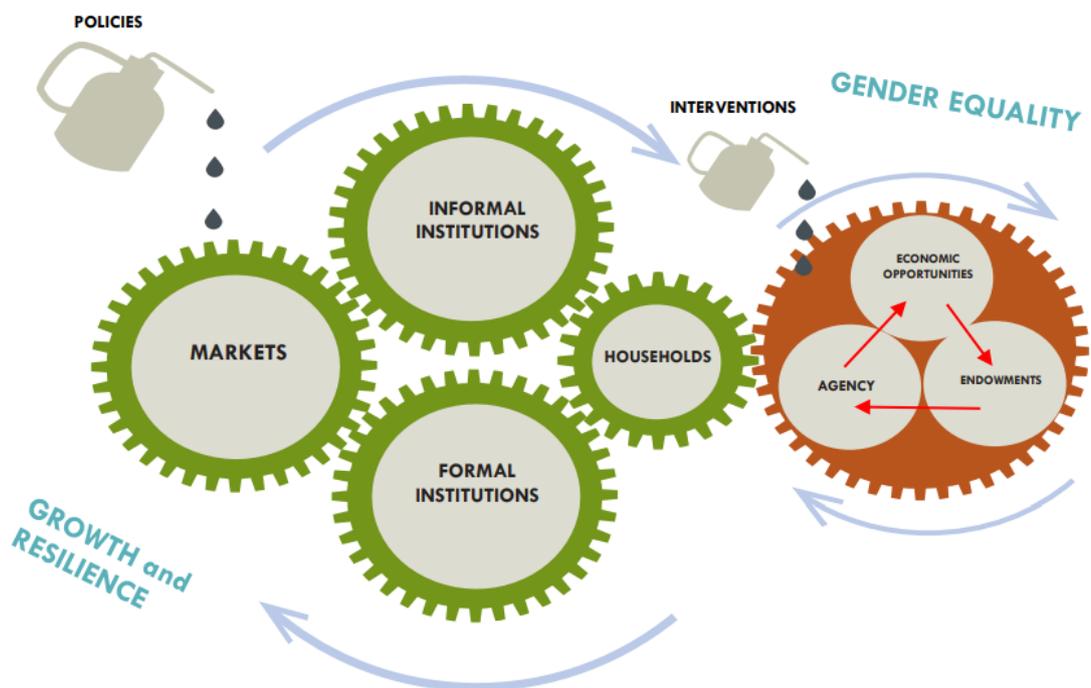
Tentu saja pilihan pembelanjaan dalam rumahtangga untuk gender tertentu dipengaruhi oleh norma-norma sosial, insentif pasar, dan institusi formal. Norma-norma sosial yang memberi perhatian lebih pada gender tertentu akan mempengaruhi alokasi belanja rumahtangga pada gender tersebut. Insentif pasar juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang gender, misal lapangan kerja tertentu membutuhkan lulusan pendidikan tertentu dan jenis kelamin tertentu, maka salah satu jenis kelamin akan menikmati keuntungan lebih tinggi. Selanjutnya, institusi formal yang biasanya melahirkan aturan-aturan berdasarkan ideologi dominan tentang gender di masyarakat secara pasti akan mempengaruhi keluaran pembangunan gender.

Bank Dunia menempatkan rumahtangga pada titik tengah perhatian, karena rumahtangga merupakan tempat membuat pilihan-pilihan (*choices*), menyediakan insentif (*incentives*), atau hambatan (*constraints*). Preferensi dibentuk oleh peran gender, norma-norma sosial, dan jejaring sosial (dalam *framework* diberi label *informal institutions*). Insentif sebagian besar dipengaruhi oleh pasar (meliputi pasar tenaga kerja, pasar barang, kredit, dan tanah) yang menentukan pengembalian atas keputusan dan investasi yang

dibuat oleh rumahtangga. Hambatan muncul sebagai akibat interplay dari *formal institutions* dan *informal institutions*.

Pada tingkat rumahtangga, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari tiga faktor yakni faktor endowment, faktor kesempatan ekonomi, dan faktor agency. *Agency* didefinisikan dengan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan merubahnya menjadi aksi/aktifitas dan output yang diinginkan.

Gambar 2.1. Framework Kesetaraan Gender dari Bank Dunia



Sumber : World Development Report Tahun 2012

Market atau pasar adalah tatanan yang memungkinkan penjual dan pembeli saling tukar barang atau jasa yang tunduk pada aturan tertentu. *Formal institutions* atau institusi formal adalah segala aspek yang memungkinkan berlangsungnya suatu negara, meliputi hukum, aturan, dan mekanisme yang mengatur penyediaan jasa bagi warga negara. *Informal social institutions* atau institusi sosial informal meliputi mekanisme, aturan, dan prosedur yang mengatur interaksi sosial namun tidak berkaitan dengan berfungsinya suatu negara.

Sebagaimana gambar di atas, kesetaraan gender yang besar akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditunjukkan oleh arah panah. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan meningkatkan kesetaraan gender jika disertai dengan kebijakan-kebijakan tertentu.

Framework Kesetaraan Gender Bank Dunia dibentuk berdasar pada teori ekonomi *household labor supply model* dan *the intrahousehold decision model (bargaining model)*. Kedua model ini lebih dekat dengan *taste model* yang ada dalam ilmu ekonomi dari Gary Becker (1957) yang telah diterangkan di atas.

Asumsi dari model *household labor supply* adalah pertama, rumahtangga melakukan produksi barang kebutuhan rumahtangga dari bahan baku yang dibeli di pasar namun tergantung dari waktu yang dimiliki. Oleh karena itu, penggunaan waktu terbagi untuk : a) bekerja di pasar kerja, b) produksi barang kebutuhan rumahtangga di rumah, c) bersantai. Asumsi kedua, sebagian besar rumahtangga memiliki lebih dari satu orang dewasa. Asumsi ketiga, ada dimensi waktu yang harus diperhatikan. Model ini dapat digunakan untuk menerangkan beberapa fenomena antara lain meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan, menurunnya tingkat kelahiran, dan meningkatnya investasi pendidikan anak perempuan.

Sebagai contoh adalah meningkatnya partisipasi kerja perempuan di pasar kerja. Dengan memperoleh upah, dia bisa mengalihdayakan (-*outsources*) tugas-tugas mengurus rumahtangga, atau membagi tugas rumahtangga dengan suami seiring meningkatnya posisi rebut tawarnya (*bargaining position*) dalam rumahtangga. Dengan demikian, perempuan masih bisa membagi waktunya dengan bekerja di pasar kerja, mengurus rumahtangga, dan menikmati waktu santainya. Kehadiran teknologi alat-alat rumahtangga juga akan menyediakan insentif lanjutan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah karena tugas-tugas rumahtangga cepat selesai.

Berbeda dengan model yang pertama, model *the intrahousehold decision* mengasumsikan bahwa keputusan dalam rumahtangga dibuat bersama oleh anggota rumahtangga. Dalam mengambil keputusan bersama, kekuatan budget dan harga relatif akan mempengaruhi “kekuatan” masing-masing anggota rumahtangga, dimana kedua hal tersebut dipengaruhi oleh faktor *endowment*

(modal manusia dan sumber produktif), norma sosial, dan aturan legal setempat. Oleh karena itu, model ini disebut juga *collective model*. Tentu saja, model ini berbeda dengan *unitary model solutions* dan *individual optimal choices*.

Menurut *unitary model solution*, dalam berbagai kesempatan percobaan, jika terjadi transfer masuk dalam rumahtangga dan penerimanya adalah perempuan, maka dia akan mengalokasikan transfer tersebut untuk kesehatan dan pendidikan, sementara jika penerimanya adalah laki-laki maka uang tersebut lebih cenderung dibelanjakan untuk kebutuhan laki-laki. Hipotesis ini kemudian banyak disanggah, yang kemudian disusul oleh *intrahousehold model* yang mengatakan bahwa bagaimana anggaran rumahtangga akan dibelanjakan tergantung dari kekuatan (*power*) dari perempuan dalam rumahtangga. Oleh karena itu, muncullah framework Bank Dunia Tahun 2012.

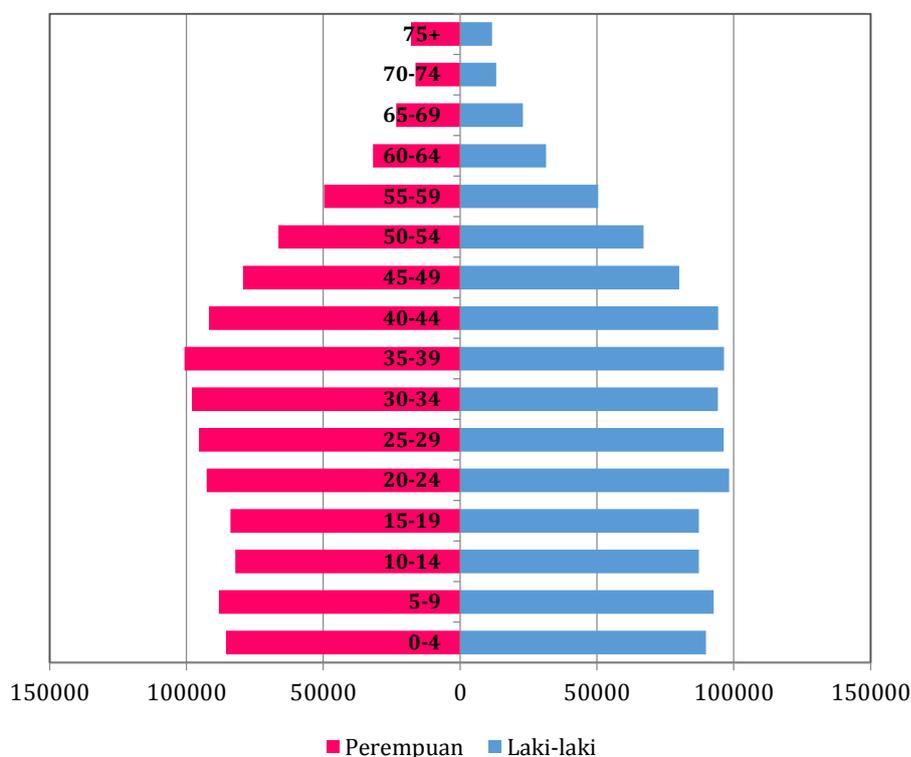
Tujuan dari pembuatan publikasi ini adalah memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo. Deskripsi ini akan membahas tiga faktor dalam rumahtangga yang menurut Bank Dunia akan menghasilkan kesetaraan gender di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni faktor *endowment*, faktor kesempatan ekonomi, dan faktor *agency* (kemampuan membuat pilihan untuk mencapai hasil yang diinginkan). Meski demikian, deskripsi lengkap akan diawali dengan bahasan mengenai karakteristik demografi laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sidoarjo.

3.1. Karakteristik Demografi

Analisis tentang pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo akan diawali dengan pembahasan distribusi penduduk menurut karakteristik demografi, yakni kelompok umur, jenis kelamin kepala rumahtangga, tingkat kesejahteraan, dan angka ketergantungan. Pembahasan distribusi gender menurut karakteristik demografi menjadi sangat penting untuk memastikan apakah keberadaan perempuan telah representatif atau masih termarginalkan dalam karakteristik demografi tertentu. Keberadaan perempuan yang marginal biasanya akan memperparah tingkat kesenjangan gender yang terjadi, atau disebut *intersection*.

Sebaran penduduk menurut kelompok umur sering ditampilkan dalam bentuk piramida penduduk. Selain menampilkan struktur penduduk menurut kelompok umur, piramida penduduk juga mampu mendeteksi mengenai hilangnya (*missing*) jenis kelamin tertentu. Piramida penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 dapat dilihat pada grafik 3.1. berikut.

Grafik 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018



Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

Secara umum terlihat bahwa penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Sidoarjo hampir seimbang yang mengindikasikan tidak adanya penduduk jenis kelamin tertentu yang hilang (*missing*). Bank Dunia mencatat hilangnya jenis kelamin tertentu ini dapat disebabkan oleh perbedaan paparan terhadap resiko kesehatan, seperti aborsi selektif untuk jenis kelamin tertentu, kematian yang berlebihan semisal peperangan, atau kematian ibu yang akut. Seimbangny jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tidak adanya kejadian tertentu yang beresiko terhadap kesehatan penduduk.

Rasio jenis kelamin menurut kelompok umur berkisar antara 95 hingga 105. Sebelum usia 60 tahun, rasio jenis kelamin di Kabupaten Sidoarjo lebih dari 100 yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan. Namun, rasio ini kemudian turun drastis setelah usia 60 tahun dibawah angka 80 yang mengindikasikan lebih panjangnya kelangsungan hidup perempuan dibanding laki-laki. Hal ini dikuatkan dengan tingginya angka

harapan hidup perempuan dibanding laki-laki sehingga jumlah lansia perempuan tentunya lebih banyak dibanding lansia laki-laki. Sementara itu, tingginya penduduk laki-laki pada usia produktif di Kabupaten Sidoarjo sering dikaitkan dengan fenomena migrasi masuk sehubungan dengan peran Sidoarjo sebagai penyangga perkembangan industri Kota Surabaya.

Ukuran demografi lain yang menggunakan karakteristik umur adalah rasio ketergantungan. Dari sisi demografi, ukuran ini dimaksudkan untuk melihat potensi rumahtangga dalam menghasilkan pendapatan. Jika suatu rumahtangga memiliki lebih banyak anggota usia produktif daripada non produktif (anak-anak dan lansia), maka rumahtangga tersebut diharapkan mempunyai sumber penghasilan yang cukup untuk menanggung beban anggota rumahtangga yang non produktif. Penduduk usia produktif didefinisikan sebagai penduduk pada kelompok umur 15-64, anak-anak berumur 0-14, dan lansia berumur 65+.

Tabel 3.1. Rasio Ketergantungan menurut Kelompok Kesejahteraan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Kelompok Kesejahteraan | Jenis Kelamin | |
|------------------------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) |
| Pendapatan Rendah | 45,27 | 45,72 |
| Pendapatan Menengah | 36,66 | 35,28 |
| Pendapatan Tinggi | 35,17 | 27,50 |

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

Tabel 3.1. menunjukkan rasio ketergantungan menurut tingkat kesejahteraan dan jenis kelamin. Secara umum terlihat bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan maka rasio ketergantungan semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada rumahtangga yang telah sejahtera, jumlah anggota rumahtangga (ART) non produktif yang harus ditanggung oleh ART produktif semakin sedikit. Hal ini selanjutnya akan memberi kesempatan kepada ART produktif untuk menumpuk kekayaan. Hal ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan.

Karakteristik demografi selanjutnya adalah komposisi penduduk menurut jenis kelamin kepala rumahtangga (KRT). Sekitar 89 persen kepala rumahtangga

di Sidoarjo berjenis kelamin laki-laki dan sisa 11 persennya berjenis kelamin perempuan. Ketiadaan *male breadwinner* pada rumahtangga yang dikepalai perempuan membuat rumahtangga ini tergolong rentan karena memiliki keterbatasan untuk mengakses sumber daya. Meski demikian, interpretasi terhadap angka ini memerlukan kehati-hatian mengingat kepala rumahtangga perempuan bisa juga terbentuk karena keberadaan suami yang bekerja di luar daerah.

Penduduk yang tinggal di rumahtangga yang dikepalai perempuan juga tidak proporsional. Banyaknya perempuan yang tinggal di rumah tangga jenis ini sejumlah 14 persen, lebih banyak dibandingkan laki-laki yang hanya berjumlah 7 persen. Ketimpangan gender biasanya lebih parah pada jenis rumahtangga yang dikepalai oleh perempuan daripada jenis rumahtangga yang dikepalai oleh laki-laki. Dilihat dari tingkat kesejahteraan, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan untuk tiap tingkat kesejahteraan hampir sama dan merata, yakni sekitar 20 persen untuk tiap kuantil pengeluaran.

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin KRT dan Tingkat Kesejahteraan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (Persen)

| Karakteristik Rumahtangga | Jenis Kelamin | | |
|---------------------------|---------------|-----------|-------|
| | Laki-laki | Perempuan | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Jenis Kelamin KRT | | | |
| Laki-laki | 92,60 | 85,60 | 89,10 |
| Perempuan | 7,40 | 14,40 | 10,90 |
| Tingkat Kesejahteraan | | | |
| Kuintil Terendah | 19,60 | 20,00 | 20,00 |
| Kuintil 2 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Kuintil 3 | 19,70 | 20,00 | 19,90 |
| Kuintil 4 | 21,00 | 19,20 | 20,10 |
| Kuintil Tertinggi | 19,70 | 20,40 | 20,00 |

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

3.2. Faktor Endowment

Menurut framework kesetaraan gender Bank Dunia (2012), ketika tingkat pendapatan suatu negara meningkat, maka hal ini akan berpengaruh pada faktor

endowment penduduknya, terutama tingkat pendidikan. Orang tua dulu yang hanya mengirim anak laki-lakinya sekolah, maka kini anak perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah. Jika *endowment* terutama tingkat pendidikan perempuan meningkat, maka perempuan bisa berkontribusi terhadap pendapatan keluarga.

Selanjutnya, permintaan jasa pendidikan yang besar oleh rumahtangga akan memaksa pemerintah (*formal institutions*) untuk menyediakan pendidikan yang murah dan berkualitas. Hal ini tentu saja akan mengurangi biaya pendidikan yang harus ditanggung rumahtangga, baik biaya langsung maupun tidak langsung, serta biaya kesempatan (*opportunity cost*). Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan ini selanjutnya akan direspon oleh pasar dengan memberi upah yang lebih tinggi.

Bagian ini akan membahas disparitas faktor *endowment* dalam rumahtangga yang kemudian diterjemahkan oleh ekonom kepada modal manusia yang meliputi pendidikan dan kesehatan.

3.2.1. Pendidikan

Modal manusia pertama yang akan dibahas adalah partisipasi sekolah. Menurut Bank Dunia (2012), partisipasi sekolah mengandung nilai investasi dan nilai instrumental yang akan menentukan perbedaan kesempatan di masa depan. Yang dimaksud nilai investasi adalah seseorang yang bersekolah cenderung akan mempunyai kesehatan yang baik dan pekerjaan yang layak. Selanjutnya, yang dimaksud mengandung nilai instrumental adalah seseorang yang bersekolah relatif mempunyai tingkat pendapatan yang lebih baik. Oleh karena itu, disparitas pada modal manusia (terutama pendidikan) akan memperparah dan mengekalkan kesenjangan gender yang ada.

Tak lupa, perempuan yang berpendidikan relatif mampu memutus kesenjangan gender bagi generasi berikutnya. Perempuan berpendidikan akan mampu membuat keputusan yang baik tentang alokasi belanja bagi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Selanjutnya, anak-anak ini akan tumbuh menjadi pekerja yang produktifitasnya tinggi di kemudian hari dan

memperoleh pendapatan yang lebih baik, bahkan menjadi calon ibu yang sehat dan hebat.

Tabel 3.3. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Partisipasi Sekolah | Jenis Kelamin | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Angka Partisipasi Sekolah (APS) | | | |
| 7-12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13-15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16-18 | 86,09 | 86,34 | 86,23 |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) | | | |
| SD | 104,54 | 107,87 | 106,20 |
| SMP | 96,72 | 107,04 | 101,41 |
| SMA | 121,73 | 105,85 | 112,98 |
| Angka Partisipasi Murni (APM) | | | |
| SD | 98,50 | 100,00 | 99,25 |
| SMP | 87,27 | 92,57 | 89,68 |
| SMA | 74,35 | 66,83 | 70,21 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Tabel 3.3 menunjukkan partisipasi sekolah menurut jenis kelamin di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2018 seluruh penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun saat itu tengah bersekolah yang ditunjukkan oleh angka partisipasi sekolah (APS). APS yang mencapai 100 menunjukkan keterbukaan peluang untuk bersekolah di Kabupaten Sidoarjo tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini jelas menunjukkan ketiadaan kesenjangan gender dalam dunia pendidikan, padahal pada masa dulu perempuan mempunyai keterbatasan akses dalam dunia pendidikan. Beberapa sebab meningkatnya partisipasi sekolah perempuan adalah program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, imbal balik pendidikan yang semakin besar, dan meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk.

Mengenai angka partisipasi kasar (APK), indikator ini berguna untuk melihat adanya murid yang belum cukup umur atau lebih umur namun tengah bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. Dengan kata lain, sekolah di

Kabupaten Sidoarjo mampu menampung murid lebih banyak daripada target. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa nilai APK untuk semua jenjang baik untuk laki-laki maupun perempuan lebih dari 100, kecuali untuk laki-laki di jenjang SMP. Hal ini menunjukkan keberadaan penduduk usia sekolah yang memasuki jenjang pendidikan tertentu lebih telat atau terlalu cepat dibanding teman sebayanya. Perempuan cenderung terlalu cepat memasuki SD dan SMP yang ditunjukkan oleh tingginya APK untuk kedua jenjang pendidikan tersebut.

Indikator angka partisipasi murni (APM) menunjukkan proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. Secara umum, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah nilai APM. Hal ini menunjukkan adanya fenomena murid bersekolah tidak sesuai umur pada tahun-tahun sebelumnya. Selisih nilai yang positif antara APK dan APM mengindikasikan kejadian telat masuk jenjang pendidikan tertentu atau mengulang atau drop out.

Tabel 3.4. Rasio Laki-laki dan Perempuan menurut Rumpun Ilmu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Rumpun Ilmu | Rasio Laki-laki/Perempuan |
|-----------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) |
| Ilmu Agama | 0,97 |
| Ilmu humaniora | 0,40 |
| Ilmu Sosial | 0,60 |
| Ilmu Alam | 1,18 |
| Ilmu Formal | 2,85 |
| Ilmu Terapan | 1,00 |
| Kesehatan& Pendidikan | 0,58 |
| Tehnik dan Mesin | 1,82 |
| Lainnya | 1,85 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Meski disparitas partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil, namun stereotipe gender dalam bidang pendidikan masih tetap terjadi. Tabel 3.4 menunjukkan rasio laki-laki dan perempuan (L/P) dalam hal jurusan pendidikan yang diambil saat kuliah. Jika rasio bernilai tepat 1, maka jumlah laki-laki dan perempuan yang mengambil jurusan tersebut hampir sama. Namun, jika rasio bernilai kurang dari 1, maka jurusan tersebut mempunyai

mahasiswa perempuan lebih banyak. Sebaliknya, jika rasio bernilai lebih dari 1, maka sebagian besar muridnya adalah laki-laki.

Dari tabel 3.4 di atas terlihat bahwa jurusan ilmu agama, humaniora (seni dan sastra), dan ilmu sosial (ekonomi& sosial politik) menarik lebih banyak mahasiswa perempuan. Sementara itu, jurusan ilmu alam (fisika, kimia, biologi) dan ilmu formal (matematika, Teknologi Informasi), lebih banyak menarik perhatian mahasiswa laki-laki. Secara garis besar, ilmu terapan memiliki mahasiswa laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang. Namun, kalau diteliti lebih jauh dalam rumpun ilmu terapan, perempuan lebih terkonsentrasi ke bidang pendidikan dan kesehatan daripada laki-laki yang lebih senang ke bidang tehnik dan mesin.

Perbedaan kemampuan kognitif antara laki-laki dan perempuan telah menarik perhatian banyak peneliti. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keunggulan dalam bidang matematis dan *visuospatial*, sementara perempuan memiliki keunggulan dalam hal mengingat dan berbicara, namun tidak ada perbedaan diantara keduanya dalam hal kefasihan berbicara (*fluency*) (Oksuzyan, Doblhammer, dan Guma, 2018 p.68). Namun, seiring membaiknya perekonomian dan terbukanya akses pendidikan, diperkirakan kemampuan kognitif antara laki-laki dan perempuan akan semakin membaik dan tidak berbeda.

3.2.2. Kesehatan

Tingkat kesehatan laki-laki dan perempuan harus diakui memang berbeda. Ada setidaknya tiga faktor yang mempengaruhi disparitas kesehatan dan kelangsungan hidup antara laki-laki dan perempuan, yakni faktor hormonal dan genetika, faktor yang berhubungan dengan gaya hidup, dan faktor sosial (Oksuzyan, Doblhammer, dan Guma, 2018).

Penelitian yang ada menunjukkan bahwa hormon perempuan (estrogen) memberi keuntungan dalam hal pemberian proteksi kekebalan tubuh. Dengan hormon tersebut, perempuan relatif lebih kebal terhadap penyakit menular daripada laki-laki, setidaknya jika laki-laki dan perempuan sakit dengan penyebab yang sama, maka sakit laki-laki lebih parah dibanding perempuan.

Begitu pula dengan reaksi terhadap vaksinasi, kekebalan tubuh perempuan akan lebih kuat dibanding reaksinya terhadap tubuh laki-laki. Hal ini selanjutnya akan menentukan perbedaan tingkat kesakitan dan kematian antara laki-laki dan perempuan (Oksuzyan, Doblhammer, dan Guma, 2018 p.78).

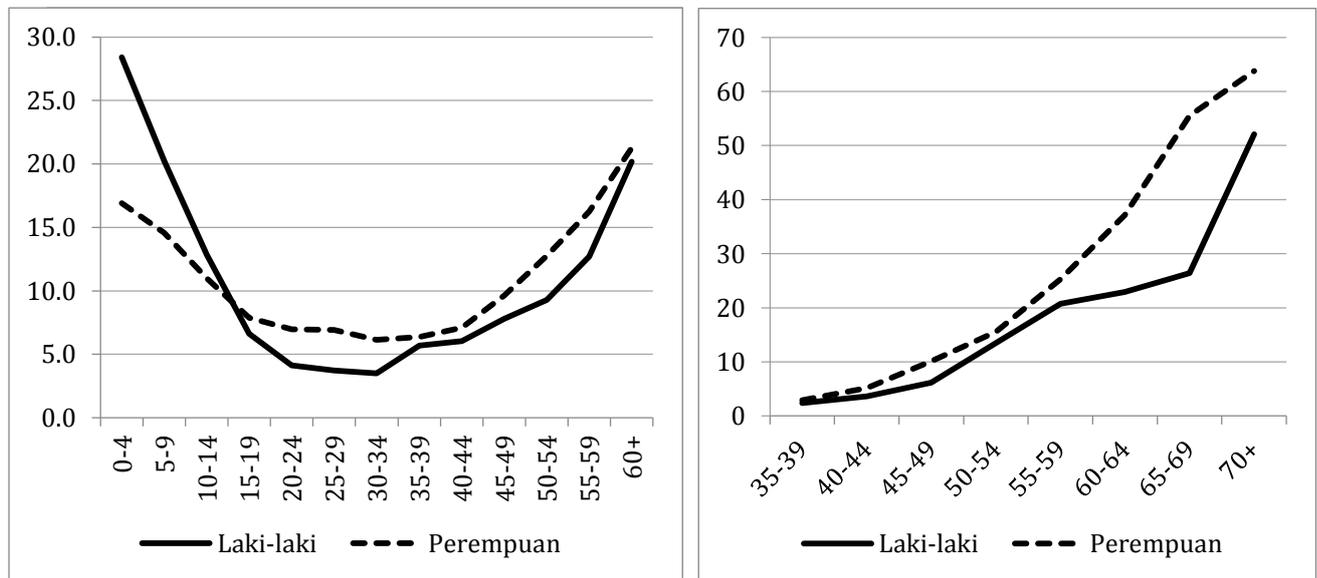
Dalam hal kromosom, sebagaimana diketahui bahwa tubuh laki-laki mengandung kromosom XY dan tubuh perempuan mengandung kromosom XX. Dalam satu kromosom X terkandung 1100 gen yang berhubungan dengan proses fisiologis dan satu kromosom Y terkandung kurang dari 100 gen yang akan menentukan jenis kelamin laki-laki. Keberadaan dua kromosom X dalam tubuh perempuan tentu memberi kekebalan tubuh lebih kuat terkait dengan penyakit yang berhubungan dengan kromosom X-seperti hemophilia A. Tambahan lagi, setengah gen dari kromosom X pada perempuan bersifat aktif dan setengahnya lagi bersifat non aktif, sementara pada laki-laki seluruh gen pada kromosom X bersifat aktif. Hal ini juga meningkatkan resiko laki-laki terhadap paparan penyakit yang disebabkan oleh kromosom X dibanding perempuan. Hal ini kemudian memberi keuntungan kesehatan lebih kepada perempuan daripada laki-laki secara biologis.

Dalam faktor gaya hidup, kebiasaan merokok dan minum-minuman keras jelas membedakan tingkat kesehatan antara laki-laki dan perempuan. Kebiasaan perempuan untuk mengatur pola makannya dengan asupan makanan sehat dan bergizi jelas menguntungkan perempuan, sementara laki-laki yang melakukan hal yang sama dianggap kurang maskulin. Kebiasaan olahraga perempuan yang kontinyu sepanjang hidupnya juga memberi manfaat lebih pada perempuan, sementara aktifitas olahraga pada laki-laki biasanya terhenti setelah dewasa. Hal ini disebabkan motivasi laki-laki untuk berolahraga memang untuk prestasi dan menunjukkan kekuatan fisiknya, sementara untuk perempuan memang cenderung untuk menjaga kesehatan.

Penjelasan dari sisi sosial, tingkat pendidikan jelas memberi pengaruh positif terhadap tingkat kesehatan dalam hal kemudahan akses terhadap pengetahuan untuk menjaga kesehatan dan akses terhadap jaminan kesehatan. Tingkat kesehatan juga berbeda antara pengangguran dan pekerja, yang berupah/gaji tinggi dengan yang lebih rendah meski temuan ini mungkin

mengandung *selection bias*. Maksudnya adalah sebenarnya bukan status menganggur/bekerja yang membedakan tingkat kesehatan seseorang, tapi secara logika kondisi sehat memungkinkan seseorang (terseleksi) untuk bekerja.

Grafik 3.2. Angka Kesakitan (kiri) dan Angka Disabilitas (Kanan) *mean smoothed* menurut Kelompok Umur, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018



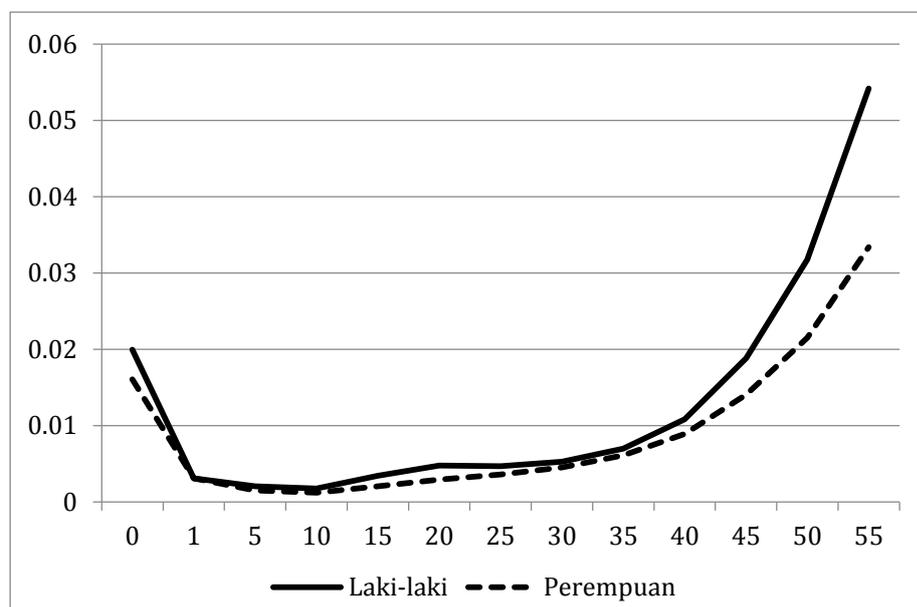
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

Dari grafik 3.2 di atas terlihat bahwa tingkat kesehatan laki-laki dan perempuan bervariasi menurut kelompok umur. Pada kelompok umur muda proporsi laki-laki yang sakit dan terganggu kegiatannya lebih besar dibanding perempuan. Menginjak umur remaja hingga lansia, angka kesakitan perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Beberapa alasan mengapa angka kesakitan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki adalah pertama, perempuan cenderung memiliki kondisi kronis pada fungsi tubuhnya sementara laki-laki memiliki kondisi kronis yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya, seperti penyakit jantung, dan lainnya. Alasan kedua adalah perempuan dianggap lebih mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya dan laki-laki enggan untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter atau mengakui kelemahan tubuhnya sendiri (Oksuzyan, Doblhammer, dan Guma, 2018).

Pola yang sama ditemui untuk angka disabilitas menurut kelompok umur, dimana proporsi perempuan yang menyandang disabilitas relatif lebih tinggi dibanding laki-laki pada setiap kelompok umur. Disabilitas di Susenas

menggunakan konsep *Activities of Daily Living* (ADL) atau keterbatasan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, seperti naik tangga, menggerakkan jari, berkomunikasi, mengurus diri sendiri, dan lainnya. Menurut Verbrugge dan Jette (1994), analisis disabilitas sebaiknya dilakukan pada usia dewasa atau lansia sebagai akibat berkurangnya fungsi tubuh (*disablement process*) daripada usia anak-anak yang kemungkinan disebabkan oleh banyak hal. Ternyata, sumber disabilitas di Kabupaten Sidoarjo sebagian besar bersumber pada gangguan/ kesulitan untuk melihat dan naik tangga.

Grafik 3.3. Peluang Kematian menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018



Sumber : Angka Harapan Hidup, diolah dengan program Mortpak aplikasi MATCH model New Coale-Demeny West

Tingginya angka disabilitas pada perempuan ini bukan berarti laki-laki memiliki kondisi kesehatan yang lebih prima. Sebagaimana terlihat pada grafik 3.3 di atas, probabilitas kematian untuk laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan yang mengindikasikan besarnya peluang laki-laki untuk meninggal pada setiap kelompok umur. Sebagai konsekuensi logis, umur harapan hidup perempuan pada saat ini lebih tinggi daripada laki-laki. Namun umur panjang perempuan tersebut menjadi kurang bermakna jika harus disertai dengan penurunan fungsi tubuh/disabilitas. Oleh karena itu, perhatian memang layak diberikan kepada perempuan yang secara matematis mempunyai umur lebih panjang, namun mereka juga memiliki proporsi disabilitas yang lebih besar.

3.3. Faktor Kesempatan Ekonomi

Dalam hal kesempatan ekonomi, arah sebaliknya dari framework Bank Dunia akan digunakan. Dalam rumahtangga, jika alokasi waktu yang digunakan perempuan untuk mengurus rumahtangga lebih banyak daripada laki-laki; dan institusi formal melakukan segregasi/pengelompokan pekerjaan berdasar gender & abai dengan aturan dan infrastruktur bagi perempuan; serta pasar sendiri membuat diskriminasi berdasar gender, maka hal ini akan menghalangi seseorang dengan gender tertentu untuk meraup kesempatan ekonomi.

Faktor kesempatan ekonomi biasanya dilihat dari indikator-indikator ketenagakerjaan. Keputusan seseorang untuk menangkap kesempatan ekonomi yang ada biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain : (1) keberadaan anak kecil, untuk melihat beban keluarga, (2) tingkat pendidikan, untuk menangkap imbal balik dari investasi modal manusia, (3) umur, untuk melihat siklus hidup, seperti kelahiran. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai anak kecil, mempunyai tingkat pendidikan tinggi, dan sedang tidak mengandung/melahirkan cenderung akan menangkap kesempatan ekonomi yang tersedia.

Kesempatan ekonomi dibagi menjadi 4 kategori, yakni ekstensif, margin intensif, produktifitas, dan akses kepada sumber daya. Keempat kategori tersebut secara komprehensif akan memberi gambaran mengenai pasar kerja suatu daerah. Indikator ketenagakerjaan yang bersifat ekstensif meliputi partisipasi angkatan kerja dan pengangguran, sementara itu yang termasuk margin intensif adalah jam kerja dan jenis pekerjaan. Produktifitas biasanya diukur dengan upah buruh.

3.3.1. Indikator Ketenagakerjaan Ekstensif

Indikator ketenagakerjaan yang bersifat ekstensif meliputi partisipasi angkatan kerja dan pengangguran. Kedua indikator ini berfungsi untuk melihat sejauh mana penyerapan pasar kerja seiring bertambahnya penduduk usia kerja. Dalam konteks Indonesia, penduduk usia kerja ini secara demografi didefinisikan sebagai penduduk berusia 15-64 tahun. Dalam bahasa lain, penduduk usia kerja ini biasanya disebut sebagai tenaga kerja (*manpower*).

Partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar kerja, baik aktif bekerja maupun aktif mencari kerja. Penduduk usia kerja yang bekerja ini selanjutnya disebut pekerja dan penduduk usia kerja yang mencari kerja disebut penganggur. Untuk melihat seberapa besar porsi penduduk usia kerja yang benar-benar aktif dalam pasar kerja, maka indikator ketenagakerjaan yang biasa dipakai adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

Tabel 3.5. Indikator Ketenagakerjaan menurut Karakteristik Individu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Karakteristik Individu | TPAK | | % Pekerja | | TPT | | BAK | |
|------------------------|-------|-------|-----------|-------|------|------|-------|-------|
| | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Status Perkawinan | | | | | | | | |
| Belum Kawin | 59,22 | 42,31 | 51,05 | 34,81 | 8,18 | 0,08 | 40,78 | 57,69 |
| Kawin | 90,99 | 52,26 | 89,14 | 51,69 | 1,85 | 0,01 | 9,01 | 47,74 |
| Cerai Hidup | 92,31 | 91,72 | 92,31 | 91,72 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 8,28 |
| Cerai Mati | 57,95 | 40,44 | 57,95 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 42,05 | 59,56 |
| Tingkat Pendidikan | | | | | | | | |
| Tidak Sekolah | 60,18 | 36,35 | 60,18 | 36,35 | 0,00 | 0,00 | 39,82 | 63,65 |
| SD | 71,41 | 38,13 | 68,75 | 38,13 | 2,66 | 0,00 | 28,59 | 61,87 |
| SMP+SMA | 79,32 | 47,59 | 74,65 | 45,44 | 4,67 | 0,02 | 20,68 | 52,41 |
| >SMA | 87,73 | 72,89 | 85,57 | 68,03 | 2,16 | 0,05 | 12,27 | 27,11 |
| Kelompok Umur | | | | | | | | |
| 15-24 | 41,23 | 34,49 | 32,46 | 26,92 | 8,77 | 0,08 | 58,77 | 65,51 |
| 25-34 | 96,11 | 65,32 | 91,43 | 63,62 | 4,68 | 0,02 | 3,89 | 34,68 |
| 35-44 | 97,40 | 57,94 | 95,05 | 57,08 | 2,35 | 0,01 | 2,60 | 42,06 |
| 45-54 | 95,98 | 56,09 | 93,74 | 56,09 | 2,24 | 0,00 | 4,02 | 43,91 |
| 55-59 | 47,78 | 22,65 | 47,33 | 22,65 | 0,45 | 0,00 | 52,22 | 77,35 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Keterangan :

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

BAK : Bukan Angkatan Kerja

Lk : Laki-laki

Pr : Perempuan

Secara sederhana, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dihitung dengan rumus jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, syarat tergabung dalam angkatan kerja adalah penduduk harus aktif dalam pasar kerja, baik sebagai pekerja maupun penganggur. Sebagai konsekuensi, penduduk yang tidak aktif dalam pasar kerja, meliputi anak sekolah, ibu rumahtangga, dan lainnya, akan dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja (BAK).

Tabel 3.5. di atas menunjukkan indikator ketenagakerjaan yang bersifat ekstensif menurut karakteristik individu. Mengenai partisipasi kerja menurut status perkawinan, partisipasi terendah terdapat pada penduduk yang belum kawin dan cerai mati, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Rendahnya partisipasi kerja pada penduduk *single/bujangan* ini kemungkinan disebabkan oleh belum adanya tanggung jawab dalam keluarga dan sifatnya yang masih mencari-cari pekerjaan yang cocok. Sementara itu, status cerai mati biasanya terjadi pada usia tua sehingga mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pasar kerja dan hanya menerima transfer dari anggota rumahtangga yang lain atau sumber lainnya.

Tabel 3.6. Kegiatan Seminggu Yang Lalu Istri, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Tingkat Kesejahteraan | Jenis Kegiatan | | |
|-----------------------|----------------|----------------------|---------|
| | Bekerja | Mengurus Rumahtangga | Lainnya |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Bawah | 35,2 | 63,0 | 1,8 |
| Menengah | 36,9 | 62,9 | 0,2 |
| Atas | 53,1 | 46,7 | 0,2 |

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

Menyandang status kawin, partisipasi kerja laki-laki meningkat pesat sebagai tanggung jawab laki-laki menyediakan nafkah bagi keluarga. Sementara itu, partisipasi perempuan hanya naik sedikit yang kemungkinan disebabkan oleh kesibukan perempuan untuk mengurus rumahtangga, misal mengurus anak atau orang tua jompo, sebagaimana diterangkan oleh model *household labor supply* di atas. Meski demikian, perlu penelitian lanjutan untuk menjawab mengapa partisipasi perempuan relatif rendah saat kawin. Dugaan bahwa fenomena ini disebabkan oleh penghasilan suami yang sudah lebih dari cukup sepertinya kurang mendapat dukungan bukti empiris. Hasil Susenas Tahun

2018 menunjukkan bahwa perempuan yang berstatus sebagai istri cenderung untuk bekerja seiring meningkatnya tingkat kesejahteraan, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 3.6 di atas.

Dilihat dari tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka partisipasi angkatan kerja Sidoarjo semakin meningkat, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa insentif untuk bekerja semakin meningkat seiring meningkatnya tingkat pendidikan. Dengan terjun ke pasar kerja, seseorang akan mempunyai kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperolehnya dan memperoleh penghasilan (imbal balik) dari investasi pendidikan yang telah dilakukannya.

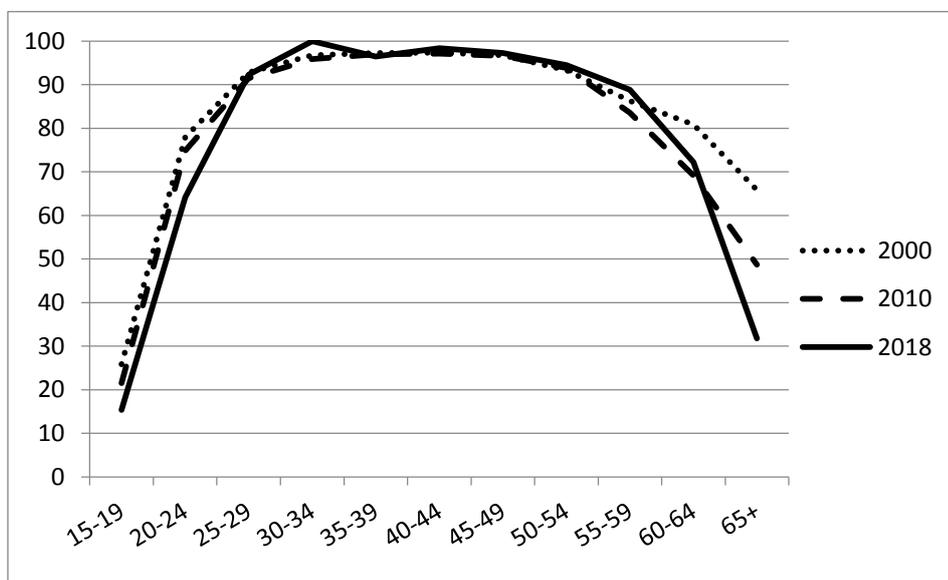
Pada umumnya, laki-laki yang berpendidikan tinggi akan menikah dengan perempuan yang berpendidikan tinggi (teori *assortive matching*). Dengan kondisi imbal balik (*rate of return*) yang semakin tinggi seiring meningkatnya tingkat pendidikan di Indonesia, maka menikah dengan orang yang berpendidikan tinggi akan menambah pendapatan dalam keluarga. Dengan demikian, menikah dengan laki-laki berpendidikan tinggi akan memberi peluang kepadanya untuk keluar dari pasar kerja. Namun faktanya tidak demikian, TPAK perempuan berpendidikan tinggi di Sidoarjo justru meningkat dibanding perempuan yang berpendidikan rendah. Hal ini sekaligus menolak dugaan bahwa perempuan Sidoarjo akan keluar dari pasar kerja jika pendapatan suami sudah lebih dari cukup.

Dilihat dari segi usia, partisipasi kerja terendah terdapat pada kelompok umur muda dan kelompok umur tua. Pada kelompok umur muda, pemuda masih mencoba-coba pekerjaan yang cocok sehingga mereka sering berganti-ganti pekerjaan dan mencari-cari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahliannya. Sementara pada umur tua, penduduk usia ini sudah mulai memasuki masa pensiun sehingga keluar dari pasar kerja. Dilihat secara grafik, angka partisipasi ini akan menunjukkan kurva huruf U terbalik, baik untuk laki-laki maupun perempuan (lihat grafik 3.4 dan grafik 3.5 di bawah ini).

Dari tahun ke tahun, pola grafik TPAK laki-laki relatif hampir sama dimana pada umur muda partisipasi bekerjanya rendah kemudian meningkat

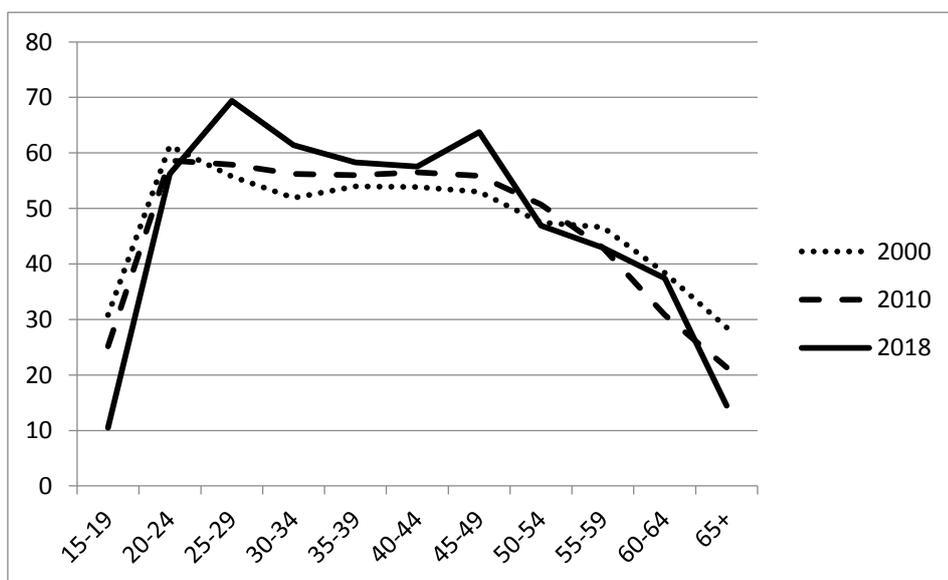
seiring bertambahnya usia hingga mencapai puncak kemudian turun perlahan. Pola yang sama juga terlihat pada grafik TPAK perempuan. Perbedaan grafik TPAK dari tahun ke tahun biasanya terlihat pada kelompok umur muda dan kelompok umur tua. Pada kelompok umur muda, angka partisipasi kerja biasanya cenderung menurun seiring meningkatnya akses terhadap pendidikan. Pada kelompok umur tua, angka partisipasi kerja diperkirakan terus menurun sejalan dengan membaiknya jaminan hari tua sehingga lansia tidak perlu bekerja lagi di hari tuanya sebagaimana lansia yang lalu.

Grafik 3.4. TPAK laki-laki menurut Tahun, Kabupaten Sidoarjo



Sumber : BPS, SP2000, SP2010, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Grafik 3.5. TPAK perempuan menurut Tahun, Kabupaten Sidoarjo



Sumber : BPS, SP2000, SP2010, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Ada hal menarik jika grafik TPAK perempuan Sidoarjo dicermati lebih jauh. Meski TPAK cenderung turun pada umur muda dan umur tua, namun pada umur-umur diantara keduanya TPAK perempuan Sidoarjo sebenarnya relatif meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya (lihat grafik 3.5). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Sidoarjo sebenarnya ingin terlibat dalam pasar kerja meski keterlibatannya tidak sebesar laki-laki. Setidaknya ada dua hal yang menghalangi keterlibatan perempuan dalam pasar kerja, yaitu alokasi waktu dalam pekerjaan rumah tangga dan faktor siklus hidup seperti perkawinan dan melahirkan.

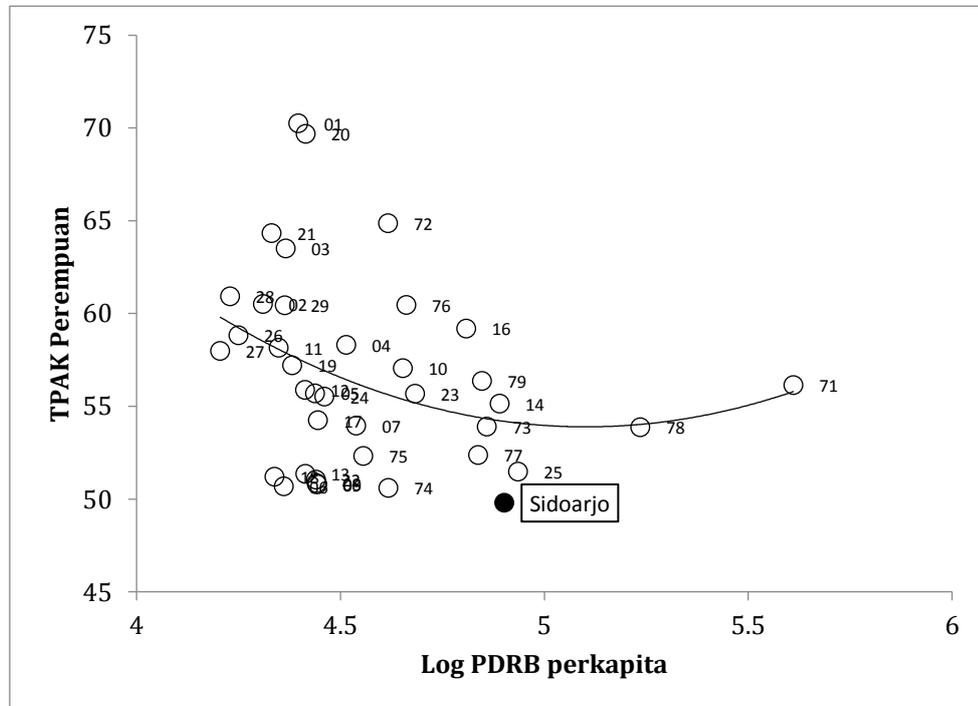
Grafik TPAK Sidoarjo mencapai puncaknya pada usia 25-29 kemudian menurun sesudahnya dan naik lagi pada usia 45-49. Keberadaan dua puncak pada grafik TPAK Perempuan Sidoarjo sebenarnya jamak terjadi di wilayah lain. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Sidoarjo sempat tergabung dalam pasar kerja sebelum menikah dan melahirkan. Ketika anak-anak sudah besar, perempuan Sidoarjo akan kembali tergabung dalam pasar kerja dan partisipasinya ini akan terus menurun seiring bertambahnya usia.

Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menurut ahli ekonomi berhubungan dengan besarnya PDRB suatu daerah. Hubungan antara partisipasi kerja perempuan dan perkembangan ekonomi ini akan berbentuk huruf U sesuai dengan hipotesis Goldin (1995) yang menyatakan bahwa partisipasi kerja perempuan biasanya relatif tinggi pada daerah-daerah yang didominasi oleh sektor pertanian sebagai pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga. Seiring perkembangan sektor industri yang memproduksi barang-barang komersial dengan teknologi baru, maka partisipasi kerja perempuan akan menurun. Dengan membaiknya struktur industri dan munculnya sektor jasa, maka partisipasi kerja perempuan akan meningkat kembali.

Goldin (1995) menambahkan partisipasi kerja perempuan yang rendah di negara-negara berkembang bisa disebabkan oleh faktor urbanisasi dan produksi barang non pertanian untuk komersial. Sayangnya, lapangan kerja ini tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja perempuan sebagaimana di sektor pertanian. Untuk bisa berpartisipasi lagi dalam lapangan kerja non pertanian, tingkat pendidikan perempuan perlu ditingkatkan lebih dari pendidikan dasar. Pada

pendapat yang lain, menurunnya partisipasi kerja perempuan bisa disebabkan oleh diskriminasi gender, terbatasnya fisik perempuan, kesulitan menyeimbangkan peran pekerja dan ibu rumah tangga, dan kondisi sosial budaya setempat.

Grafik 3.6. Hubungan TPAK perempuan dan PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018



Sumber : BPS

Pada tahun 2018 partisipasi kerja perempuan Sidoarjo sedang berada pada posisi paling rendah dari kurva U meski sektor industri tengah berkembang sebagaimana terlihat pada grafik 3.6. Merujuk pada hipotesis Goldin di atas, hal ini mungkin disebabkan oleh preferensi pengusaha akan tenaga kerja laki-laki karena kekuatan fisiknya, kesulitan perempuan untuk mengalokasikan waktu bagi pekerjaan di sektor industri dan tugas kerumahtanggaan, dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan.

Beralih ke tingkat pengangguran, ketimpangan gender dalam tingkat pengangguran dijelaskan oleh bank Dunia sebagai berikut. Kondisi pertama, perempuan biasanya menghadapi tantangan yang luar biasa dalam menemukan pekerjaan dibanding laki-laki karena jejaring sosial yang terbatas dan keterbatasan informasi. Selain itu, perempuan juga lebih pilih-pilih pekerjaan karena karena harus menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan tanggung

jawab di rumah. Alasan lain, perempuan juga biasanya memilih pekerjaan yang sesuai dengan norma, stereotipe, bahkan prasangka gender, dibandingkan dengan pertimbangan penghasilan atau kecocokan pekerjaan (*job match*). Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dan durasi mencari pekerjaan menjadi lebih lama. Di lain pihak, jika perempuan merasa putus asa setelah mencari pekerjaan yang lama, maka mereka cenderung keluar dari pasar kerja. Jika kondisi ini lebih kuat daripada kondisi pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka tingkat pengangguran perempuan biasanya lebih rendah dan partisipasi perempuan ikut rendah.

Tampak dari tabel 3.5 bahwa tingkat pengangguran laki-laki selalu lebih besar daripada perempuan. Dengan memperhatikan angka pengangguran perempuan Sidoarjo yang rendah dan partisipasi bekerjanya juga rendah, tampaknya kondisi yang terakhir yang lebih cocok untuk menerangkan kondisi kesempatan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Bahwa perempuan kesulitan mencari pekerjaan yang pas dengan kewajibannya mengurus rumahtangga sepertinya lebih pas untuk menerangkan mengapa partisipasi kerja perempuan Sidoarjo relatif rendah.

3.3.2. Indikator Ketenagakerjaan Margin Intensif

Margin intensif digunakan untuk melihat intensitas kerja dari pekerja yang diwakili oleh dua indikator, yakni jenis pekerjaan dan jumlah jam kerja. Kedua jenis indikator ini berfungsi untuk menampilkan sejauh mana keterlibatan pekerja dalam pekerjaan.

Dilihat dari lapangan pekerjaan, porsi laki-laki yang bekerja di sektor sekunder dan sektor jasa hampir sama (tabel 3.7). Sementara itu, pekerjaan perempuan lebih terkonsentrasi ke sektor jasa. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, perempuan cenderung bekerja di sektor jasa yang lebih membutuhkan ketelitian, ketelatenan, dan kesabaran. Pekerjaan di sektor jasa juga menawarkan jam kerja yang lebih fleksibel kepada perempuan yang memungkinkan mereka untuk menyeimbangkan waktu antara bekerja dan mengurus rumahtangga.

Ada perbedaan sistematis antara pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan, baik dalam hal tipe pekerjaan, lapangan usaha, jabatan, dan lain-lain. Istilah *employment seggregation* atau *occupational seggregation* merujuk pada konsentrasi yang tidak seimbang antara laki-laki atau perempuan pada lapangan pekerjaan tertentu. Misalnya perempuan terkonsentrasi pada sektor jasa sementara laki-laki bekerja di sektor sekunder. Perempuan lebih suka menjadi guru, perawat, tenaga penjualan, dan tenaga jasa lainnya. Sementara laki-laki banyak bekerja di sektor konstruksi dan transportasi. Perempuan juga lebih suka pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu lama atau fleksibel karena harus menyesuaikan dengan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Tabel 3.7. Karakteristik Pekerjaan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Karakteristik | Jenis Kelamin | |
|----------------------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) |
| Jenis Kegiatan | | |
| Bekerja | 75,37 | 47,64 |
| Pengangguran | 3,95 | 2,15 |
| Bukan Angkatan Kerja | 20,68 | 50,21 |
| Jam Kerja | | |
| Paruh Waktu | 8,30 | 19,40 |
| Penuh Waktu | 91,70 | 80,60 |
| Lapangan Usaha | | |
| Primer | 5,30 | 1,50 |
| Sekunder | 47,40 | 34,40 |
| Tersier | 47,30 | 64,10 |
| Status Pekerja | | |
| Formal | 76,00 | 71,70 |
| Informal | 24,00 | 28,30 |
| Status Pekerjaan | | |
| Berusaha | 22,70 | 30,40 |
| Buruh | 69,20 | 59,60 |
| Pekerja Bebas | 6,60 | 2,00 |
| Pekerja Keluarga | 1,50 | 8,00 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Employment segregation bisa diawali dari stereotipe gender. Stereotipe gender ini mempunyai pengaruh yang bersifat deskripsi, “what is” dan preskripsi/ rekomendasi, “what should” (Risman, 2018). Dalam bahasa sederhana, perempuan sering digambarkan dengan pribadi yang lembut, telaten, sabar, bahkan sentimentil; inilah makna “*what is*”, apa itu perempuan. Ketika perempuan digambarkan dengan kondisi seperti di atas, maka pekerjaan yang cocok bagi perempuan adalah perawat, guru, *customer service*; ini adalah makna “*what should*”, apa yang cocok bagi perempuan. Adanya stereotipe gender ini tidak hanya merugikan perempuan, tapi juga laki-laki, karena akan menghalangi kedua gender untuk bekerja dan berkarya di bidang pekerjaan yang lain.

Dilihat dari jam kerja, sekitar 90 persen lebih laki-laki memiliki jam kerja penuh waktu dibanding perempuan yang hanya sekitar 80 persen. Secara ekonomi, jam kerja yang relatif sedikit akan menghalangi perempuan untuk mengumpulkan pendapatan lebih banyak. Oleh karena itu, kondisi ini bisa juga diartikan telah terjadi kesenjangan gender, namun kadang kondisi seperti ini merupakan kondisi yang diharapkan oleh perempuan. Dengan jam kerja yang lebih pendek, perempuan mempunyai keleluasaan untuk menyeimbangkan peran antara pekerja dan ibu rumah tangga. Meski demikian, persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor formal maupun informal jumlahnya hampir sama. Untuk diperhatikan, sektor formal/ informal dan pekerja formal/informal ini mempunyai definisi yang berbeda.

Dirinci menurut status pekerjaan, sebagian besar laki-laki dan perempuan bekerja dengan status sebagai buruh, masing-masing sebesar 69 persen dan 60 persen. Meski demikian, perempuan mempunyai porsi yang relatif lebih besar pada status pekerja keluarga dan pekerja mandiri. Padahal kedua status ini tergolong sebagai pekerja rentan karena sebagian besar tidak mempunyai jaring pengaman sosial, seperti asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan, dan jaminan pensiun. Tiga status pekerjaan, pekerja mandiri, pekerja keluarga, dan pekerja bebas, sering dikelompokkan menjadi pekerja informal. Pekerja informal ini diyakini muncul sewaktu-waktu saat terjadi goncangan ekonomi sebagai strategi bertahan (*coping strategy*), namun dalam jangka panjang semua orang menginginkan berstatus sebagai pekerja formal.

Berlanjut ke jumlah jam kerja, jam kerja laki-laki relatif lebih lama daripada jam kerja perempuan, sebagaimana terlihat pada tabel 3.8 berikut. Hanya satu pengecualian, jam kerja perempuan yang bersatus sebagai pekerja keluarga lebih lama hampir dua kali lipat dibanding jam kerja laki-laki (masing-masing 40 jam dan 28 jam). Meski memiliki jam kerja lebih lama, berstatus sebagai pekerja keluarga membuat penghasilan perempuan tidak terlalu besar atau hampir tidak ada.

Jam kerja perempuan di sektor informal juga relatif sangat rendah dibanding laki-laki. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kadang bekerja di sektor informal dengan jam kerja sedikit merupakan pilihan perempuan untuk menyeimbangkan perannya sebagai pekerja dan ibu rumahtangga. Sebagaimana dimaklumi, bekerja dan mengurus rumahtangga membutuhkan alokasi waktu tersendiri yang saling menggantikan karena keduanya tidak bisa dilakukan secara bersamaan (*incompatible*).

Tabel 3.8. Rata-rata Jam Kerja dari Seluruh Pekerjaan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Karakteristik | Jenis Kelamin | |
|------------------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) |
| Jam Kerja | | |
| Paruh Waktu | 4,0 | 3,0 |
| Penuh Waktu | 51,0 | 50,0 |
| Lapangan Usaha | | |
| Primer | 46,0 | 44,0 |
| Sekunder | 47,0 | 42,0 |
| Tersier | 50,0 | 45,0 |
| Status Pekerja | | |
| Formal | 48,0 | 44,0 |
| Informal | 21,0 | 9,0 |
| Status Pekerjaan | | |
| Berusaha | 49,0 | 44,0 |
| Buruh | 48,0 | 44,0 |
| Pekerja Bebas | 51,0 | 41,0 |
| Pekerja Keluarga | 28,0 | 40,0 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Dilihat dari lapangan usaha, pekerja sektor jasa mencurahkan waktu relatif lebih banyak daripada sektor primer maupun sektor sekunder. Perlu diketahui, ILO menggolongkan pekerja yang bekerja diatas 50 jam seminggu sebagai pekerja *overtime* (ILO, 2016). Bekerja dengan jam kerja berlebih akan berdampak pada kesehatan pribadi (jasmani dan mental) dan kehidupan sosialnya. Tabel 3.8 memperlihatkan bahwa laki-laki yang bekerja di sektor tersier atau berstatus sebagai pekerja bebas sering mempunyai jam kerja berlebih. Selain itu, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja penuh waktu juga cenderung bekerja *overtime*.

3.3.3. Indikator Ketenagakerjaan tentang Produktifitas

Upah secara ekonomi merupakan balas jasa pengusaha kepada pekerja atas produktifitasnya dalam bekerja. Semakin tinggi tingkat produktifitas seseorang, maka upah yang diterimanya haruslah sama besar. Oleh karena itu, besaran upah dapat digunakan untuk mengukur produktifitas pekerja. Dalam sakernas, upah buruh terdiri atas upah uang dan upah barang. Dalam publikasi ini, upah yang dimaksud adalah penjumlahan keduanya dan hanya untuk pekerja yang berstatus sebagai buruh.

Tabel 3.9. Rata-rata Upah Buruh per Bulan dari Pekerjaan Utama menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Karakteristik | Jenis Kelamin | |
|----------------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) |
| Jam Kerja | | |
| Paruh Waktu | 2.667.827 | 1.517.063 |
| Penuh Waktu | 3.714.465 | 3.066.746 |
| Lapangan Usaha | | |
| Primer | 3.264.366 | - |
| Sekunder | 3.538.077 | 2.877.420 |
| Tersier | 3.884.025 | 2.922.254 |
| Total | 3.681.076 | 2.902.114 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Dari tabel 3.9 di bawah ini terlihat bahwa upah laki-laki per bulan sekitar 3,6 juta rupiah dan upah perempuan per bulan sekitar 2,9 juta rupiah. Diantara

keduanya, terdapat perbedaan upah sebesar 700 ribu atau sebesar 19,44 persen. Namun selisih dalam bentuk persentase ini masih kasar (*raw gender wage gap*) karena belum mempertimbangkan variabel tingkat pendidikan dan ketrampilan. Selanjutnya, dilihat menurut jenis pekerjaan dan lapangan usaha, upah laki-laki per bulan selalu lebih tinggi daripada upah perempuan.

Perbedaan besaran upah tersebut selanjutnya dapat didekomposisi untuk mengetahui sumber perbedaan, apakah berasal dari faktor endowment atau faktor diskriminasi. Dalam ilmu ekonomi, metode yang paling sering digunakan untuk mengetahui perbedaan upah menurut gender adalah metode dekomposisi Oaxaca-Blinder. Untuk mengetahui peranan faktor endowment, dua indikator yang digunakan adalah tingkat pendidikan yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan pengalaman kerja yang dihitung dengan rumus *umur-lama sekolah-usia masuk sekolah*.

Hasil dekomposisi metode Oaxaca-Blinder dengan two step Heckman menunjukkan bahwa selisih upah antara laki-laki dan perempuan sebesar 30,86 persen (lihat lampiran 2). Dari 30,86 persen perbedaan tersebut, yang dapat dijelaskan dengan faktor endowment hanya sebesar 12,44 persen dan sisa 87,56 persen disebabkan oleh faktor diskriminasi. Setidaknya ada dua alasan mengapa perempuan diupah rendah oleh perusahaan, pertama adanya stereotipe gender sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kedua, hak-hak pekerja perempuan, seperti hak cuti haid dan hak melahirkan, dianggap merugikan perusahaan (Priyono, 2015).

3.4. Faktor Agency

Di berbagai wilayah perempuan sering tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan, baik pada tingkat rumahtangga, komunitas, bahkan masyarakat. Pada tingkatan rumahtangga, ketidakmampuan perempuan tersebut sering berakhir pada kekerasan rumahtangga. Beberapa hal yang mempengaruhi kekuatan perempuan untuk menyuarakan aspirasinya adalah pendapatan dan kontrol terhadap aset rumahtangga. Penelitian membuktikan perempuan dari kalangan atas relatif mempunyai agency dibanding perempuan

dari kalangan bawah. Namun, sebenarnya faktor yang paling berpengaruh adalah pendapatan dari perempuan itu sendiri.

Pada tingkatan masyarakat, perempuan sering diasosiasikan dengan ketidakmampuannya untuk memimpin. Hal ini tentunya akan merugikan perempuan karena masyarakat tidak akan mampu menilai dengan jelas kapasitas perempuan. Kondisi ini secara nyata tercermin pada keterwakilan perempuan di parlemen. Kurangnya wakil perempuan di parlemen ini mungkin juga disebabkan oleh kurangnya jejaring yang dimiliki perempuan karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengurus rumah tangga.

Sayangnya, sedikit sekali survei pada tingkat rumah tangga yang berusaha mengukur agency perempuan dalam rumah tangga. Dalam publikasi ini, agency akan diwakili oleh indikator kepemilikan rekening tabungan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Dengan memiliki rekening tabungan atas nama sendiri, maka seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan kontrol dan belanja atas uang yang dimiliki.

Tabel 3.10. Kepemilikan Tabungan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (Persen)

| Karakteristik | Jenis Kelamin | |
|-----------------------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) |
| Tingkat Kesejahteraan | | |
| Bawah | 26,4 | 16,6 |
| Menengah | 43,8 | 36,2 |
| Atas | 67,0 | 61,4 |
| Tingkat Pendidikan | | |
| SD ke bawah | 30,60 | 22,11 |
| SMP+SMA | 48,07 | 38,23 |
| Diploma+ | 90,64 | 82,39 |
| Total | 41,6 | 33,5 |

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

Sebagaimana terlihat pada tabel 3.10 di atas, penduduk dari kalangan atas relatif memiliki rekening tabungan daripada penduduk dari kalangan bawah, baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Demikian pula jika dirinci

menurut tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka ia cenderung memiliki rekening tabungan di bank. Secara umum, persentase laki-laki yang memiliki rekening tabungan lebih besar daripada perempuan.

Publikasi ini bertujuan untuk memberi gambaran pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo. Bab sebelumnya telah membahas tiga faktor dalam rumahtangga yang akan menghasilkan kesetaraan gender di masyarakat, yakni faktor endowment, faktor kesempatan ekonomi, dan faktor agency. Meski demikian, tetap diperlukan suatu indikator tunggal yang akan memudahkan semua pihak untuk menilai perkembangan pembangunan gender. Indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.

4.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender atau *Gender Development Index (GDI)* merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender. Penghitungan IPG sebenarnya hampir sama dengan penghitungan IPM tetapi disesuaikan dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, dimensi yang digunakan dalam pengukuran IPG sama persis dengan dimensi IPM, yakni dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Pembaca yang tertarik dengan metodologi penghitungan IPG lebih detail dapat melihat lampiran 1.

Dimensi kesehatan digambarkan oleh Usia Harapan Hidup, dimensi pengetahuan diwakili oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan dimensi standar hidup layak diukur dari pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Dengan mengamati indikator-indikator pembentuk masing-masing dimensi, terlihat bahwa memang terdapat perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, masing-masing 75,54 tahun dan 71,78 tahun. Pada dimensi pengetahuan, rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dari perempuan, yaitu 10,77 tahun dan 9,70 tahun untuk jenis kelamin yang bersesuaian. Untuk lebih jelasnya,

besaran masing-masing indikator pembentuk IPG dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1. Indikator-indikator Pembentuk IPG dan pertumbuhannya, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2018

| Indikator | 2015 | | 2017 | | 2018 *) | |
|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) |
| Proporsi penduduk (%) | 50,24 | 49,24 | 50,24 | 49,76 | 50,25 | 49,75 |
| Dimensi Umur Panjang dan Sehat | | | | | | |
| Angka Harapan Hidup (e ⁰ /Tahun) | 70,99 | 74,94 | 71,78 (1,11) | 75,54 (0,80) | 71,89 (0,15) | 75,66 (0,16) |
| Dimensi Pengetahuan | | | | | | |
| Harapan Lama Sekolah / EYS (Tahun) | 13,61 | 14,14 | 14,37 (5,58) | 14,28 (0,99) | 14,80 (2,99) | 14,66 (2,66) |
| Rata-Rata Lama Sekolah/ MYS (Tahun) | 10,63 | 9,64 | 10,77 (1,32) | 9,70 (0,62) | 10,78 (0,09) | 9,71 (0,10) |
| Dimensi Kehidupan yang Layak | | | | | | |
| Pengeluaran Perkapita (Juta) | 17,91 | 12,56 | 19,05 (6,37) | 13,23 (5,33) | 19,67 (3,25) | 13,64 (3,09) |
| IPM menurut Gender | 80,93 | 76,30 | 82,85 | 77,32 | 83,66 | 78,08 |
| IPG | 94,28 | | 93,325 | | 93,330 | |

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Keterangan :

- IPG Tahun 2016 tidak disajikan karena Sakernas tidak dilaksanakan untuk penghitungan angka ketenagakerjaan tingkat kabupaten/kota
- Angka dalam tanda kurung () merupakan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya dalam persen

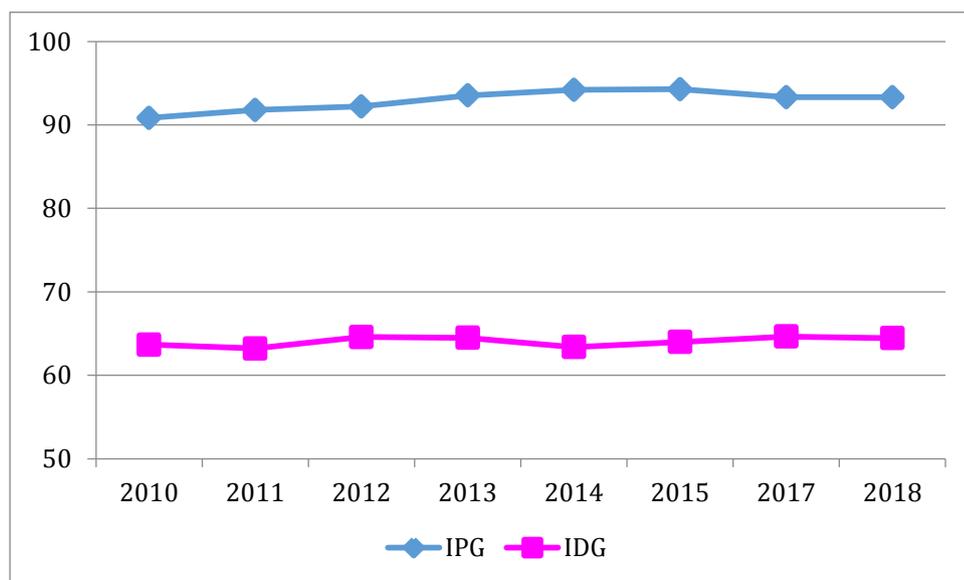
*) Angka sementara

Nilai IPG=100 memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan antara laki-laki dengan perempuan sudah setara. Sebaliknya jika angka IPG semakin jauh dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk

menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

IPG Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sebesar 93,33; angka IPG ini lebih tinggi daripada capaian angka IPG Jawa Timur yang sebesar 90,77. IPG Sidoarjo tahun 2018 juga meningkat sangat tipis dibanding tahun 2017 yang sebesar 0,005 poin. Melihat tren perkembangan angka IPG Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik 4.1, angka IPG Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2012 hingga 2018 mengalami fluktuasi dalam kisaran sempit. Untuk diketahui, IPG tahun 2016 tidak bisa disajikan karena survei angkatan kerja nasional (Sakernas) tidak jadi dilaksanakan karena penghematan anggaran oleh pemerintah.

Grafik 4.1. IPD dan IDG Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Secara umum, angka IPG Kabupaten Sidoarjo cenderung naik pada periode 2012-2018. Angka IPG sempat turun pada tahun 2017 sebesar 1,01 persen menjadi 93,33 dibanding tahun 2015 yang sebesar 94,28. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya IPM laki-laki yang relatif lebih tinggi dibanding IPM perempuan. Ada dua komponen yang menyebabkan penurunan IPG Kabupaten Sidoarjo tahun 2017, yakni Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (lihat angka dalam kurung pada tabel 4.1). Rasio pertumbuhan kedua komponen tersebut masing-masing sebesar 5,64 dan 2,13. Artinya,

peningkatan kualitas pembangunan laki-laki di komponen Harapan Lama Sekolah 5,64 kali lebih cepat dibanding perempuan; arti yang sama bahwa Rata-rata Lama Sekolah laki-laki meningkat 2,13 kali lebih cepat dibanding perempuan. Fenomena meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah ini karena pertumbuhan partisipasi sekolah laki-laki di kelompok umur 19-24 lebih besar dibanding perempuan.

Pada tahun 2018 IPG Kabupaten Sidoarjo hampir sama dengan dengan IPG tahun 2017. Sebagaimana terlihat pada tabel 4.1, semua komponen IPM tumbuh sama cepat antara laki-laki dan perempuan. Komponen Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah perempuan meningkat lebih tinggi daripada laki-laki. Sebaliknya, Harapan Lama Sekolah dan Pendapatan perkapita tumbuh lebih cepat pada laki-laki dibanding perempuan. Hal ini yang kemudian menyebabkan IPG Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 tidak begitu berbeda dengan IPG tahun 2017.

4.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement* (GEM) merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusinya dalam aspek ekonomi maupun sosial. Persamaan dalam peran, bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya sekedar dalam persamaan status dan kedudukan, tetapi lebih pada soal pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survei) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan, baik bersifat langsung

maupun tidak langsung, dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasilnya menggambarkan kondisi terkini (*current condition*) peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

Capaian IDG Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sebesar 64,46, kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin jika dibandingkan capaian pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh menurunnya proporsi penduduk perempuan yang berstatus sebagai tenaga kerja profesional sebagaimana terlihat pada tabel 4.1. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa daya tawar perempuan Sidoarjo dalam pengambilan keputusan relatif melemah dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 4.1. Indikator-indikator Pembentuk IDG, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2018

| Indikator | 2015 | | 2017 | | 2018*) | |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) |
| Proporsi penduduk (%) | 50,24 | 49,24 | 50,24 | 49,76 | 50,25 | 49,75 |
| Dimensi Partisipasi Politik | | | | | | |
| Keterwakilan di Parlemen (%) | 76 | 14 | 76 | 14 | 76 | 14 |
| Dimensi Partisipasi Ekonomi & Pengambilan Keputusan | | | | | | |
| Proporsi dari manager, administrasi, profesional dan teknisi (%) | 52,76 | 47,24 | 52,79 | 47,21 | 56,31 | 43,69 |
| Dimensi Penguasaan Sumber Daya Ekonomi | | | | | | |
| Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%) | 71,00 | 29,00 | 70,64 | 29,36 | 70,62 | 29,38 |
| IDG | 63,99 | | 64,65 | | 64,46 | |

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Keterangan :

- IDG Tahun 2016 tidak disajikan karena Sakernas tidak dilaksanakan untuk penghitungan angka ketenagakerjaan tingkat kabupaten/kota

*) Angka sementara

Kesimpulan dan Saran 5

Tujuan penulisan publikasi ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo. Gambaran tersebut menyangkut faktor-faktor kesetaraan gender pada tingkatan rumahtangga, yang meliputi faktor endowment, faktor kesempatan ekonomi, dan faktor agency. Dari analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, berikut disampaikan kesimpulan dan saran yang bisa ditawarkan.

5.1. Kesimpulan

1. Saat ini pembangunan bidang pendidikan telah dapat dinikmati oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi, bahkan perempuan cenderung meraup manfaat lebih besar dengan meningkatnya partisipasi sekolah. Meski demikian, jurusan kuliah yang diambil oleh mahasiswi masih terkonsentrasi ke rumpun ilmu tertentu yang mengindikasikan masih adanya stereotipe gender.
2. Saat ini perempuan juga tengah menikmati hidup yang lebih lama daripada laki-laki. Meski demikian, perempuan juga mempunyai tingkat kesakitan dan tingkat disabilitas yang relatif lebih tinggi daripada laki-laki. Hidup lama namun sakit-sakitan dan menyandang disabilitas tentu bukanlah kondisi yang diharapkan semua orang.
3. Meski perempuan menikmati manfaat pembangunan paling besar, namun partisipasi kerja perempuan masih tetap rendah, bahkan paling rendah se-Jawa Timur. Selain itu, perempuan yang bekerja juga menyandang status sebagai pekerja rentan dan memiliki upah yang relatif lebih rendah dibanding laki-laki.
4. Faktor agency yang diwakili oleh indikator kepemilikan tabungan juga menunjukkan bahwa kemampuan perempuan Sidoarjo untuk membuat keputusan masih kurang menggembirakan
5. Pembangunan manusia perempuan Sidoarjo telah mencapai kategori tinggi, namun kecepatan pertumbuhan masing-masing komponen yang berbeda

antara laki-laki dan perempuan menyebabkan IPG sempat mengalami penurunan dan stagnan pada tahun ini.

6. Upaya pemberdayaan gender tahun ini menghadapi tantangan karena porsi perempuan yang bekerja sebagai manager, profesional, administrasi, dan teknisi mengalami penurunan.

5.2. Saran

1. Pemberian edukasi dan konsultasi tentang kesetaraan gender dan manfaatnya bagi kesejahteraan rumahtangga dan pencapaian tujuan pembangunan lainnya masih perlu dilakukan terus menerus melalui berbagai media dan kepada berbagai pihak. Tanpa kesadaran semua pihak, terutama lembaga pemerintahan, maka pembangunan gender tidak akan mendapat dukungan.
2. Adanya stereotipe gender pada dunia pendidikan perlu ditindaklanjuti dengan pemberian edukasi kepada siswa-siswi bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dan berhak untuk mengambil jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.
3. Perlu dilakukan perumusan strategi dan kebijakan untuk menghadapi meningkatnya jumlah perempuan manula, hidup sendiri, sakit-sakitan, dan menyandang disabilitas. Aksi-aksi yang dilakukan di kabupaten/kota lain perlu direplika dan disesuaikan dengan kondisi setempat.
4. Dunia kerja perlu dibuat seramah mungkin kepada pekerja perempuan, terutama pekerja perempuan yang telah memiliki anak. Karena sebagian besar keluarga di Sidoarjo bertipe keluarga inti, perempuan yang bekerja akan membuat anak tanpa pengasuhan. Oleh karena itu, penyediaan *daycare* yang ramah dan murah perlu mendapat dukungan.
5. Perempuan perlu didorong dan dikondisikan untuk mempunyai suara dalam menentukan kehidupannya sendiri. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan, seperti pendirian koperasi wanita (kopwan), perlu diperluas kepada bidang-bidang lain dengan memperhatikan konteks, budaya, dan norma setempat.

Daftar Pustaka

- Adioetomo, S.M. (2005). *Bonus Demografi : Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Pidato Disampaikan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, Jakarta.
- BPS Kabupaten Sidoarjo (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018*. Sidoarjo : BPS Kabupaten Sidoarjo
- Gary Backer (1957). *The Economics of Discrimination*. Chicago : Chicago University Press
- Goldin, C. (1995). The U-Shaped Female Labor Force Function in Economic Development and Economic History, *NBER Working Paper Series, no: 4707*
- Handayani, Dwini dan Pardede, Elda (2017). Gender : Disparitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi. Dalam Adioetomo dan Pardede Eds (2017). *Memetik Bonus Demografi : Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok : Rajawali Pers
- International Labour Office (2016). *Key Indicators of Labour Market, 9th edition*. Geneva : ILO
- Jann, Ben (2008). The Blinder-Oaxaca decomposition for linear regression models. *The Stata Journal* 8(4) : 453-479
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik (2018). *Pembangunan Manusia berbasis Gender Tahun 2018*. Jakarta : KemenPPPA dan BPS
- Max Roser (2019). *Life Expectancy*. Dipublikasikan online di OurWorldInData.org. Diakses dari : '<https://ourworldindata.org/life-expectancy>' pada tanggal 24 Juni 2019
- Oksuzyan, A., Guma, J., dan Doblhammer, G. (2018). Sex differences in Health and Survival. Dalam Guma, J. dan Doblhammer, G., Eds (2018). *A Demographic perspective on Gender, Family, and Health in Europe*. Cham, Switzerland : Springer Open
- Posadas, J., Paci, P., Sajala, Z., dan Lhoksin, M (2017). *Measuring Gender Inequality : Streamlined Analysis with AdePT Software*. Washington DC : The World Bank
- Priyono, Edy (2015). *Memahami Pasar Tenaga Kerja : Bacaan Ekonomi untuk non Ekonom, cetakan 1*. Jakarta : Pustaka Lentera
- Risman, B.J., Froyum, C.M., dan Scarborough, W.J., Eds (2018). *Handbook of the Sociology of gender, Second Edition*. Cham, Switzerland : Springer International publishing, AG
- Risman, Barbara J. (2018). Gender as a Social Structure. Dalam Risman, B.J., Froyum, C.M., dan Scarborough, W.J., Eds (2018). *Handbook of the Sociology of gender, Second Edition*. Cham, Switzerland : Springer International publishing, AG

- Verbrugge, L. M. dan Jette, A. M (1994). The Disablement Process. *Social Science and Medicine*, 38(1), 1-14
- West, C. dan Zimmerman, D. H. (1987). Doing Gender. *Gender and Society*, 1, 125-151
- World Development Report (2012). *Gender Equality and Development*. Washington DC : The World Bank

Lampiran 1

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Umur Harapan Hidup saat Lahir

Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan lama tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussell dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya.

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks adalah 85 tahun dan terendah sebagai batas bawah adalah 20 tahun.

Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan yang menjadi salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan:

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j

p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : jumlah komoditas

Penyusunan Indeks

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok (Tabel 1). Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel 2. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Tabel 1 : Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

| | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Beras | Pisang lainnya | Rokok kretek tanpa filter |
| Tepung terigu | Pepaya | Rokok putih |
| Ketela | Minyak kelapa | Rumah sendiri/bebas sewa |
| Kentang | Minyak goreng lainnya | Rumah kontrak |
| Tongkol/tuna/cakal | Kelapa | Rumah sewa |
| Kembung | Gula pasir | Rumah dinas |
| Bandeng | Teh | Listrik |
| Mujair | Kopi | Air PAM |
| Mas | Garam | LPG |
| Lele | Kecap | Minyak tanah |
| Ikan segar lainnya | Penyedap | Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat |
| Daging sapi | Mie instan | Perlengkapan mandi |
| Daging ayam ras | Roti manis/roti lainnya | Barang kecantikan |
| Daging ayam | Kue kering | Perawatan kulit,muka,kuku,rambut |
| Telur ayam ras | Kue basah | Sabun cuci |
| Susu kental manis | Makanan gorengan | Biaya RS Pemerintah |
| Susu bubuk | Gado-gado/ketoprak | Biaya RS Swasta |
| Susu bubuk bayi | Nasi campur/rames | Puskesmas/pustu |
| Bayam | Nasi goreng | Praktek dokter/poliklinik |
| Kangkung | Nasi putih | SPP |
| Kacang panjang | Lontong/ketupat sayur | Bensin |
| Bawang merah | Soto/gule/sop/rawon/c | Transportasi/pengangkutan umum |
| Bawang putih | Sate/tongseng | Pos dan Telekomunikasi |
| Cabe merah | Mie bakso/mie | Pakaian jadi laki-laki dewasa |
| Cabe rawit | Makanan ringan anak | Pakaian jadi perempuan dewasa |
| Tahu | Ikan (goreng/bakar | Pakaian jadi anak-anak |
| Tempe | Ayam/daging (goreng | Alas kaki |
| Jeruk | Makanan jadi lainnya | Minyak Pelumas |
| Mangga | Air kemasan galon | Meubelair |
| Salak | Minuman jadi lainnya | Peralatan Rumah Tangga |
| Pisang ambon | Es lainnya | Perlengkapan perabot rumah |
| Pisang raja | Roko kretek filter | Alat-alat Dapur/Makan |

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2 : Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

| Komponen IPM | Satuan | Minimum | Maksimum |
|------------------------------|--------|-----------|------------|
| Angka Harapan Hidup saat | Tahun | 20 | 85 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 0 | 18 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 0 | 15 |
| Pengeluaran per Kapita | Rupiah | 1.007.436 | 26.572.352 |

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara -Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

- Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
- Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
- Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
- Kelompok “rendah” : $IPM < 60$

Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antar gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.

Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

Bagaimana Metode Baru?

IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu:

- 1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- 2) pengetahuan (*knowledge*); dan
- 3) standar hidup layak (*decent standard of living*).

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Pada tahun 2014, UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data SUSENAS. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari SUSENAS.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur output dari dimensi pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup baik indikator input maupun indikator output.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.

Penyusunan Indeks Komposit

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung

sama seperti pada metode lama. Perbedaannya hanya pada batasan untuk masing- masing komponen. Berikut adalah nilai minimum dan maksimum untuk masing- masing komponen.

Tabel 3 : Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG

| Indikator | Minimum | | Maksimum | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| Umur Harapan Hidup (tahun) | 17,55 | 22,5 | 82,5 | 87,5 |
| Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan | 1.007.436 | | 26.572.352 | |

Dalam penyusunan indeks IPM laki-laki dan Perempuan, digunakan rumus yang berlaku untuk masing-masing jenis kelamin, yaitu sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki-laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut.

$$IPM_P = \sqrt[3]{I_{kesehatan_p} \times I_{pendidikan_p} \times I_{pengeluaran_p}}$$

$$IPM_L = \sqrt[3]{I_{kesehatan_L} \times I_{pendidikan_L} \times I_{pengeluaran_L}}$$

Penggunaan rata-rata geometrik ini sangat beralasan, yaitu rata-rata geometrik cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata

aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antardimensi.

Pada metode baru, penghitungan angka IPG tidak lagi dengan membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut.

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} \times 100$$

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

Perubahan Interpretasi

Akibat perubahan metodologi yang terjadi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik,

partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata (*Equally Distributed Equivalent Percentage*). Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Untuk penghitungan masing-masing indeks dapat dilakukan sebagai berikut.

Penyusunan Indeks

4. Indeks keterwakilan di parlemen (I_{par})

$$EDEP_{(par)} = \left(\frac{P_f}{X_f} + \frac{P_m}{X_m} \right)^{-1} \times 100$$

dan

$$I_{(par)} = \frac{\{EDEP_{(par)}\}}{50}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

X_f = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen

X_m = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

5. Indeks Pengambilan Keputusan (I_{DM})

$$EDEP_{(DM)} = \left(\frac{P_f}{Y_f} + \frac{P_m}{Y_m} \right)^{-1} \times 100$$

dan

$$I_{(DM)} = \frac{\{EDEP_{(DM)}\}}{50}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

Y_f = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

Y_m = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

6. Indeks distribusi pendapatan ($I_{inc-dis}$)

Penghitungan indeks distribusi pendapatan menggunakan formula yang sama dengan penghitungan IPM metode lama. Untuk menghitung indeks ini digunakan batas maksimum dan minimum dari pengeluaran perkapita. Batas maksimum dan minimum pengeluaran perkapita pada metode lama adalah sebagai berikut:

| Komponen | Satuan | Minimum | Maksimum |
|------------------------|--------|--|----------|
| Pengeluaran per kapita | Rupiah | a. 300.000 (1996) b. 360.000 (1999 dst) | 732.720 |

$$\text{Rasio Upah}_i = \frac{\text{Upah buruh nonpertanian}_i}{\text{Upah buruh nonpertanian}_m}$$

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Upah}_i &= (\text{Rasio upah}_m \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_m) \\ &+ (\text{Rasio upah}_f \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_f) \end{aligned}$$

$$\text{Rasio Terhadap Rata - rata Upah}_i = \frac{\text{Rasio Upah}_i}{\text{Rata - rata Upah}_m}$$

Sumbangan Pendapatan_i

$$= \text{Proporsi Angkatan Kerja}_i \times \text{Rasio terhadap Rata - rata Upah}_i$$

$$\text{Proporsi Sumbangan Pendapatan}_i = \frac{\text{Sumbangan Pendapatan}_i}{\text{Proporsi Penduduk}_m}$$

dimana

i = Laki-laki (m) atau perempuan (f)

Kemudian menghitung EDEP dengan rumus sebagai berikut.

$$EDEP_{(inc-dis)} = \left(\frac{P_f}{Z_f} + \frac{P_m}{Z_m} \right)^{-1} \times 100$$

dan

$$I_{(inc-dis)} = \frac{(EDEP_{(inc-dis)} \times \text{Pengeluaran per Kapita (yang disesuaikan)}) - 360}{732,72 - 300}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

Z_f = proporsi sumbangan pendapatan perempuan

Z_m = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

7. Indeks pemberdayaan gender

$$IDG = \frac{(I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-dis)})}{3}$$

Lampiran 2

```
. probit lfp i.manu i.service i.fullhour if b4_k6==2
```

Iteration 0: log likelihood = -630.44189
 Iteration 1: log likelihood = -157.71459
 Iteration 2: log likelihood = -142.28985
 Iteration 3: log likelihood = -142.02924
 Iteration 4: log likelihood = -142.029
 Iteration 5: log likelihood = -142.029

Probit regression

| | | |
|---------------|---|--------|
| Number of obs | = | 911 |
| LR chi2(3) | = | 976.83 |
| Prob > chi2 | = | 0.0000 |
| Pseudo R2 | = | 0.7747 |

Log likelihood = -142.029

| lfp | Coef. | Std. Err. | z | P> z | [95% Conf. Interval] |
|------------|-----------|-----------|--------|-------|----------------------|
| 1.manu | 2.857034 | .3406239 | 8.39 | 0.000 | 2.189424 3.524645 |
| 1.service | 3.284302 | .2969142 | 11.06 | 0.000 | 2.702361 3.866243 |
| 1.fullhour | 1.434451 | .3499645 | 4.10 | 0.000 | .7485331 2.120369 |
| _cons | -1.518003 | .0867262 | -17.50 | 0.000 | -1.687984 -1.348023 |

```
. drop xb
```

```
. drop mills
```

```
. probit lfp i.manu i.service i.fullhour if b4_k6==2
```

Iteration 0: log likelihood = -630.44189
 Iteration 1: log likelihood = -157.71459
 Iteration 2: log likelihood = -142.28985
 Iteration 3: log likelihood = -142.02924
 Iteration 4: log likelihood = -142.029
 Iteration 5: log likelihood = -142.029

Probit regression

| | | |
|---------------|---|--------|
| Number of obs | = | 911 |
| LR chi2(3) | = | 976.83 |
| Prob > chi2 | = | 0.0000 |
| Pseudo R2 | = | 0.7747 |

Log likelihood = -142.029

| lfp | Coef. | Std. Err. | z | P> z | [95% Conf. Interval] |
|------------|-----------|-----------|--------|-------|----------------------|
| 1.manu | 2.857034 | .3406239 | 8.39 | 0.000 | 2.189424 3.524645 |
| 1.service | 3.284302 | .2969142 | 11.06 | 0.000 | 2.702361 3.866243 |
| 1.fullhour | 1.434451 | .3499645 | 4.10 | 0.000 | .7485331 2.120369 |
| _cons | -1.518003 | .0867262 | -17.50 | 0.000 | -1.687984 -1.348023 |

```
. predict xb if e(sample), xb
(903 missing values generated)
```

```
. generate mills=normalden(-xb)/(1-normal(-xb))
(903 missing values generated)
```

```
. replace mills=0 if b4_k6==1
(903 real changes made)
```

```
. oaxaca LNWage MYS exprienc mills, by(b4_k6) adjust(mills) noisily relax
```

Model for group 1

| Source | SS | df | MS | Number of obs = | 420 |
|----------|------------|-----|------------|-----------------|--------|
| Model | 28.5966927 | 2 | 14.2983463 | F(2, 417) = | 59.54 |
| Residual | 100.149606 | 417 | .24016692 | Prob > F = | 0.0000 |
| | | | | R-squared = | 0.2221 |
| | | | | Adj R-squared = | 0.2184 |
| Total | 128.746298 | 419 | .307270402 | Root MSE = | .49007 |

| LNWage | Coef. | Std. Err. | t | P> t | [95% Conf. Interval] | |
|----------|----------|-----------|-------|-------|----------------------|----------|
| MYS | .0922086 | .0085673 | 10.76 | 0.000 | .0753682 | .109049 |
| exprienc | .0088404 | .0018802 | 4.70 | 0.000 | .0051447 | .0125362 |
| mills | 0 | (omitted) | | | | |
| _cons | 9.886116 | .1211891 | 81.58 | 0.000 | 9.647898 | 10.12433 |

(model 1 has zero variance coefficients)

Model for group 2

| Source | SS | df | MS | Number of obs = | 232 |
|----------|------------|-----|------------|-----------------|--------|
| Model | 47.9229094 | 3 | 15.9743031 | F(3, 228) = | 37.57 |
| Residual | 96.9456734 | 228 | .425200322 | Prob > F = | 0.0000 |
| | | | | R-squared = | 0.3308 |
| | | | | Adj R-squared = | 0.3220 |
| Total | 144.868583 | 231 | .627136722 | Root MSE = | .65207 |

| LNWage | Coef. | Std. Err. | t | P> t | [95% Conf. Interval] | |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|----------|
| MYS | .1359543 | .0138396 | 9.82 | 0.000 | .1086844 | .1632242 |
| exprienc | .0077322 | .0036744 | 2.10 | 0.036 | .0004921 | .0149723 |
| mills | -1.256531 | 1.112924 | -1.13 | 0.260 | -3.449462 | .9363999 |
| _cons | 9.099465 | .2123046 | 42.86 | 0.000 | 8.681135 | 9.517794 |

Blinder-Oaxaca decomposition

| | | |
|--------------------|-----------------|--------|
| Group 1: b4_k6 = 1 | Number of obs = | 652 |
| Group 2: b4_k6 = 2 | Model = | linear |
| | N of obs 1 = | 420 |
| | N of obs 2 = | 232 |

| LNWage | Coef. | Std. Err. | z | P> z | [95% Conf. Interval] | |
|--------------|----------|-----------|--------|-------|----------------------|-----------|
| overall | | | | | | |
| group_1 | 11.16868 | .0270984 | 412.15 | 0.000 | 11.11557 | 11.2218 |
| group_2 | 10.82201 | .0522205 | 207.24 | 0.000 | 10.71966 | 10.92436 |
| difference | .3466715 | .0588328 | 5.89 | 0.000 | .2313613 | .4619818 |
| adjusted | | | | | | |
| group_1 | 11.16868 | .0270984 | 412.15 | 0.000 | 11.11557 | 11.2218 |
| group_2 | 10.84534 | .0558137 | 194.31 | 0.000 | 10.73595 | 10.95474 |
| difference | .3233401 | .0620443 | 5.21 | 0.000 | .2017355 | .4449448 |
| endowments | | | | | | |
| coefficients | .0382501 | .0350595 | 1.09 | 0.275 | -.0304653 | .1069655 |
| interaction | .294319 | .0543835 | 5.41 | 0.000 | .1877293 | .4009087 |
| | -.009229 | .0140516 | -0.66 | 0.511 | -.0367695 | .0183116 |
| endowments | | | | | | |
| MYS | .0316306 | .0375602 | 0.84 | 0.400 | -.0419861 | .1052473 |
| exprienc | .0066195 | .0090761 | 0.73 | 0.466 | -.0111693 | .0244084 |
| coefficients | | | | | | |
| MYS | -.51373 | .191425 | -2.68 | 0.007 | -.888916 | -.1385439 |
| exprienc | .0213976 | .0797002 | 0.27 | 0.788 | -.1348119 | .1776071 |
| _cons | .7866514 | .2444587 | 3.22 | 0.001 | .3075212 | 1.265782 |

```

interaction_ |
  MYS | -.0101777 .0126226 -0.81 0.420 -.0349176 .0145622
  exprienc | .0009487 .0037383 0.25 0.800 -.0063781 .0082756

```

(adjusted by mills)

. oaxaca, eform

```

Blinder-Oaxaca decomposition          Number of obs =      652
                                         Model          =      linear
Group 1: b4_k6 = 1                    N of obs 1     =      420
Group 2: b4_k6 = 2                    N of obs 2     =      232

```

| | LNWage | exp(b) | Std. Err. | z | P> z | [95% Conf. Interval] | |
|--------------|--------|----------|-----------|--------|-------|----------------------|----------|
| overall | | | | | | | |
| group_1 | | 70875.8 | 1920.624 | 412.15 | 0.000 | 67209.67 | 74741.92 |
| group_2 | | 50111.85 | 2616.865 | 207.24 | 0.000 | 45236.64 | 55512.48 |
| difference | | 1.414352 | .0832104 | 5.89 | 0.000 | 1.260314 | 1.587216 |
| adjusted | | | | | | | |
| group_1 | | 70875.8 | 1920.624 | 412.15 | 0.000 | 67209.67 | 74741.92 |
| group_2 | | 51294.78 | 2862.953 | 194.31 | 0.000 | 45979.52 | 57224.48 |
| difference | | 1.381735 | .0857288 | 5.21 | 0.000 | 1.223524 | 1.560404 |
| endowments | | 1.038991 | .0364265 | 1.09 | 0.275 | .9699941 | 1.112896 |
| coefficients | | 1.342212 | .0729942 | 5.41 | 0.000 | 1.206507 | 1.493181 |
| interaction | | .9908135 | .0139225 | -0.66 | 0.511 | .9638983 | 1.01848 |
| endowments | | | | | | | |
| MYS | | 1.032136 | .0387673 | 0.84 | 0.400 | .9588831 | 1.110985 |
| exprienc | | 1.006641 | .0091364 | 0.73 | 0.466 | .9888928 | 1.024709 |
| coefficients | | | | | | | |
| MYS | | .5982599 | .1145219 | -2.68 | 0.007 | .4111011 | .870625 |
| exprienc | | 1.021628 | .0814239 | 0.27 | 0.788 | .8738803 | 1.194356 |
| __cons | | 2.19603 | .5368387 | 3.22 | 0.001 | 1.36005 | 3.545863 |
| interaction | | | | | | | |
| MYS | | .9898739 | .0124948 | -0.81 | 0.420 | .965685 | 1.014669 |
| exprienc | | 1.000949 | .0037418 | 0.25 | 0.800 | .9936422 | 1.00831 |

(adjusted by mills)

.

Kata Pengantar

Tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa memandang atribut gender. Dengan demikian, setiap individu berhak untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya dan berhak pula untuk memilih jalan hidupnya sendiri tanpa takut mengalami diskriminasi gender. Karena tujuan mulia tersebut, maka diperlukan suatu analisis untuk memastikan kalau pembangunan yang tengah dilaksanakan tidak menguntungkan gender tertentu.

Kehadiran publikasi “Analisa Gender Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019” Ini berusaha untuk menjawab kebutuhan akan analisis dimaksud. Publikasi ini menggunakan framework (kerangka pikir) kesetaraan gender dari Bank Dunia tahun 2012 agar hasil analisis bisa lebih bermakna, dapat diterima secara teoretis, dan bisa digeneralisir. Menurut Bank Dunia, rumahtangga memegang peranan penting dalam pembangunan gender karena rumahtangga menyediakan pilihan-pilihan (*choices*), insentif (*incentives*), bahkan hambatan-hambatan (*constraints*) kepada individu. Harapannya, publikasi ini dapat menambah wawasan dan bahan diskusi mengenai pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk selama penulisan publikasi ini. Tidak ada karya yang sempurna dan luput dari kesalahan, oleh karena itu saran dan kritik membangun bagi perbaikan publikasi ini di masa depan akan diterima dengan senang hati.

Sidoarjo, April 2019

Daftar Isi

| | |
|--|-----------|
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Tabel | vi |
| Daftar Grafik | vii |
| Daftar Gambar | viii |
| Bab 1 Pendahuluan | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Tujuan | 2 |
| 1.3. Ruang Lingkup | 3 |
| 1.4. Sistematika Publikasi | 3 |
| Bab 2 Metodologi | 5 |
| 2.1. Konsep Definisi | 5 |
| 2.2. Asal Mula Ketimpangan Gender | 6 |
| 2.3. Framework Kesetaraan Gender dari Bank Dunia | 9 |
| Bab 3 Analisis Gender | 13 |
| 3.1. Karakteristik Demografi | 13 |
| 3.2. Faktor Endowment..... | 16 |
| 3.2.1. Pendidikan | 17 |
| 3.2.2. Kesehatan | 20 |
| 3.3. Faktor Kesempatan Ekonomi | 24 |
| 3.3.1. Indikator Ketenagakerjaan Ekstensif | 24 |
| 3.3.2. Indikator Ketenagakerjaan Margin Intensif | 31 |
| 3.3.3. Indikator Ketenagakerjaan tentang Produktifitas | 35 |
| 3.4. Faktor Agency | 36 |

| | |
|---|-----------|
| Bab 4 IPG dan IDG | 39 |
| 4.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 39 |
| 4.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | 42 |
| Bab 5 Kesimpulan dan Saran | 44 |
| 5.1. Kesimpulan | 44 |
| 5.2. Saran | 45 |
| Daftar Pustaka..... | 46 |
| Lampiran | 48 |

Daftar Tabel

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Rasio Ketergantungan menurut Kelompok Kesejahteraan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 15 |
| Tabel 3.2 Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin KRT dan Tingkat Kesejahteraan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (Persen) | 16 |
| Tabel 3.3. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 18 |
| Tabel 3.4. Rasio Laki-laki dan Perempuan menurut Rumpun Ilmu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 19 |
| Tabel 3.5. Indikator Ketenagakerjaan menurut Karakteristik Individu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 25 |
| Tabel 3.6. Kegiatan Seminggu Yang Lalu Istri, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 26 |
| Tabel 3.7. Karakteristik Pekerjaan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018..... | 32 |
| Tabel 3.8. Rata-rata Jam Kerja dari Seluruh Pekerjaan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 34 |
| Tabel 3.9. Rata-rata Upah Buruh per Bulan dari Pekerjaan Utama menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 35 |
| Tabel 3.10 Kepemilikan Tabungan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (Persen) | 37 |

Daftar Grafik

| | |
|--|----|
| Grafik 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 14 |
| Grafik 3.2. Angka Kesakitan (kiri) dan Angka Disabilitas (Kanan) <i>mean smoothed</i> menurut Kelompok Umur, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 22 |
| Grafik 3.3. Peluang Kematian menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 | 23 |
| Grafik 3.4. TPAK laki-laki menurut Tahun, Kabupaten Sidoarjo | 28 |
| Grafik 3.5. TPAK perempuan menurut Tahun, Kabupaten Sidoarjo | 28 |
| Grafik 3.6. Hubungan TPAK perempuan dan PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018..... | 30 |

Daftar Gambar

| | |
|---|----|
| Gambar 2.1. Framework Kesetaraan Gender dari Bank Dunia | 10 |
|---|----|

1.1. Latar Belakang

Tujuan pembangunan manusia sebagaimana termaktub dalam laporan pembangunan manusia (*Human Development Report*) tahun 1990 adalah memperbanyak pilihan-pilihan manusia sehingga setiap individu memiliki kebebasan untuk menjadi apa saja dan mencapai apa saja dalam hidup agar bermakna secara sosial. Kebebasan ini kemudian diterjemahkan dalam tiga dimensi pengukuran indeks pembangunan manusia (IPM) yakni hidup lama dan sehat, berpengetahuan, dan standar hidup layak. Diyakini, kalau seseorang mempunyai tubuh yang sehat, berpendidikan tinggi, dan standar hidup layak, maka hal-hal tersebut selanjutnya akan menjadi kapasitas pribadinya untuk mencapai kebebasan.

Tentu saja manfaat pembangunan manusia tersebut harus dapat dirasakan secara merata oleh seluruh manusia tanpa memandang atribut, apakah ia laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, hidup di kota atau di desa; semua harus merasakan manfaat dari upaya pembangunan manusia yang sedang dilakukan. Meski demikian, banyak sekali bukti-bukti yang menunjukkan bahwa individu dengan atribut tertentu menikmati manfaat pembangunan lebih besar dibanding atribut yang lain, salah satunya ketimpangan menurut jenis kelamin (gender). Kenyataan bahwa gender tertentu tidak bisa mencapai potensi maksimalnya untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan tentu menimbulkan keprihatinan semua pihak.

Sebagai contoh, pada zaman dulu perempuan sering mendapatkan diskriminasi dalam memperoleh pendidikan sebagaimana dituangkan dengan jelas oleh Kartini dalam kumpulan surat-suratnya “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Namun sekarang partisipasi sekolah perempuan di berbagai belahan dunia terus meningkat, bahkan melebihi partisipasi laki-laki. Dengan menggunakan data hasil Sensus Penduduk, Adioetomo (2005) mengkonfirmasi hal ini dengan menunjukkan bahwa jurang (*gap*) capaian pendidikan menurut jenis kelamin memang semakin menyempit.

Dalam bidang kesehatan, angka harapan hidup perempuan saat ini lebih tinggi daripada laki-laki, padahal sejarah menunjukkan bahwa angka harapan hidup laki-laki pernah melampaui angka harapan hidup perempuan (Max Roser, 2019). *Our world in data* menunjukkan bahwa rendahnya angka harapan hidup perempuan zaman dulu disebabkan oleh banyaknya perempuan yang meninggal saat melahirkan atau mengandung. Seiring perkembangan teknologi dan industrialisasi, perempuan sekarang menjadi lebih sehat saat bersalin dan mengandung, sementara laki-laki mulai melakukan kebiasaan buruk seperti merokok dan minum-minuman keras yang justru merusak kesehatannya. Akibatnya, angka harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada angka harapan hidup laki-laki.

Ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan tentu menimbulkan berbagai dampak tertentu di masyarakat. Sosiolog membuktikan bahwa ketimpangan gender akan menyebabkan perbedaan peluang dalam mendapatkan kekuatan, hak milik, dan kewibawaan (*power, property, and prestige*) (Risman, Froyum, dan Scarborough, 2018). Sementara itu, Bank Dunia meyakini bahwa ketimpangan gender akan berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (*World development Report* tahun 2012). Dengan kata lain, *if development is not engendered, it is endangered*; jika pembangunan mengabaikan aspek gender, maka aktifitas pembangunan sangat berbahaya karena pembangunan akan salah mengalokasikan sumber daya yang terbatas pada segolongan orang saja.

1.2. Tujuan

Tujuan dari penyusunan publikasi ini adalah memberi gambaran mengenai kondisi pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo. Kondisi pembangunan gender perlu dipantau karena kesetaraan gender mempunyai dua nilai/manfaat, yakni intrinsik dan instrumental. Bernilai intrinsik karena hidup yang sesuai pilihan pribadi dan terhindar dari kekurangan kebutuhan dasar tanpa melihat gender adalah hak asasi setiap manusia; kedua bernilai instrumental, artinya kesetaraan gender berkontribusi terhadap efisiensi ekonomi dan pencapaian output pembangunan lainnya.

1.3. Ruang Lingkup

Analisis pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo dalam publikasi ini akan menerapkan kerangka pikir (*framework*) yang disusun oleh Bank Dunia *Household-Centered Framework to Gender Analysis* (2012). Kerangka pikir ini secara garis besar menyatakan bahwa kesetaraan gender akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomis suatu wilayah. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan kebijakan tertentu akan mendorong kesetaraan gender. Lebih lanjut, Bank Dunia menggambarkan bahwa kesetaraan gender bersumber dari interaksi di tingkat rumahtangga, institusi formal-informal yang ada, dan kondisi pasar (*market*). Publikasi ini hanya akan membahas disparitas gender pada tingkat rumahtangga saja, yang meliputi aspek *endowments* (modal manusia), kesempatan ekonomi, dan *agency*.

Sumber data yang akan digunakan dalam analisis bersumber dari survei sosial ekonomi nasional (susenas), survei angkatan kerja nasional (sakernas), dan data/publikasi sekunder lainnya. Sebagian analisis juga akan menggunakan software AdePT modul gender yang dibuat oleh Bank Dunia. Metode dekomposisi upah menurut gender diolah menggunakan software Stata SE13.

1.4. Sistematika Publikasi

Publikasi ini tentang analisis gender di Kabupaten Sidoarjo ini akan terbagi menjadi lima bab, yakni :

Bab I Latar belakang yang berisi tentang pendahuluan, tujuan penyusunan publikasi, ruang lingkup analisis, dan sistematika publikasi

Bab II Metodologi yang akan membahas tentang konsep dan definisi dari beberapa istilah yang dipakai dalam publikasi ini dan kerangka pikir (*framework*) yang digunakan untuk analisis

Bab III Analisis Pembangunan gender pada tingkat rumahtangga dengan menggunakan *framework* yang dibangun oleh Bank Dunia. Analisis akan membahas faktor *endowment* (pendidikan dan kesehatan), faktor kesempatan ekonomi (indikator ketenagakerjaan), dan faktor *agency*.

Bab IV Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Sidoarjo yang akan membahas series kedua indeks tersebut dari tahun ke tahun

Bab V Kesimpulan dan Saran yang akan menggarisbawahi temuan dan posisi pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo

2.1. Konsep dan Definisi

Berikut ini adalah beberapa istilah yang sering digunakan dalam analisis gender sebagaimana dikutip dari laman internet Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia :

Sex adalah perbedaan-perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan.

Contoh: perempuan dapat melahirkan, laki-laki memproduksi sperma.

Gender adalah hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan. Gender merujuk pada hubungan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan, dan bagaimana hubungan sosial ini dikonstruksikan. Peran gender bersifat dinamis dan berubah antar waktu.

Kesetaraan Gender adalah hasil dari ketiadaan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atas dasar kesempatan, alokasi sumber daya atau manfaat, dan akses terhadap pelayanan.

Analisa Gender adalah metodologi untuk pengumpulan dan pengolahan informasi tentang gender. Analisa gender membutuhkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan suatu pengertian dari konstruksi sosial dari peran gender, bagaimana pembagian kerja, dan dinilai. Analisa gender adalah proses dari analisa informasi supaya menjamin manfaat dan sumberdaya pembangunan secara efektif dan adil ditujukan baik bagi laki-laki maupun perempuan. Analisa Gender digunakan juga untuk mengantisipasi dan menolak akibat negatif dari pembangunan yang mungkin terjadi pada perempuan atau karena relasi gender. Analisa gender dilakukan menggunakan bermacam alat dan kerangka kerja.

Sementara itu, merangkum definisi gender yang digunakan oleh WHO dan UNDP, pengertian gender mengacu pada karakteristik yang dikonstruksikan secara sosial dan psikologis, didefinisikan, atau ditautkan terhadap perempuan dan laki-laki seperti norma-norma, peran, relasi, hak-hak, dan kewajiban, serta

identitas yang dapat berbeda dan berubah antar masyarakat, antar lokasi, dan antar waktu. (Handayani dan Pardede, 2017, p.341).

Oleh karena itu, Handayani dan Pardede (2017) mengingatkan bahwa menganalisis data menurut jenis kelamin tidak sama dengan ulasan mengenai disparitas gender, karena yang dimaksud dengan analisis gender adalah mengulas mengapa disparitas ini terjadi. Lebih lanjut, mereka mengingatkan bahwa istilah gender bukanlah mengacu atau menggantikan istilah perempuan, tapi menggambarkan laki-laki dan perempuan.

2.2. Asal Mula Ketimpangan Gender

Kata kesetaraan dalam gender sebenarnya berasal dari terjemahan dua kata yang berbeda, yakni *equality* dan *equity*. *Equality* terkait dengan pernyataan bahwa manusia itu diciptakan setara (*equal*) tanpa memandang laki-laki atau perempuan. Dalam bahasa sederhana, ketika laki-laki mendapat satu bagian, maka perempuan juga mendapat satu bagian, atau tidak berbeda. Sementara itu, *equity* merujuk pada perlakuan yang adil dan setara berdasarkan kebutuhan. Sebagai contoh, angka kematian ibu yang sering dipakai sebagai indikator kesetaraan gender, memang tidak menggambarkan kondisi laki-laki namun merujuk pada perlakuan yang adil bagi perempuan sesuai kebutuhannya.

Secara umum penyebab disparitas gender dapat dikelompokkan dalam dua golongan besar, yakni penyebab alamiah (*nature*) dan penyebab yang dibentuk atau dikonstruksi (*nurture*). Bahasan mengenai penyebab disparitas gender ini juga dapat dilihat dari berbagai bidang ilmu, yakni biologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, dan lain sebagainya.

Dari sudut pandang biologi, laki-laki dan perempuan memang diciptakan berbeda karena secara kodrati laki-laki dan perempuan memiliki bentuk kelamin yang berbeda. Dalam perkembangan ilmu biologi, maskulinitas laki-laki dan feminitas perempuan ditentukan oleh kehadiran dua kromosom yang berbeda yakni kromosom XY untuk laki-laki dan XX untuk perempuan. Namun, penjelasan ini kemudian banyak diperdebatkan karena tiap individu sebenarnya memiliki dua kromosom ini dengan kadar yang berbeda. Dua kromosom ini terhubung dengan kerja otak yang akan menentukan bentuk tubuh dan tingkah laku

seseorang. Sayangnya, hingga saat ini para ahli biologi belum mengetahui secara pasti kadar kromosom ini dalam tubuh dan mekanisme hubungannya dengan otak sehingga seseorang bisa digolongkan maskulin atau feminin.

Psikolog membedakan gender dari sifat-sifat personalitas yang dimiliki oleh individu. Seseorang dikatakan maskulin kalau dalam dirinya terdapat sifat cerdas, berpikir strategis, dan logis. Kalau dalam diri seseorang melekat sifat penyayang, empati, dan hangat, maka ia akan dikatakan sebagai feminin. Dalam perkembangannya, disadari bahwa sifat personal bukanlah seperti dua kutub yang saling berjauhan yang dapat dibedakan secara pasti, namun sifat-sifat personal ini bisa terdapat dalam diri seseorang sekaligus dalam kadar yang berbeda (*co-vary*).

Sosiolog menyatakan bahwa gender dibentuk dari perbedaan simbol, tingkah laku, interaksi, konteks, dan pengalaman hidup sehari-hari. Interaksi memegang peranan penting dalam ilmu sosiologi karena dari interaksi akan terbentuk peran gender (*gender roles*) yang diharapkan oleh lingkungan. Konsep peran gender (*roles*), yang mengacu pada kesamaan tingkah laku individu yang diharapkan oleh masyarakat lintas tempat, waktu, atau grup, banyak dikritik karena peran gender mengabaikan unsur kekuatan (*power*) dan keunggulan (*privilege*). Perempuan memang diharapkan berperan sebagai ibu dalam rumah tangga, namun konsep peran gender tidak menaruh perhatian pada kuasa perempuan dalam rumah tangga dan kelebihan/keunggulan sebagai ibu.

Dalam karyanya yang terkenal, West dan Zimmerman (1987) kemudian memperkenalkan konsep *doing gender*. Menurut mereka, tingkat maskulinitas dan feminitas diukur dari apa yang individu lakukan. Laki-laki yang memasak dan membantu merawat buah hati bisa dikategorikan sebagai feminin, sebaliknya perempuan yang bekerja bisa digolongkan sebagai maskulin. Dalam bahasa populernya, *to claim a sex category, we do gender*. Para sosiolog mengakui bahwa bukan atribut gender saja yang menyebabkan disparitas kesempatan antar individu, namun atribut-atribut lain turut memperparahnya (*intersectional theory*), misalnya kemiskinan, minoritas, dan lainnya. Dalam perkembangannya, sosiolog menggolongkan kategori sex bukan hanya laki-laki

dan perempuan saja, namun juga seseorang dengan kondisi antara laki-laki dan perempuan dengan kehadiran *queer theory*.

Dalam ilmu ekonomi, disparitas gender antara laki-laki dan perempuan dapat dijelaskan oleh model modal manusia dan model segmentasi pasar kerja. Fokus dari model modal manusia adalah isu ketenagakerjaan, dimana perbedaan penghasilan laki-laki dan perempuan disebabkan oleh kepemilikan modal manusia yang berbeda, misalnya pendidikan. Sementara itu menurut model segmentasi pasar kerja, pasar kerja laki-laki dan perempuan memang berbeda, dimana laki-laki cenderung bekerja di sektor utama (*primary*) dengan jabatan yang lebih tinggi, sementara perempuan bekerja di sektor kedua (*secondary*) dengan jabatan dan upah yang lebih rendah.

Sumber-sumber disparitas menurut ekonom juga dapat diterangkan oleh beberapa teori berikut : *taste discrimination theory* oleh Gary Backer (1957), *statistical differences in characteristics*, dan *overcrowding theory*. Menurut Backer, diskriminasi upah yang diterima oleh laki-laki dan perempuan dapat dipahami dari asal diskriminasi : dari sisi pengusaha, dari sisi pekerja, dan dari sisi pembeli. Dari sisi pengusaha, diskriminasi terjadi jika pengusaha memiliki dugaan tentang kelebihan pekerja laki-laki dibanding perempuan sebelumnya. Dari sisi pekerja, laki-laki membutuhkan upah lebih tinggi jika harus bekerja dengan kolega perempuan. Dari sisi pembeli, jika pembeli lebih tertarik pada produk yang dijual oleh gender tertentu maka akan terjadi disparitas gender.

Statistical discrimination menyatakan bahwa ketika laki-laki atau perempuan yang memiliki kualitas yang sama dan menginginkan pekerjaan yang sama, meski pengusaha tidak memiliki dugaan terhadap jenis kelamin tertentu, tapi dia mengetahui bahwa perempuan cenderung memiliki waktu bekerja lebih sedikit karena tanggung jawabnya dalam mengurus rumah tangga, maka perempuan akan cenderung dikeluarkan sebagai kandidat terbaik.

Menurut teori *overcrowding*, jika perempuan bekerja di tempat yang kelebihan penawaran atau kurang diminati, maka upah perempuan akan lebih rendah daripada laki-laki apapun lapangan pekerjaan atau tingkat produktifitasnya.

2.3. Framework Kesetaraan Gender dari Bank Dunia

Bank Dunia mengamati bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan memang terjadi di sebagian besar dunia dalam berbagai dimensi sosial dan ekonomi sepanjang siklus hidup. Kadang-kadang perbedaan ini berakibat buruk bagi laki-laki, namun sebagian besar membawa dampak kurang baik bagi perempuan. Disparitas antara laki-laki dan perempuan ini merupakan akibat dari interaksi yang kompleks pada tingkatan rumahtangga, pasar, dan institusi.

Salah satu cara untuk menggambarkan interaksi yang kompleks antara rumahtangga, pasar, dan institusi yang berakibat pada ketimpangan gender adalah dengan mengetahui bagaimana suatu rumahtangga berfungsi. Pada tingkat rumahtangga, kita akan mengetahui jenis kelamin apa yang menyerap pengeluaran paling besar khususnya untuk pendidikan dan kesehatan, apakah laki-laki atau perempuan yang menjalankan tugas dan kewajiban tertentu, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut selanjutnya akan mengakibatkan ketimpangan gender yang terjadi secara umum di masyarakat.

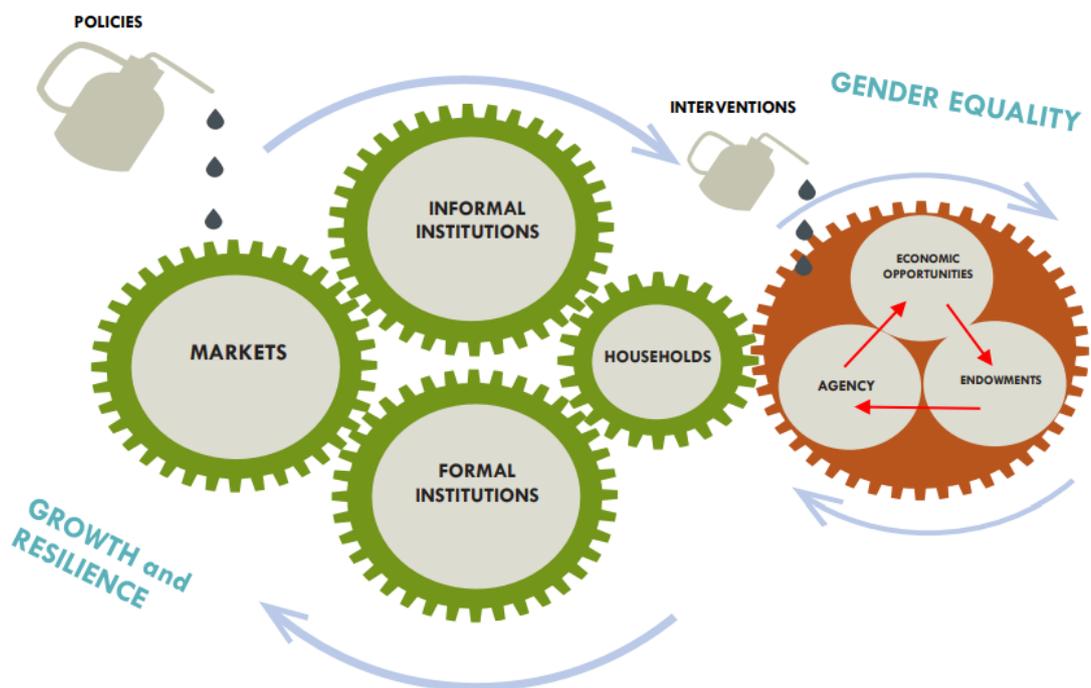
Tentu saja pilihan pembelanjaan dalam rumahtangga untuk gender tertentu dipengaruhi oleh norma-norma sosial, insentif pasar, dan institusi formal. Norma-norma sosial yang memberi perhatian lebih pada gender tertentu akan mempengaruhi alokasi belanja rumahtangga pada gender tersebut. Insentif pasar juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat tentang gender, misal lapangan kerja tertentu membutuhkan lulusan pendidikan tertentu dan jenis kelamin tertentu, maka salah satu jenis kelamin akan menikmati keuntungan lebih tinggi. Selanjutnya, institusi formal yang biasanya melahirkan aturan-aturan berdasarkan ideologi dominan tentang gender di masyarakat secara pasti akan mempengaruhi keluaran pembangunan gender.

Bank Dunia menempatkan rumahtangga pada titik tengah perhatian, karena rumahtangga merupakan tempat membuat pilihan-pilihan (*choices*), menyediakan insentif (*incentives*), atau hambatan (*constraints*). Preferensi dibentuk oleh peran gender, norma-norma sosial, dan jejaring sosial (dalam *framework* diberi label *informal institutions*). Insentif sebagian besar dipengaruhi oleh pasar (meliputi pasar tenaga kerja, pasar barang, kredit, dan tanah) yang menentukan pengembalian atas keputusan dan investasi yang

dibuat oleh rumahtangga. Hambatan muncul sebagai akibat interplay dari *formal institutions* dan *informal institutions*.

Pada tingkat rumahtangga, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat dari tiga faktor yakni faktor endowment, faktor kesempatan ekonomi, dan faktor agency. *Agency* didefinisikan dengan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan merubahnya menjadi aksi/aktifitas dan output yang diinginkan.

Gambar 2.1. Framework Kesetaraan Gender dari Bank Dunia



Sumber : World Development Report Tahun 2012

Market atau pasar adalah tatanan yang memungkinkan penjual dan pembeli saling tukar barang atau jasa yang tunduk pada aturan tertentu. *Formal institutions* atau institusi formal adalah segala aspek yang memungkinkan berlangsungnya suatu negara, meliputi hukum, aturan, dan mekanisme yang mengatur penyediaan jasa bagi warga negara. *Informal social institutions* atau institusi sosial informal meliputi mekanisme, aturan, dan prosedur yang mengatur interaksi sosial namun tidak berkaitan dengan berfungsinya suatu negara.

Sebagaimana gambar di atas, kesetaraan gender yang besar akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditunjukkan oleh arah panah. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga akan meningkatkan kesetaraan gender jika disertai dengan kebijakan-kebijakan tertentu.

Framework Kesetaraan Gender Bank Dunia dibentuk berdasar pada teori ekonomi *household labor supply model* dan *the intrahousehold decision model (bargaining model)*. Kedua model ini lebih dekat dengan *taste model* yang ada dalam ilmu ekonomi dari Gary Becker (1957) yang telah diterangkan di atas.

Asumsi dari model *household labor supply* adalah pertama, rumahtangga melakukan produksi barang kebutuhan rumahtangga dari bahan baku yang dibeli di pasar namun tergantung dari waktu yang dimiliki. Oleh karena itu, penggunaan waktu terbagi untuk : a) bekerja di pasar kerja, b) produksi barang kebutuhan rumahtangga di rumah, c) bersantai. Asumsi kedua, sebagian besar rumahtangga memiliki lebih dari satu orang dewasa. Asumsi ketiga, ada dimensi waktu yang harus diperhatikan. Model ini dapat digunakan untuk menerangkan beberapa fenomena antara lain meningkatnya partisipasi angkatan kerja perempuan, menurunnya tingkat kelahiran, dan meningkatnya investasi pendidikan anak perempuan.

Sebagai contoh adalah meningkatnya partisipasi kerja perempuan di pasar kerja. Dengan memperoleh upah, dia bisa mengalihdayakan (-*outsources*) tugas-tugas mengurus rumahtangga, atau membagi tugas rumahtangga dengan suami seiring meningkatnya posisi rebut tawarnya (*bargaining position*) dalam rumahtangga. Dengan demikian, perempuan masih bisa membagi waktunya dengan bekerja di pasar kerja, mengurus rumahtangga, dan menikmati waktu santainya. Kehadiran teknologi alat-alat rumahtangga juga akan menyediakan insentif lanjutan bagi perempuan untuk bekerja di luar rumah karena tugas-tugas rumahtangga cepat selesai.

Berbeda dengan model yang pertama, model *the intrahousehold decision* mengasumsikan bahwa keputusan dalam rumahtangga dibuat bersama oleh anggota rumahtangga. Dalam mengambil keputusan bersama, kekuatan budget dan harga relatif akan mempengaruhi “kekuatan” masing-masing anggota rumahtangga, dimana kedua hal tersebut dipengaruhi oleh faktor *endowment*

(modal manusia dan sumber produktif), norma sosial, dan aturan legal setempat. Oleh karena itu, model ini disebut juga *collective model*. Tentu saja, model ini berbeda dengan *unitary model solutions* dan *individual optimal choices*.

Menurut *unitary model solution*, dalam berbagai kesempatan percobaan, jika terjadi transfer masuk dalam rumahtangga dan penerimanya adalah perempuan, maka dia akan mengalokasikan transfer tersebut untuk kesehatan dan pendidikan, sementara jika penerimanya adalah laki-laki maka uang tersebut lebih cenderung dibelanjakan untuk kebutuhan laki-laki. Hipotesis ini kemudian banyak disanggah, yang kemudian disusul oleh *intrahousehold model* yang mengatakan bahwa bagaimana anggaran rumahtangga akan dibelanjakan tergantung dari kekuatan (*power*) dari perempuan dalam rumahtangga. Oleh karena itu, muncullah framework Bank Dunia Tahun 2012.

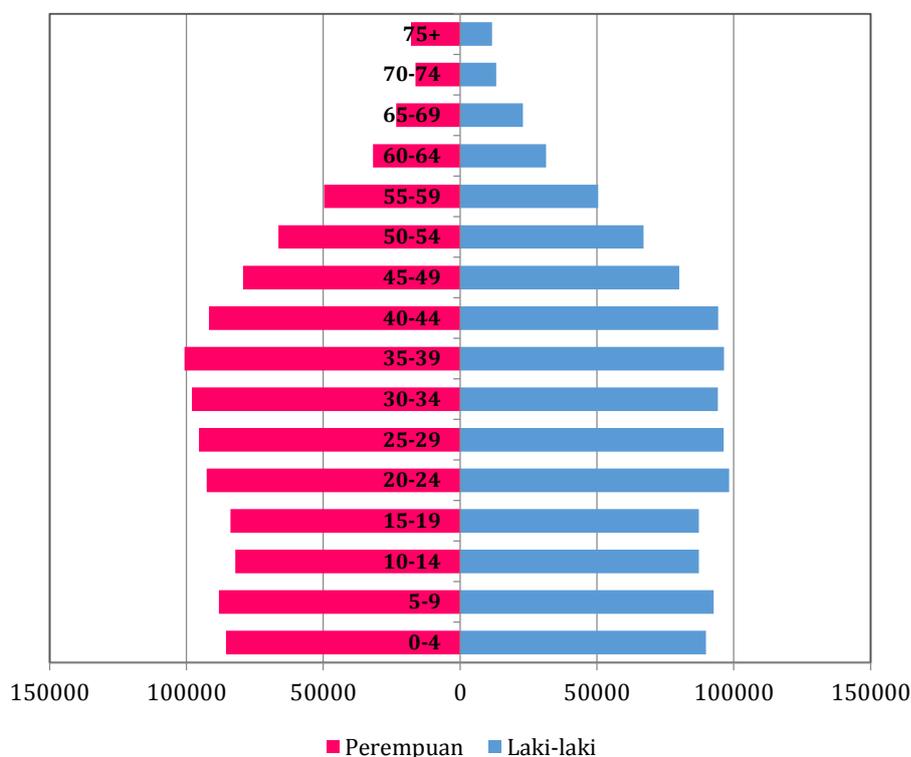
Tujuan dari pembuatan publikasi ini adalah memberikan gambaran mengenai kondisi pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo. Deskripsi ini akan membahas tiga faktor dalam rumahtangga yang menurut Bank Dunia akan menghasilkan kesetaraan gender di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi, yakni faktor *endowment*, faktor kesempatan ekonomi, dan faktor *agency* (kemampuan membuat pilihan untuk mencapai hasil yang diinginkan). Meski demikian, deskripsi lengkap akan diawali dengan bahasan mengenai karakteristik demografi laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sidoarjo.

3.1. Karakteristik Demografi

Analisis tentang pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo akan diawali dengan pembahasan distribusi penduduk menurut karakteristik demografi, yakni kelompok umur, jenis kelamin kepala rumahtangga, tingkat kesejahteraan, dan angka ketergantungan. Pembahasan distribusi gender menurut karakteristik demografi menjadi sangat penting untuk memastikan apakah keberadaan perempuan telah representatif atau masih termarginalkan dalam karakteristik demografi tertentu. Keberadaan perempuan yang marginal biasanya akan memperparah tingkat kesenjangan gender yang terjadi, atau disebut *intersection*.

Sebaran penduduk menurut kelompok umur sering ditampilkan dalam bentuk piramida penduduk. Selain menampilkan struktur penduduk menurut kelompok umur, piramida penduduk juga mampu mendeteksi mengenai hilangnya (*missing*) jenis kelamin tertentu. Piramida penduduk Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 dapat dilihat pada grafik 3.1. berikut.

Grafik 3.1. Piramida Penduduk Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018



Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

Secara umum terlihat bahwa penduduk laki-laki dan perempuan Kabupaten Sidoarjo hampir seimbang yang mengindikasikan tidak adanya penduduk jenis kelamin tertentu yang hilang (*missing*). Bank Dunia mencatat hilangnya jenis kelamin tertentu ini dapat disebabkan oleh perbedaan paparan terhadap resiko kesehatan, seperti aborsi selektif untuk jenis kelamin tertentu, kematian yang berlebihan semisal peperangan, atau kematian ibu yang akut. Seimbangny jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sidoarjo menunjukkan tidak adanya kejadian tertentu yang beresiko terhadap kesehatan penduduk.

Rasio jenis kelamin menurut kelompok umur berkisar antara 95 hingga 105. Sebelum usia 60 tahun, rasio jenis kelamin di Kabupaten Sidoarjo lebih dari 100 yang menunjukkan jumlah penduduk laki-laki lebih besar daripada penduduk perempuan. Namun, rasio ini kemudian turun drastis setelah usia 60 tahun dibawah angka 80 yang mengindikasikan lebih panjangnya kelangsungan hidup perempuan dibanding laki-laki. Hal ini dikuatkan dengan tingginya angka

harapan hidup perempuan dibanding laki-laki sehingga jumlah lansia perempuan tentunya lebih banyak dibanding lansia laki-laki. Sementara itu, tingginya penduduk laki-laki pada usia produktif di Kabupaten Sidoarjo sering dikaitkan dengan fenomena migrasi masuk sehubungan dengan peran Sidoarjo sebagai penyangga perkembangan industri Kota Surabaya.

Ukuran demografi lain yang menggunakan karakteristik umur adalah rasio ketergantungan. Dari sisi demografi, ukuran ini dimaksudkan untuk melihat potensi rumahtangga dalam menghasilkan pendapatan. Jika suatu rumahtangga memiliki lebih banyak anggota usia produktif daripada non produktif (anak-anak dan lansia), maka rumahtangga tersebut diharapkan mempunyai sumber penghasilan yang cukup untuk menanggung beban anggota rumahtangga yang non produktif. Penduduk usia produktif didefinisikan sebagai penduduk pada kelompok umur 15-64, anak-anak berumur 0-14, dan lansia berumur 65+.

Tabel 3.1. Rasio Ketergantungan menurut Kelompok Kesejahteraan dan Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Kelompok Kesejahteraan | Jenis Kelamin | |
|------------------------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) |
| Pendapatan Rendah | 45,27 | 45,72 |
| Pendapatan Menengah | 36,66 | 35,28 |
| Pendapatan Tinggi | 35,17 | 27,50 |

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

Tabel 3.1. menunjukkan rasio ketergantungan menurut tingkat kesejahteraan dan jenis kelamin. Secara umum terlihat bahwa semakin tinggi tingkat kesejahteraan maka rasio ketergantungan semakin rendah. Hal ini menunjukkan bahwa pada rumahtangga yang telah sejahtera, jumlah anggota rumahtangga (ART) non produktif yang harus ditanggung oleh ART produktif semakin sedikit. Hal ini selanjutnya akan memberi kesempatan kepada ART produktif untuk menumpuk kekayaan. Hal ini berlaku baik laki-laki maupun perempuan.

Karakteristik demografi selanjutnya adalah komposisi penduduk menurut jenis kelamin kepala rumahtangga (KRT). Sekitar 89 persen kepala rumahtangga

di Sidoarjo berjenis kelamin laki-laki dan sisa 11 persennya berjenis kelamin perempuan. Ketiadaan *male breadwinner* pada rumahtangga yang dikepalai perempuan membuat rumahtangga ini tergolong rentan karena memiliki keterbatasan untuk mengakses sumber daya. Meski demikian, interpretasi terhadap angka ini memerlukan kehati-hatian mengingat kepala rumahtangga perempuan bisa juga terbentuk karena keberadaan suami yang bekerja di luar daerah.

Penduduk yang tinggal di rumahtangga yang dikepalai perempuan juga tidak proporsional. Banyaknya perempuan yang tinggal di rumah tangga jenis ini sejumlah 14 persen, lebih banyak dibandingkan laki-laki yang hanya berjumlah 7 persen. Ketimpangan gender biasanya lebih parah pada jenis rumahtangga yang dikepalai oleh perempuan daripada jenis rumahtangga yang dikepalai oleh laki-laki. Dilihat dari tingkat kesejahteraan, komposisi penduduk laki-laki dan perempuan untuk tiap tingkat kesejahteraan hampir sama dan merata, yakni sekitar 20 persen untuk tiap kuantil pengeluaran.

Tabel 3.2. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin KRT dan Tingkat Kesejahteraan, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (Persen)

| Karakteristik Rumahtangga | Jenis Kelamin | | |
|---------------------------|---------------|-----------|-------|
| | Laki-laki | Perempuan | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Jenis Kelamin KRT | | | |
| Laki-laki | 92,60 | 85,60 | 89,10 |
| Perempuan | 7,40 | 14,40 | 10,90 |
| Tingkat Kesejahteraan | | | |
| Kuintil Terendah | 19,60 | 20,00 | 20,00 |
| Kuintil 2 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Kuintil 3 | 19,70 | 20,00 | 19,90 |
| Kuintil 4 | 21,00 | 19,20 | 20,10 |
| Kuintil Tertinggi | 19,70 | 20,40 | 20,00 |

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

3.2. Faktor Endowment

Menurut framework kesetaraan gender Bank Dunia (2012), ketika tingkat pendapatan suatu negara meningkat, maka hal ini akan berpengaruh pada faktor

endowment penduduknya, terutama tingkat pendidikan. Orang tua dulu yang hanya mengirim anak laki-lakinya sekolah, maka kini anak perempuan juga mempunyai kesempatan yang sama untuk bersekolah. Jika *endowment* terutama tingkat pendidikan perempuan meningkat, maka perempuan bisa berkontribusi terhadap pendapatan keluarga.

Selanjutnya, permintaan jasa pendidikan yang besar oleh rumahtangga akan memaksa pemerintah (*formal institutions*) untuk menyediakan pendidikan yang murah dan berkualitas. Hal ini tentu saja akan mengurangi biaya pendidikan yang harus ditanggung rumahtangga, baik biaya langsung maupun tidak langsung, serta biaya kesempatan (*opportunity cost*). Meningkatnya tingkat pendidikan perempuan ini selanjutnya akan direspon oleh pasar dengan memberi upah yang lebih tinggi.

Bagian ini akan membahas disparitas faktor *endowment* dalam rumahtangga yang kemudian diterjemahkan oleh ekonom kepada modal manusia yang meliputi pendidikan dan kesehatan.

3.2.1. Pendidikan

Modal manusia pertama yang akan dibahas adalah partisipasi sekolah. Menurut Bank Dunia (2012), partisipasi sekolah mengandung nilai investasi dan nilai instrumental yang akan menentukan perbedaan kesempatan di masa depan. Yang dimaksud nilai investasi adalah seseorang yang bersekolah cenderung akan mempunyai kesehatan yang baik dan pekerjaan yang layak. Selanjutnya, yang dimaksud mengandung nilai instrumental adalah seseorang yang bersekolah relatif mempunyai tingkat pendapatan yang lebih baik. Oleh karena itu, disparitas pada modal manusia (terutama pendidikan) akan memperparah dan mengekalkan kesenjangan gender yang ada.

Tak lupa, perempuan yang berpendidikan relatif mampu memutus kesenjangan gender bagi generasi berikutnya. Perempuan berpendidikan akan mampu membuat keputusan yang baik tentang alokasi belanja bagi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anaknya. Selanjutnya, anak-anak ini akan tumbuh menjadi pekerja yang produktifitasnya tinggi di kemudian hari dan

memperoleh pendapatan yang lebih baik, bahkan menjadi calon ibu yang sehat dan hebat.

Tabel 3.3. Angka Partisipasi Sekolah menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Partisipasi Sekolah | Jenis Kelamin | | |
|---------------------------------|---------------|-----------|--------|
| | Laki-laki | Perempuan | Total |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Angka Partisipasi Sekolah (APS) | | | |
| 7-12 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13-15 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 16-18 | 86,09 | 86,34 | 86,23 |
| Angka Partisipasi Kasar (APK) | | | |
| SD | 104,54 | 107,87 | 106,20 |
| SMP | 96,72 | 107,04 | 101,41 |
| SMA | 121,73 | 105,85 | 112,98 |
| Angka Partisipasi Murni (APM) | | | |
| SD | 98,50 | 100,00 | 99,25 |
| SMP | 87,27 | 92,57 | 89,68 |
| SMA | 74,35 | 66,83 | 70,21 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Tabel 3.3 menunjukkan partisipasi sekolah menurut jenis kelamin di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2018 seluruh penduduk usia 7-12 dan 13-15 tahun saat itu tengah bersekolah yang ditunjukkan oleh angka partisipasi sekolah (APS). APS yang mencapai 100 menunjukkan keterbukaan peluang untuk bersekolah di Kabupaten Sidoarjo tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini jelas menunjukkan ketiadaan kesenjangan gender dalam dunia pendidikan, padahal pada masa dulu perempuan mempunyai keterbatasan akses dalam dunia pendidikan. Beberapa sebab meningkatnya partisipasi sekolah perempuan adalah program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah, imbal balik pendidikan yang semakin besar, dan meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk.

Mengenai angka partisipasi kasar (APK), indikator ini berguna untuk melihat adanya murid yang belum cukup umur atau lebih umur namun tengah bersekolah di jenjang pendidikan tertentu. Dengan kata lain, sekolah di

Kabupaten Sidoarjo mampu menampung murid lebih banyak daripada target. Tabel 3.3 menunjukkan bahwa nilai APK untuk semua jenjang baik untuk laki-laki maupun perempuan lebih dari 100, kecuali untuk laki-laki di jenjang SMP. Hal ini menunjukkan keberadaan penduduk usia sekolah yang memasuki jenjang pendidikan tertentu lebih telat atau terlalu cepat dibanding teman sebayanya. Perempuan cenderung terlalu cepat memasuki SD dan SMP yang ditunjukkan oleh tingginya APK untuk kedua jenjang pendidikan tersebut.

Indikator angka partisipasi murni (APM) menunjukkan proporsi penduduk usia sekolah yang bersekolah tepat waktu. Secara umum, semakin tinggi jenjang pendidikan semakin rendah nilai APM. Hal ini menunjukkan adanya fenomena murid bersekolah tidak sesuai umur pada tahun-tahun sebelumnya. Selisih nilai yang positif antara APK dan APM mengindikasikan kejadian telat masuk jenjang pendidikan tertentu atau mengulang atau drop out.

Tabel 3.4. Rasio Laki-laki dan Perempuan menurut Rumpun Ilmu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Rumpun Ilmu | Rasio Laki-laki/Perempuan |
|-----------------------|----------------------------------|
| (1) | (2) |
| Ilmu Agama | 0,97 |
| Ilmu humaniora | 0,40 |
| Ilmu Sosial | 0,60 |
| Ilmu Alam | 1,18 |
| Ilmu Formal | 2,85 |
| Ilmu Terapan | 1,00 |
| Kesehatan& Pendidikan | 0,58 |
| Teknik dan Mesin | 1,82 |
| Lainnya | 1,85 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Meski disparitas partisipasi sekolah antara laki-laki dan perempuan semakin mengecil, namun stereotipe gender dalam bidang pendidikan masih tetap terjadi. Tabel 3.4 menunjukkan rasio laki-laki dan perempuan (L/P) dalam hal jurusan pendidikan yang diambil saat kuliah. Jika rasio bernilai tepat 1, maka jumlah laki-laki dan perempuan yang mengambil jurusan tersebut hampir sama. Namun, jika rasio bernilai kurang dari 1, maka jurusan tersebut mempunyai

mahasiswa perempuan lebih banyak. Sebaliknya, jika rasio bernilai lebih dari 1, maka sebagian besar muridnya adalah laki-laki.

Dari tabel 3.4 di atas terlihat bahwa jurusan ilmu agama, humaniora (seni dan sastra), dan ilmu sosial (ekonomi& sosial politik) menarik lebih banyak mahasiswa perempuan. Sementara itu, jurusan ilmu alam (fisika, kimia, biologi) dan ilmu formal (matematika, Teknologi Informasi), lebih banyak menarik perhatian mahasiswa laki-laki. Secara garis besar, ilmu terapan memiliki mahasiswa laki-laki dan perempuan yang hampir seimbang. Namun, kalau diteliti lebih jauh dalam rumpun ilmu terapan, perempuan lebih terkonsentrasi ke bidang pendidikan dan kesehatan daripada laki-laki yang lebih senang ke bidang tehnik dan mesin.

Perbedaan kemampuan kognitif antara laki-laki dan perempuan telah menarik perhatian banyak peneliti. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa laki-laki memiliki keunggulan dalam bidang matematis dan *visuospatial*, sementara perempuan memiliki keunggulan dalam hal mengingat dan berbicara, namun tidak ada perbedaan diantara keduanya dalam hal kefasihan berbicara (*fluency*) (Oksuzyan, Doblhammer, dan Guma, 2018 p.68). Namun, seiring membaiknya perekonomian dan terbukanya akses pendidikan, diperkirakan kemampuan kognitif antara laki-laki dan perempuan akan semakin membaik dan tidak berbeda.

3.2.2. Kesehatan

Tingkat kesehatan laki-laki dan perempuan harus diakui memang berbeda. Ada setidaknya tiga faktor yang mempengaruhi disparitas kesehatan dan kelangsungan hidup antara laki-laki dan perempuan, yakni faktor hormonal dan genetika, faktor yang berhubungan dengan gaya hidup, dan faktor sosial (Oksuzyan, Doblhammer, dan Guma, 2018).

Penelitian yang ada menunjukkan bahwa hormon perempuan (estrogen) memberi keuntungan dalam hal pemberian proteksi kekebalan tubuh. Dengan hormon tersebut, perempuan relatif lebih kebal terhadap penyakit menular daripada laki-laki, setidaknya jika laki-laki dan perempuan sakit dengan penyebab yang sama, maka sakit laki-laki lebih parah dibanding perempuan.

Begitu pula dengan reaksi terhadap vaksinasi, kekebalan tubuh perempuan akan lebih kuat dibanding reaksinya terhadap tubuh laki-laki. Hal ini selanjutnya akan menentukan perbedaan tingkat kesakitan dan kematian antara laki-laki dan perempuan (Oksuzyan, Doblhammer, dan Guma, 2018 p.78).

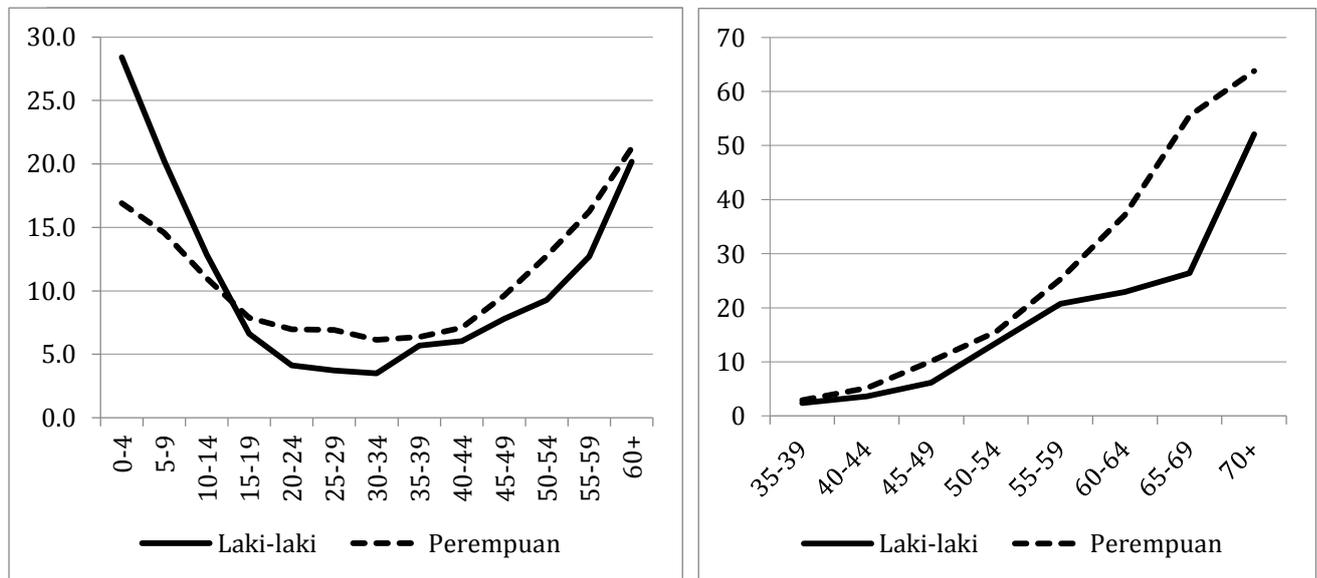
Dalam hal kromosom, sebagaimana diketahui bahwa tubuh laki-laki mengandung kromosom XY dan tubuh perempuan mengandung kromosom XX. Dalam satu kromosom X terkandung 1100 gen yang berhubungan dengan proses fisiologis dan satu kromosom Y terkandung kurang dari 100 gen yang akan menentukan jenis kelamin laki-laki. Keberadaan dua kromosom X dalam tubuh perempuan tentu memberi kekebalan tubuh lebih kuat terkait dengan penyakit yang berhubungan dengan kromosom X-seperti hemophilia A. Tambahan lagi, setengah gen dari kromosom X pada perempuan bersifat aktif dan setengahnya lagi bersifat non aktif, sementara pada laki-laki seluruh gen pada kromosom X bersifat aktif. Hal ini juga meningkatkan resiko laki-laki terhadap paparan penyakit yang disebabkan oleh kromosom X dibanding perempuan. Hal ini kemudian memberi keuntungan kesehatan lebih kepada perempuan daripada laki-laki secara biologis.

Dalam faktor gaya hidup, kebiasaan merokok dan minum-minuman keras jelas membedakan tingkat kesehatan antara laki-laki dan perempuan. Kebiasaan perempuan untuk mengatur pola makannya dengan asupan makanan sehat dan bergizi jelas menguntungkan perempuan, sementara laki-laki yang melakukan hal yang sama dianggap kurang maskulin. Kebiasaan olahraga perempuan yang kontinyu sepanjang hidupnya juga memberi manfaat lebih pada perempuan, sementara aktifitas olahraga pada laki-laki biasanya terhenti setelah dewasa. Hal ini disebabkan motivasi laki-laki untuk berolahraga memang untuk prestasi dan menunjukkan kekuatan fisiknya, sementara untuk perempuan memang cenderung untuk menjaga kesehatan.

Penjelasan dari sisi sosial, tingkat pendidikan jelas memberi pengaruh positif terhadap tingkat kesehatan dalam hal kemudahan akses terhadap pengetahuan untuk menjaga kesehatan dan akses terhadap jaminan kesehatan. Tingkat kesehatan juga berbeda antara pengangguran dan pekerja, yang berupah/gaji tinggi dengan yang lebih rendah meski temuan ini mungkin

mengandung *selection bias*. Maksudnya adalah sebenarnya bukan status menganggur/bekerja yang membedakan tingkat kesehatan seseorang, tapi secara logika kondisi sehat memungkinkan seseorang (terseleksi) untuk bekerja.

Grafik 3.2. Angka Kesakitan (kiri) dan Angka Disabilitas (Kanan) *mean smoothed* menurut Kelompok Umur, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018



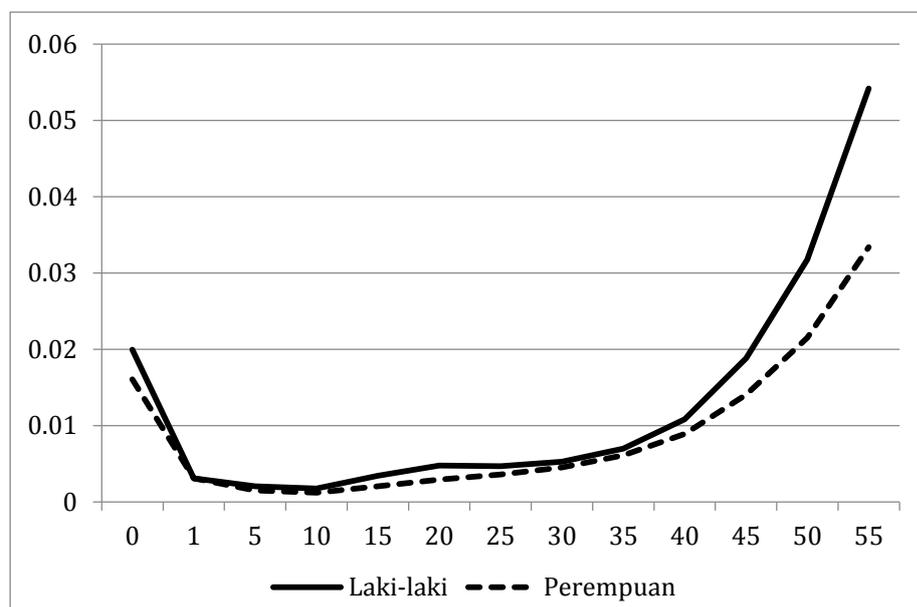
Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

Dari grafik 3.2 di atas terlihat bahwa tingkat kesehatan laki-laki dan perempuan bervariasi menurut kelompok umur. Pada kelompok umur muda proporsi laki-laki yang sakit dan terganggu kegiatannya lebih besar dibanding perempuan. Menginjak umur remaja hingga lansia, angka kesakitan perempuan lebih besar dibanding laki-laki. Beberapa alasan mengapa angka kesakitan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki adalah pertama, perempuan cenderung memiliki kondisi kronis pada fungsi tubuhnya sementara laki-laki memiliki kondisi kronis yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya, seperti penyakit jantung, dan lainnya. Alasan kedua adalah perempuan dianggap lebih mengetahui kondisi kesehatan tubuhnya dan laki-laki enggan untuk memeriksakan kesehatannya ke dokter atau mengakui kelemahan tubuhnya sendiri (Oksuzyan, Doblhammer, dan Guma, 2018).

Pola yang sama ditemui untuk angka disabilitas menurut kelompok umur, dimana proporsi perempuan yang menyandang disabilitas relatif lebih tinggi dibanding laki-laki pada setiap kelompok umur. Disabilitas di Susenas

menggunakan konsep *Activities of Daily Living* (ADL) atau keterbatasan dalam melakukan aktifitas sehari-hari, seperti naik tangga, menggerakkan jari, berkomunikasi, mengurus diri sendiri, dan lainnya. Menurut Verbrugge dan Jette (1994), analisis disabilitas sebaiknya dilakukan pada usia dewasa atau lansia sebagai akibat berkurangnya fungsi tubuh (*disablement process*) daripada usia anak-anak yang kemungkinan disebabkan oleh banyak hal. Ternyata, sumber disabilitas di Kabupaten Sidoarjo sebagian besar bersumber pada gangguan/ kesulitan untuk melihat dan naik tangga.

Grafik 3.3. Peluang Kematian menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018



Sumber : Angka Harapan Hidup, diolah dengan program Mortpak aplikasi MATCH model New Coale-Demeny West

Tingginya angka disabilitas pada perempuan ini bukan berarti laki-laki memiliki kondisi kesehatan yang lebih prima. Sebagaimana terlihat pada grafik 3.3 di atas, probabilitas kematian untuk laki-laki selalu lebih tinggi daripada perempuan yang mengindikasikan besarnya peluang laki-laki untuk meninggal pada setiap kelompok umur. Sebagai konsekuensi logis, umur harapan hidup perempuan pada saat ini lebih tinggi daripada laki-laki. Namun umur panjang perempuan tersebut menjadi kurang bermakna jika harus disertai dengan penurunan fungsi tubuh/disabilitas. Oleh karena itu, perhatian memang layak diberikan kepada perempuan yang secara matematis mempunyai umur lebih panjang, namun mereka juga memiliki proporsi disabilitas yang lebih besar.

3.3. Faktor Kesempatan Ekonomi

Dalam hal kesempatan ekonomi, arah sebaliknya dari framework Bank Dunia akan digunakan. Dalam rumahtangga, jika alokasi waktu yang digunakan perempuan untuk mengurus rumahtangga lebih banyak daripada laki-laki; dan institusi formal melakukan segregasi/pengelompokan pekerjaan berdasar gender & abai dengan aturan dan infrastruktur bagi perempuan; serta pasar sendiri membuat diskriminasi berdasar gender, maka hal ini akan menghalangi seseorang dengan gender tertentu untuk meraup kesempatan ekonomi.

Faktor kesempatan ekonomi biasanya dilihat dari indikator-indikator ketenagakerjaan. Keputusan seseorang untuk menangkap kesempatan ekonomi yang ada biasanya dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain : (1) keberadaan anak kecil, untuk melihat beban keluarga, (2) tingkat pendidikan, untuk menangkap imbal balik dari investasi modal manusia, (3) umur, untuk melihat siklus hidup, seperti kelahiran. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai anak kecil, mempunyai tingkat pendidikan tinggi, dan sedang tidak mengandung/melahirkan cenderung akan menangkap kesempatan ekonomi yang tersedia.

Kesempatan ekonomi dibagi menjadi 4 kategori, yakni ekstensif, margin intensif, produktifitas, dan akses kepada sumber daya. Keempat kategori tersebut secara komprehensif akan memberi gambaran mengenai pasar kerja suatu daerah. Indikator ketenagakerjaan yang bersifat ekstensif meliputi partisipasi angkatan kerja dan pengangguran, sementara itu yang termasuk margin intensif adalah jam kerja dan jenis pekerjaan. Produktifitas biasanya diukur dengan upah buruh.

3.3.1. Indikator Ketenagakerjaan Ekstensif

Indikator ketenagakerjaan yang bersifat ekstensif meliputi partisipasi angkatan kerja dan pengangguran. Kedua indikator ini berfungsi untuk melihat sejauh mana penyerapan pasar kerja seiring bertambahnya penduduk usia kerja. Dalam konteks Indonesia, penduduk usia kerja ini secara demografi didefinisikan sebagai penduduk berusia 15-64 tahun. Dalam bahasa lain, penduduk usia kerja ini biasanya disebut sebagai tenaga kerja (*manpower*).

Partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar kerja, baik aktif bekerja maupun aktif mencari kerja. Penduduk usia kerja yang bekerja ini selanjutnya disebut pekerja dan penduduk usia kerja yang mencari kerja disebut penganggur. Untuk melihat seberapa besar porsi penduduk usia kerja yang benar-benar aktif dalam pasar kerja, maka indikator ketenagakerjaan yang biasa dipakai adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK).

Tabel 3.5. Indikator Ketenagakerjaan menurut Karakteristik Individu, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Karakteristik Individu | TPAK | | % Pekerja | | TPT | | BAK | |
|------------------------|-------|-------|-----------|-------|------|------|-------|-------|
| | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr | Lk | Pr |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Status Perkawinan | | | | | | | | |
| Belum Kawin | 59,22 | 42,31 | 51,05 | 34,81 | 8,18 | 0,08 | 40,78 | 57,69 |
| Kawin | 90,99 | 52,26 | 89,14 | 51,69 | 1,85 | 0,01 | 9,01 | 47,74 |
| Cerai Hidup | 92,31 | 91,72 | 92,31 | 91,72 | 0,00 | 0,00 | 7,69 | 8,28 |
| Cerai Mati | 57,95 | 40,44 | 57,95 | 40,44 | 0,00 | 0,00 | 42,05 | 59,56 |
| Tingkat Pendidikan | | | | | | | | |
| Tidak Sekolah | 60,18 | 36,35 | 60,18 | 36,35 | 0,00 | 0,00 | 39,82 | 63,65 |
| SD | 71,41 | 38,13 | 68,75 | 38,13 | 2,66 | 0,00 | 28,59 | 61,87 |
| SMP+SMA | 79,32 | 47,59 | 74,65 | 45,44 | 4,67 | 0,02 | 20,68 | 52,41 |
| >SMA | 87,73 | 72,89 | 85,57 | 68,03 | 2,16 | 0,05 | 12,27 | 27,11 |
| Kelompok Umur | | | | | | | | |
| 15-24 | 41,23 | 34,49 | 32,46 | 26,92 | 8,77 | 0,08 | 58,77 | 65,51 |
| 25-34 | 96,11 | 65,32 | 91,43 | 63,62 | 4,68 | 0,02 | 3,89 | 34,68 |
| 35-44 | 97,40 | 57,94 | 95,05 | 57,08 | 2,35 | 0,01 | 2,60 | 42,06 |
| 45-54 | 95,98 | 56,09 | 93,74 | 56,09 | 2,24 | 0,00 | 4,02 | 43,91 |
| 55-59 | 47,78 | 22,65 | 47,33 | 22,65 | 0,45 | 0,00 | 52,22 | 77,35 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Keterangan :

TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka

BAK : Bukan Angkatan Kerja

Lk : Laki-laki

Pr : Perempuan

Secara sederhana, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dihitung dengan rumus jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia kerja.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, syarat tergabung dalam angkatan kerja adalah penduduk harus aktif dalam pasar kerja, baik sebagai pekerja maupun penganggur. Sebagai konsekuensi, penduduk yang tidak aktif dalam pasar kerja, meliputi anak sekolah, ibu rumahtangga, dan lainnya, akan dikategorikan sebagai bukan angkatan kerja (BAK).

Tabel 3.5. di atas menunjukkan indikator ketenagakerjaan yang bersifat ekstensif menurut karakteristik individu. Mengenai partisipasi kerja menurut status perkawinan, partisipasi terendah terdapat pada penduduk yang belum kawin dan cerai mati, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Rendahnya partisipasi kerja pada penduduk *single/bujangan* ini kemungkinan disebabkan oleh belum adanya tanggung jawab dalam keluarga dan sifatnya yang masih mencari-cari pekerjaan yang cocok. Sementara itu, status cerai mati biasanya terjadi pada usia tua sehingga mereka tidak bisa berpartisipasi dalam pasar kerja dan hanya menerima transfer dari anggota rumahtangga yang lain atau sumber lainnya.

Tabel 3.6. Kegiatan Seminggu Yang Lalu Istri, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Tingkat Kesejahteraan | Jenis Kegiatan | | |
|-----------------------|----------------|----------------------|---------|
| | Bekerja | Mengurus Rumahtangga | Lainnya |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Bawah | 35,2 | 63,0 | 1,8 |
| Menengah | 36,9 | 62,9 | 0,2 |
| Atas | 53,1 | 46,7 | 0,2 |

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

Menyandang status kawin, partisipasi kerja laki-laki meningkat pesat sebagai tanggung jawab laki-laki menyediakan nafkah bagi keluarga. Sementara itu, partisipasi perempuan hanya naik sedikit yang kemungkinan disebabkan oleh kesibukan perempuan untuk mengurus rumahtangga, misal mengurus anak atau orang tua jompo, sebagaimana diterangkan oleh model *household labor supply* di atas. Meski demikian, perlu penelitian lanjutan untuk menjawab mengapa partisipasi perempuan relatif rendah saat kawin. Dugaan bahwa fenomena ini disebabkan oleh penghasilan suami yang sudah lebih dari cukup sepertinya kurang mendapat dukungan bukti empiris. Hasil Susenas Tahun

2018 menunjukkan bahwa perempuan yang berstatus sebagai istri cenderung untuk bekerja seiring meningkatnya tingkat kesejahteraan, sebagaimana ditunjukkan oleh tabel 3.6 di atas.

Dilihat dari tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka partisipasi angkatan kerja Sidoarjo semakin meningkat, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa insentif untuk bekerja semakin meningkat seiring meningkatnya tingkat pendidikan. Dengan terjun ke pasar kerja, seseorang akan mempunyai kesempatan untuk menerapkan pengetahuan dan ketrampilan yang telah diperolehnya dan memperoleh penghasilan (imbal balik) dari investasi pendidikan yang telah dilakukannya.

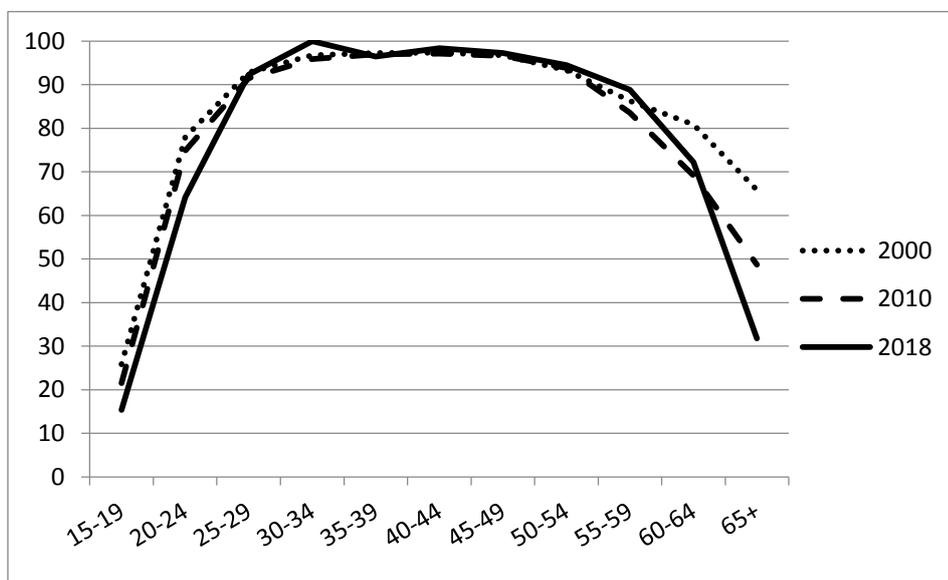
Pada umumnya, laki-laki yang berpendidikan tinggi akan menikah dengan perempuan yang berpendidikan tinggi (teori *assortive matching*). Dengan kondisi imbal balik (*rate of return*) yang semakin tinggi seiring meningkatnya tingkat pendidikan di Indonesia, maka menikah dengan orang yang berpendidikan tinggi akan menambah pendapatan dalam keluarga. Dengan demikian, menikah dengan laki-laki berpendidikan tinggi akan memberi peluang kepadanya untuk keluar dari pasar kerja. Namun faktanya tidak demikian, TPAK perempuan berpendidikan tinggi di Sidoarjo justru meningkat dibanding perempuan yang berpendidikan rendah. Hal ini sekaligus menolak dugaan bahwa perempuan Sidoarjo akan keluar dari pasar kerja jika pendapatan suami sudah lebih dari cukup.

Dilihat dari segi usia, partisipasi kerja terendah terdapat pada kelompok umur muda dan kelompok umur tua. Pada kelompok umur muda, pemuda masih mencoba-coba pekerjaan yang cocok sehingga mereka sering berganti-ganti pekerjaan dan mencari-cari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan keahliannya. Sementara pada umur tua, penduduk usia ini sudah mulai memasuki masa pensiun sehingga keluar dari pasar kerja. Dilihat secara grafik, angka partisipasi ini akan menunjukkan kurva huruf U terbalik, baik untuk laki-laki maupun perempuan (lihat grafik 3.4 dan grafik 3.5 di bawah ini).

Dari tahun ke tahun, pola grafik TPAK laki-laki relatif hampir sama dimana pada umur muda partisipasi bekerjanya rendah kemudian meningkat

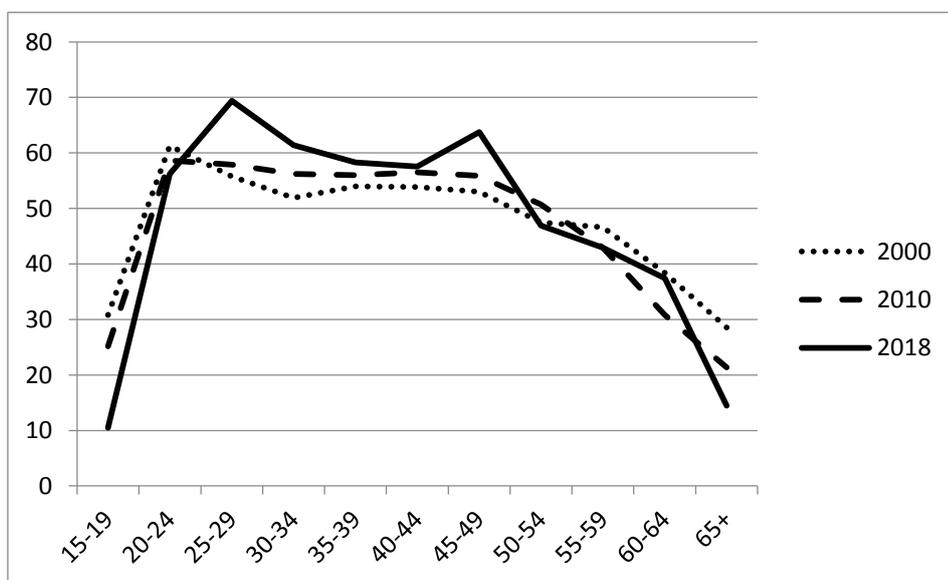
seiring bertambahnya usia hingga mencapai puncak kemudian turun perlahan. Pola yang sama juga terlihat pada grafik TPAK perempuan. Perbedaan grafik TPAK dari tahun ke tahun biasanya terlihat pada kelompok umur muda dan kelompok umur tua. Pada kelompok umur muda, angka partisipasi kerja biasanya cenderung menurun seiring meningkatnya akses terhadap pendidikan. Pada kelompok umur tua, angka partisipasi kerja diperkirakan terus menurun sejalan dengan membaiknya jaminan hari tua sehingga lansia tidak perlu bekerja lagi di hari tuanya sebagaimana lansia yang lalu.

Grafik 3.4. TPAK laki-laki menurut Tahun, Kabupaten Sidoarjo



Sumber : BPS, SP2000, SP2010, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Grafik 3.5. TPAK perempuan menurut Tahun, Kabupaten Sidoarjo



Sumber : BPS, SP2000, SP2010, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Ada hal menarik jika grafik TPAK perempuan Sidoarjo dicermati lebih jauh. Meski TPAK cenderung turun pada umur muda dan umur tua, namun pada umur-umur diantara keduanya TPAK perempuan Sidoarjo sebenarnya relatif meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya (lihat grafik 3.5). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Sidoarjo sebenarnya ingin terlibat dalam pasar kerja meski keterlibatannya tidak sebesar laki-laki. Setidaknya ada dua hal yang menghalangi keterlibatan perempuan dalam pasar kerja, yaitu alokasi waktu dalam pekerjaan rumahtangga dan faktor siklus hidup seperti perkawinan dan melahirkan.

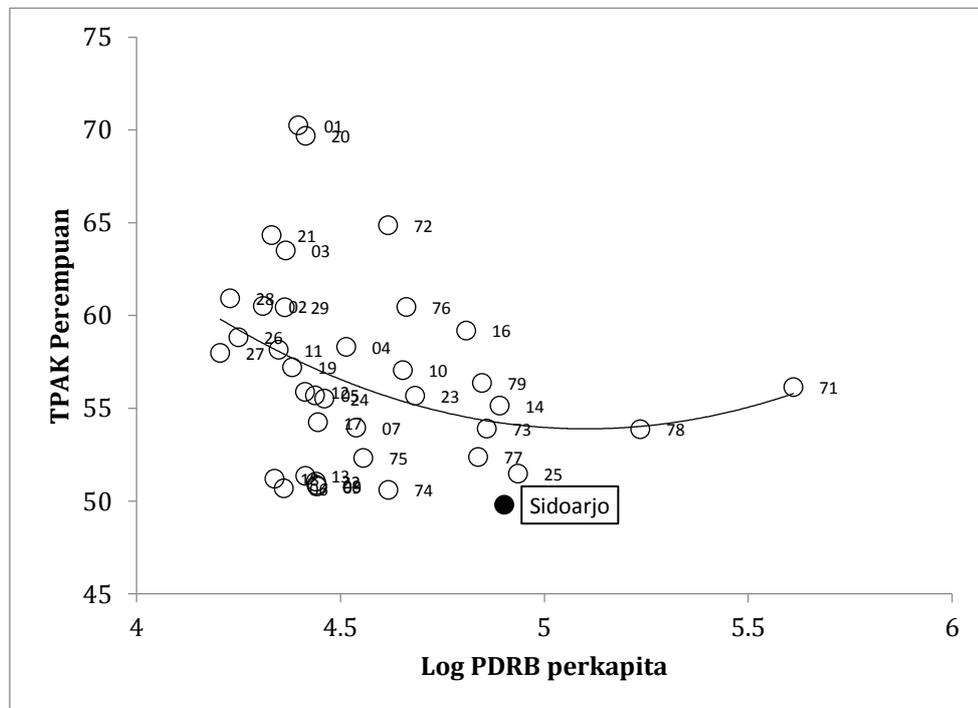
Grafik TPAK Sidoarjo mencapai puncaknya pada usia 25-29 kemudian menurun sesudahnya dan naik lagi pada usia 45-49. Keberadaan dua puncak pada grafik TPAK Perempuan Sidoarjo sebenarnya jamak terjadi di wilayah lain. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan Sidoarjo sempat tergabung dalam pasar kerja sebelum menikah dan melahirkan. Ketika anak-anak sudah besar, perempuan Sidoarjo akan kembali tergabung dalam pasar kerja dan partisipasinya ini akan terus menurun seiring bertambahnya usia.

Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja menurut ahli ekonomi berhubungan dengan besarnya PDRB suatu daerah. Hubungan antara partisipasi kerja perempuan dan perkembangan ekonomi ini akan berbentuk huruf U sesuai dengan hipotesis Goldin (1995) yang menyatakan bahwa partisipasi kerja perempuan biasanya relatif tinggi pada daerah-daerah yang didominasi oleh sektor pertanian sebagai pekerja tak dibayar atau pekerja keluarga. Seiring perkembangan sektor industri yang memproduksi barang-barang komersial dengan teknologi baru, maka partisipasi kerja perempuan akan menurun. Dengan membaiknya struktur industri dan munculnya sektor jasa, maka partisipasi kerja perempuan akan meningkat kembali.

Goldin (1995) menambahkan partisipasi kerja perempuan yang rendah di negara-negara berkembang bisa disebabkan oleh faktor urbanisasi dan produksi barang non pertanian untuk komersial. Sayangnya, lapangan kerja ini tidak bisa menyerap banyak tenaga kerja perempuan sebagaimana di sektor pertanian. Untuk bisa berpartisipasi lagi dalam lapangan kerja non pertanian, tingkat pendidikan perempuan perlu ditingkatkan lebih dari pendidikan dasar. Pada

pendapat yang lain, menurunnya partisipasi kerja perempuan bisa disebabkan oleh diskriminasi gender, terbatasnya fisik perempuan, kesulitan menyeimbangkan peran pekerja dan ibu rumah tangga, dan kondisi sosial budaya setempat.

Grafik 3.6. Hubungan TPAK perempuan dan PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018



Sumber : BPS

Pada tahun 2018 partisipasi kerja perempuan Sidoarjo sedang berada pada posisi paling rendah dari kurva U meski sektor industri tengah berkembang sebagaimana terlihat pada grafik 3.6. Merujuk pada hipotesis Goldin di atas, hal ini mungkin disebabkan oleh preferensi pengusaha akan tenaga kerja laki-laki karena kekuatan fisiknya, kesulitan perempuan untuk mengalokasikan waktu bagi pekerjaan di sektor industri dan tugas kerumahtanggaan, dan rendahnya tingkat pendidikan perempuan.

Beralih ke tingkat pengangguran, ketimpangan gender dalam tingkat pengangguran dijelaskan oleh bank Dunia sebagai berikut. Kondisi pertama, perempuan biasanya menghadapi tantangan yang luar biasa dalam menemukan pekerjaan dibanding laki-laki karena jejaring sosial yang terbatas dan keterbatasan informasi. Selain itu, perempuan juga lebih pilih-pilih pekerjaan karena karena harus menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan tanggung

jawab di rumah. Alasan lain, perempuan juga biasanya memilih pekerjaan yang sesuai dengan norma, stereotipe, bahkan prasangka gender, dibandingkan dengan pertimbangan penghasilan atau kecocokan pekerjaan (*job match*). Hal ini mengakibatkan tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dan durasi mencari pekerjaan menjadi lebih lama. Di lain pihak, jika perempuan merasa putus asa setelah mencari pekerjaan yang lama, maka mereka cenderung keluar dari pasar kerja. Jika kondisi ini lebih kuat daripada kondisi pertama sebagaimana diuraikan di atas, maka tingkat pengangguran perempuan biasanya lebih rendah dan partisipasi perempuan ikut rendah.

Tampak dari tabel 3.5 bahwa tingkat pengangguran laki-laki selalu lebih besar daripada perempuan. Dengan memperhatikan angka pengangguran perempuan Sidoarjo yang rendah dan partisipasi bekerjanya juga rendah, tampaknya kondisi yang terakhir yang lebih cocok untuk menerangkan kondisi kesempatan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo. Bahwa perempuan kesulitan mencari pekerjaan yang pas dengan kewajibannya mengurus rumahtangga sepertinya lebih pas untuk menerangkan mengapa partisipasi kerja perempuan Sidoarjo relatif rendah.

3.3.2. Indikator Ketenagakerjaan Margin Intensif

Margin intensif digunakan untuk melihat intensitas kerja dari pekerja yang diwakili oleh dua indikator, yakni jenis pekerjaan dan jumlah jam kerja. Kedua jenis indikator ini berfungsi untuk menampilkan sejauh mana keterlibatan pekerja dalam pekerjaan.

Dilihat dari lapangan pekerjaan, porsi laki-laki yang bekerja di sektor sekunder dan sektor jasa hampir sama (tabel 3.7). Sementara itu, pekerjaan perempuan lebih terkonsentrasi ke sektor jasa. Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, perempuan cenderung bekerja di sektor jasa yang lebih membutuhkan ketelitian, ketelatenan, dan kesabaran. Pekerjaan di sektor jasa juga menawarkan jam kerja yang lebih fleksibel kepada perempuan yang memungkinkan mereka untuk menyeimbangkan waktu antara bekerja dan mengurus rumahtangga.

Ada perbedaan sistematis antara pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan, baik dalam hal tipe pekerjaan, lapangan usaha, jabatan, dan lain-lain. Istilah *employment segregation* atau *occupational segregation* merujuk pada konsentrasi yang tidak seimbang antara laki-laki atau perempuan pada lapangan pekerjaan tertentu. Misalnya perempuan terkonsentrasi pada sektor jasa sementara laki-laki bekerja di sektor sekunder. Perempuan lebih suka menjadi guru, perawat, tenaga penjualan, dan tenaga jasa lainnya. Sementara laki-laki banyak bekerja di sektor konstruksi dan transportasi. Perempuan juga lebih suka pekerjaan yang tidak membutuhkan waktu lama atau fleksibel karena harus menyesuaikan dengan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.

Tabel 3.7. Karakteristik Pekerjaan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Karakteristik | Jenis Kelamin | |
|----------------------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) |
| Jenis Kegiatan | | |
| Bekerja | 75,37 | 47,64 |
| Pengangguran | 3,95 | 2,15 |
| Bukan Angkatan Kerja | 20,68 | 50,21 |
| Jam Kerja | | |
| Paruh Waktu | 8,30 | 19,40 |
| Penuh Waktu | 91,70 | 80,60 |
| Lapangan Usaha | | |
| Primer | 5,30 | 1,50 |
| Sekunder | 47,40 | 34,40 |
| Tersier | 47,30 | 64,10 |
| Status Pekerja | | |
| Formal | 76,00 | 71,70 |
| Informal | 24,00 | 28,30 |
| Status Pekerjaan | | |
| Berusaha | 22,70 | 30,40 |
| Buruh | 69,20 | 59,60 |
| Pekerja Bebas | 6,60 | 2,00 |
| Pekerja Keluarga | 1,50 | 8,00 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Employment segregation bisa diawali dari stereotipe gender. Stereotipe gender ini mempunyai pengaruh yang bersifat deskripsi, “what is” dan preskripsi/ rekomendasi, “what should” (Risman, 2018). Dalam bahasa sederhana, perempuan sering digambarkan dengan pribadi yang lembut, telaten, sabar, bahkan sentimentil; inilah makna “*what is*”, apa itu perempuan. Ketika perempuan digambarkan dengan kondisi seperti di atas, maka pekerjaan yang cocok bagi perempuan adalah perawat, guru, *customer service*; ini adalah makna “*what should*”, apa yang cocok bagi perempuan. Adanya stereotipe gender ini tidak hanya merugikan perempuan, tapi juga laki-laki, karena akan menghalangi kedua gender untuk bekerja dan berkarya di bidang pekerjaan yang lain.

Dilihat dari jam kerja, sekitar 90 persen lebih laki-laki memiliki jam kerja penuh waktu dibanding perempuan yang hanya sekitar 80 persen. Secara ekonomi, jam kerja yang relatif sedikit akan menghalangi perempuan untuk mengumpulkan pendapatan lebih banyak. Oleh karena itu, kondisi ini bisa juga diartikan telah terjadi kesenjangan gender, namun kadang kondisi seperti ini merupakan kondisi yang diharapkan oleh perempuan. Dengan jam kerja yang lebih pendek, perempuan mempunyai keleluasaan untuk menyeimbangkan peran antara pekerja dan ibu rumah tangga. Meski demikian, persentase laki-laki dan perempuan yang bekerja di sektor formal maupun informal jumlahnya hampir sama. Untuk diperhatikan, sektor formal/ informal dan pekerja formal/informal ini mempunyai definisi yang berbeda.

Dirinci menurut status pekerjaan, sebagian besar laki-laki dan perempuan bekerja dengan status sebagai buruh, masing-masing sebesar 69 persen dan 60 persen. Meski demikian, perempuan mempunyai porsi yang relatif lebih besar pada status pekerja keluarga dan pekerja mandiri. Padahal kedua status ini tergolong sebagai pekerja rentan karena sebagian besar tidak mempunyai jaring pengaman sosial, seperti asuransi kesehatan, jaminan kecelakaan, dan jaminan pensiun. Tiga status pekerjaan, pekerja mandiri, pekerja keluarga, dan pekerja bebas, sering dikelompokkan menjadi pekerja informal. Pekerja informal ini diyakini muncul sewaktu-waktu saat terjadi goncangan ekonomi sebagai strategi bertahan (*coping strategy*), namun dalam jangka panjang semua orang menginginkan berstatus sebagai pekerja formal.

Berlanjut ke jumlah jam kerja, jam kerja laki-laki relatif lebih lama daripada jam kerja perempuan, sebagaimana terlihat pada tabel 3.8 berikut. Hanya satu pengecualian, jam kerja perempuan yang bersatus sebagai pekerja keluarga lebih lama hampir dua kali lipat dibanding jam kerja laki-laki (masing-masing 40 jam dan 28 jam). Meski memiliki jam kerja lebih lama, berstatus sebagai pekerja keluarga membuat penghasilan perempuan tidak terlalu besar atau hampir tidak ada.

Jam kerja perempuan di sektor informal juga relatif sangat rendah dibanding laki-laki. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kadang bekerja di sektor informal dengan jam kerja sedikit merupakan pilihan perempuan untuk menyeimbangkan perannya sebagai pekerja dan ibu rumahtangga. Sebagaimana dimaklumi, bekerja dan mengurus rumahtangga membutuhkan alokasi waktu tersendiri yang saling menggantikan karena keduanya tidak bisa dilakukan secara bersamaan (*incompatible*).

Tabel 3.8. Rata-rata Jam Kerja dari Seluruh Pekerjaan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Karakteristik | Jenis Kelamin | |
|------------------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) |
| Jam Kerja | | |
| Paruh Waktu | 4,0 | 3,0 |
| Penuh Waktu | 51,0 | 50,0 |
| Lapangan Usaha | | |
| Primer | 46,0 | 44,0 |
| Sekunder | 47,0 | 42,0 |
| Tersier | 50,0 | 45,0 |
| Status Pekerja | | |
| Formal | 48,0 | 44,0 |
| Informal | 21,0 | 9,0 |
| Status Pekerjaan | | |
| Berusaha | 49,0 | 44,0 |
| Buruh | 48,0 | 44,0 |
| Pekerja Bebas | 51,0 | 41,0 |
| Pekerja Keluarga | 28,0 | 40,0 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Dilihat dari lapangan usaha, pekerja sektor jasa mencurahkan waktu relatif lebih banyak daripada sektor primer maupun sektor sekunder. Perlu diketahui, ILO menggolongkan pekerja yang bekerja diatas 50 jam seminggu sebagai pekerja *overtime* (ILO, 2016). Bekerja dengan jam kerja berlebih akan berdampak pada kesehatan pribadi (jasmani dan mental) dan kehidupan sosialnya. Tabel 3.8 memperlihatkan bahwa laki-laki yang bekerja di sektor tersier atau berstatus sebagai pekerja bebas sering mempunyai jam kerja berlebih. Selain itu, baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja penuh waktu juga cenderung bekerja *overtime*.

3.3.3. Indikator Ketenagakerjaan tentang Produktifitas

Upah secara ekonomi merupakan balas jasa pengusaha kepada pekerja atas produktifitasnya dalam bekerja. Semakin tinggi tingkat produktifitas seseorang, maka upah yang diterimanya haruslah sama besar. Oleh karena itu, besaran upah dapat digunakan untuk mengukur produktifitas pekerja. Dalam sakernas, upah buruh terdiri atas upah uang dan upah barang. Dalam publikasi ini, upah yang dimaksud adalah penjumlahan keduanya dan hanya untuk pekerja yang berstatus sebagai buruh.

Tabel 3.9. Rata-rata Upah Buruh per Bulan dari Pekerjaan Utama menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

| Karakteristik | Jenis Kelamin | |
|----------------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) |
| Jam Kerja | | |
| Paruh Waktu | 2.667.827 | 1.517.063 |
| Penuh Waktu | 3.714.465 | 3.066.746 |
| Lapangan Usaha | | |
| Primer | 3.264.366 | - |
| Sekunder | 3.538.077 | 2.877.420 |
| Tersier | 3.884.025 | 2.922.254 |
| Total | 3.681.076 | 2.902.114 |

Sumber : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tahun 2018

Dari tabel 3.9 di bawah ini terlihat bahwa upah laki-laki per bulan sekitar 3,6 juta rupiah dan upah perempuan per bulan sekitar 2,9 juta rupiah. Diantara

keduanya, terdapat perbedaan upah sebesar 700 ribu atau sebesar 19,44 persen. Namun selisih dalam bentuk persentase ini masih kasar (*raw gender wage gap*) karena belum mempertimbangkan variabel tingkat pendidikan dan ketrampilan. Selanjutnya, dilihat menurut jenis pekerjaan dan lapangan usaha, upah laki-laki per bulan selalu lebih tinggi daripada upah perempuan.

Perbedaan besaran upah tersebut selanjutnya dapat didekomposisi untuk mengetahui sumber perbedaan, apakah berasal dari faktor endowment atau faktor diskriminasi. Dalam ilmu ekonomi, metode yang paling sering digunakan untuk mengetahui perbedaan upah menurut gender adalah metode dekomposisi Oaxaca-Blinder. Untuk mengetahui peranan faktor endowment, dua indikator yang digunakan adalah tingkat pendidikan yang diwakili oleh rata-rata lama sekolah dan pengalaman kerja yang dihitung dengan rumus *umur-lama sekolah-usia masuk sekolah*.

Hasil dekomposisi metode Oaxaca-Blinder dengan two step Heckman menunjukkan bahwa selisih upah antara laki-laki dan perempuan sebesar 30,86 persen (lihat lampiran 2). Dari 30,86 persen perbedaan tersebut, yang dapat dijelaskan dengan faktor endowment hanya sebesar 12,44 persen dan sisa 87,56 persen disebabkan oleh faktor diskriminasi. Setidaknya ada dua alasan mengapa perempuan diupah rendah oleh perusahaan, pertama adanya stereotipe gender sebagaimana telah dijelaskan di atas. Kedua, hak-hak pekerja perempuan, seperti hak cuti haid dan hak melahirkan, dianggap merugikan perusahaan (Priyono, 2015).

3.4. Faktor Agency

Di berbagai wilayah perempuan sering tidak mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan, baik pada tingkat rumahtangga, komunitas, bahkan masyarakat. Pada tingkatan rumahtangga, ketidakmampuan perempuan tersebut sering berakhir pada kekerasan rumahtangga. Beberapa hal yang mempengaruhi kekuatan perempuan untuk menyuarakan aspirasinya adalah pendapatan dan kontrol terhadap aset rumahtangga. Penelitian membuktikan perempuan dari kalangan atas relatif mempunyai agency dibanding perempuan

dari kalangan bawah. Namun, sebenarnya faktor yang paling berpengaruh adalah pendapatan dari perempuan itu sendiri.

Pada tingkatan masyarakat, perempuan sering diasosiasikan dengan ketidakmampuannya untuk memimpin. Hal ini tentunya akan merugikan perempuan karena masyarakat tidak akan mampu menilai dengan jelas kapasitas perempuan. Kondisi ini secara nyata tercermin pada keterwakilan perempuan di parlemen. Kurangnya wakil perempuan di parlemen ini mungkin juga disebabkan oleh kurangnya jejaring yang dimiliki perempuan karena sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengurus rumah tangga.

Sayangnya, sedikit sekali survei pada tingkat rumah tangga yang berusaha mengukur agency perempuan dalam rumah tangga. Dalam publikasi ini, agency akan diwakili oleh indikator kepemilikan rekening tabungan bagi penduduk usia 15 tahun ke atas. Dengan memiliki rekening tabungan atas nama sendiri, maka seseorang mempunyai kemampuan untuk melakukan kontrol dan belanja atas uang yang dimiliki.

Tabel 3.10. Kepemilikan Tabungan menurut Jenis Kelamin, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 (Persen)

| Karakteristik | Jenis Kelamin | |
|-----------------------|---------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) |
| Tingkat Kesejahteraan | | |
| Bawah | 26,4 | 16,6 |
| Menengah | 43,8 | 36,2 |
| Atas | 67,0 | 61,4 |
| Tingkat Pendidikan | | |
| SD ke bawah | 30,60 | 22,11 |
| SMP+SMA | 48,07 | 38,23 |
| Diploma+ | 90,64 | 82,39 |
| Total | 41,6 | 33,5 |

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018

Sebagaimana terlihat pada tabel 3.10 di atas, penduduk dari kalangan atas relatif memiliki rekening tabungan daripada penduduk dari kalangan bawah, baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan. Demikian pula jika dirinci

menurut tingkat pendidikan, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka ia cenderung memiliki rekening tabungan di bank. Secara umum, persentase laki-laki yang memiliki rekening tabungan lebih besar daripada perempuan.

Publikasi ini bertujuan untuk memberi gambaran pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo. Bab sebelumnya telah membahas tiga faktor dalam rumahtangga yang akan menghasilkan kesetaraan gender di masyarakat, yakni faktor endowment, faktor kesempatan ekonomi, dan faktor agency. Meski demikian, tetap diperlukan suatu indikator tunggal yang akan memudahkan semua pihak untuk menilai perkembangan pembangunan gender. Indikator tersebut adalah Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.

4.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender atau *Gender Development Index (GDI)* merupakan indeks komposit yang dibangun dari beberapa variabel untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender. Penghitungan IPG sebenarnya hampir sama dengan penghitungan IPM tetapi disesuaikan dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Oleh karena itu, dimensi yang digunakan dalam pengukuran IPG sama persis dengan dimensi IPM, yakni dimensi kesehatan, dimensi pengetahuan, dan dimensi standar hidup layak. Pembaca yang tertarik dengan metodologi penghitungan IPG lebih detail dapat melihat lampiran 1.

Dimensi kesehatan digambarkan oleh Usia Harapan Hidup, dimensi pengetahuan diwakili oleh harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan dimensi standar hidup layak diukur dari pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Dengan mengamati indikator-indikator pembentuk masing-masing dimensi, terlihat bahwa memang terdapat perbedaan capaian antara laki-laki dan perempuan. Angka harapan hidup perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, masing-masing 75,54 tahun dan 71,78 tahun. Pada dimensi pengetahuan, rata-rata lama sekolah laki-laki lebih tinggi dari perempuan, yaitu 10,77 tahun dan 9,70 tahun untuk jenis kelamin yang bersesuaian. Untuk lebih jelasnya,

besaran masing-masing indikator pembentuk IPG dapat dilihat pada tabel 4.1. berikut.

Tabel 4.1. Indikator-indikator Pembentuk IPG dan pertumbuhannya, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2018

| Indikator | 2015 | | 2017 | | 2018 *) | |
|---|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) |
| Proporsi penduduk (%) | 50,24 | 49,24 | 50,24 | 49,76 | 50,25 | 49,75 |
| Dimensi Umur Panjang dan Sehat | | | | | | |
| Angka Harapan Hidup (e ⁰ /Tahun) | 70,99 | 74,94 | 71,78 (1,11) | 75,54 (0,80) | 71,89 (0,15) | 75,66 (0,16) |
| Dimensi Pengetahuan | | | | | | |
| Harapan Lama Sekolah / EYS (Tahun) | 13,61 | 14,14 | 14,37 (5,58) | 14,28 (0,99) | 14,80 (2,99) | 14,66 (2,66) |
| Rata-Rata Lama Sekolah/ MYS (Tahun) | 10,63 | 9,64 | 10,77 (1,32) | 9,70 (0,62) | 10,78 (0,09) | 9,71 (0,10) |
| Dimensi Kehidupan yang Layak | | | | | | |
| Pengeluaran Perkapita (Juta) | 17,91 | 12,56 | 19,05 (6,37) | 13,23 (5,33) | 19,67 (3,25) | 13,64 (3,09) |
| IPM menurut Gender | 80,93 | 76,30 | 82,85 | 77,32 | 83,66 | 78,08 |
| IPG | 94,28 | | 93,325 | | 93,330 | |

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Keterangan :

- IPG Tahun 2016 tidak disajikan karena Sakernas tidak dilaksanakan untuk penghitungan angka ketenagakerjaan tingkat kabupaten/kota
- Angka dalam tanda kurung () merupakan pertumbuhan dibanding tahun sebelumnya dalam persen

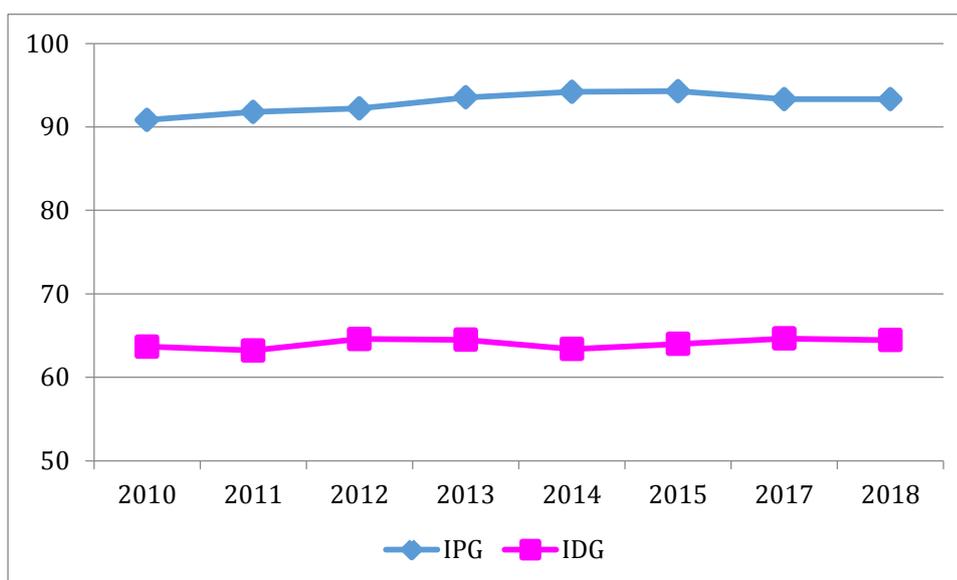
*) Angka sementara

Nilai IPG=100 memberikan gambaran bahwa hasil pembangunan antara laki-laki dengan perempuan sudah setara. Sebaliknya jika angka IPG semakin jauh dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk

menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

IPG Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sebesar 93,33; angka IPG ini lebih tinggi daripada capaian angka IPG Jawa Timur yang sebesar 90,77. IPG Sidoarjo tahun 2018 juga meningkat sangat tipis dibanding tahun 2017 yang sebesar 0,005 poin. Melihat tren perkembangan angka IPG Kabupaten Sidoarjo dalam kurun waktu enam tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik 4.1, angka IPG Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2012 hingga 2018 mengalami fluktuasi dalam kisaran sempit. Untuk diketahui, IPG tahun 2016 tidak bisa disajikan karena survei angkatan kerja nasional (Sakernas) tidak jadi dilaksanakan karena penghematan anggaran oleh pemerintah.

Grafik 4.1. IPD dan IDG Kabupaten Sidoarjo Tahun 2010-2018



Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Secara umum, angka IPG Kabupaten Sidoarjo cenderung naik pada periode 2012-2018. Angka IPG sempat turun pada tahun 2017 sebesar 1,01 persen menjadi 93,33 dibanding tahun 2015 yang sebesar 94,28. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya IPM laki-laki yang relatif lebih tinggi dibanding IPM perempuan. Ada dua komponen yang menyebabkan penurunan IPG Kabupaten Sidoarjo tahun 2017, yakni Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (lihat angka dalam kurung pada tabel 4.1). Rasio pertumbuhan kedua komponen tersebut masing-masing sebesar 5,64 dan 2,13. Artinya,

peningkatan kualitas pembangunan laki-laki di komponen Harapan Lama Sekolah 5,64 kali lebih cepat dibanding perempuan; arti yang sama bahwa Rata-rata Lama Sekolah laki-laki meningkat 2,13 kali lebih cepat dibanding perempuan. Fenomena meningkatnya angka Harapan Lama Sekolah ini karena pertumbuhan partisipasi sekolah laki-laki di kelompok umur 19-24 lebih besar dibanding perempuan.

Pada tahun 2018 IPG Kabupaten Sidoarjo hampir sama dengan dengan IPG tahun 2017. Sebagaimana terlihat pada tabel 4.1, semua komponen IPM tumbuh sama cepat antara laki-laki dan perempuan. Komponen Angka Harapan Hidup dan Rata-rata Lama Sekolah perempuan meningkat lebih tinggi daripada laki-laki. Sebaliknya, Harapan Lama Sekolah dan Pendapatan perkapita tumbuh lebih cepat pada laki-laki dibanding perempuan. Hal ini yang kemudian menyebabkan IPG Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 tidak begitu berbeda dengan IPG tahun 2017.

4.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) atau *Gender Empowerment Measurement* (GEM) merupakan ukuran komposit yang dapat digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusinya dalam aspek ekonomi maupun sosial. Persamaan dalam peran, bagi perempuan memiliki arti penting tidak hanya sekedar dalam persamaan status dan kedudukan, tetapi lebih pada soal pemberdayaan. Dalam pengertian yang lebih luas pemberdayaan sudah mencakup adanya upaya peningkatan kapabilitas perempuan untuk berperan serta dalam berbagai bentuk pengambilan keputusan serta memiliki kesempatan dalam kegiatan ekonomi.

IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan. Dengan demikian, arah dan perubahan IDG sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Besaran nilai indikator yang terekam dari kegiatan pengumpulan data (survei) merupakan hasil akumulasi dari berbagai kebijakan, baik bersifat langsung

maupun tidak langsung, dari program-program pembangunan yang telah dilaksanakan. Hasilnya menggambarkan kondisi terkini (*current condition*) peranan perempuan dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

Capaian IDG Kabupaten Sidoarjo tahun 2018 sebesar 64,46, kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,19 persen poin jika dibandingkan capaian pada tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh menurunnya proporsi penduduk perempuan yang berstatus sebagai tenaga kerja profesional sebagaimana terlihat pada tabel 4.1. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa daya tawar perempuan Sidoarjo dalam pengambilan keputusan relatif melemah dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 4.1. Indikator-indikator Pembentuk IDG, Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015-2018

| Indikator | 2015 | | 2017 | | 2018*) | |
|--|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| (1) | (2) | (3) | (2) | (3) | (2) | (3) |
| Proporsi penduduk (%) | 50,24 | 49,24 | 50,24 | 49,76 | 50,25 | 49,75 |
| Dimensi Partisipasi Politik | | | | | | |
| Keterwakilan di Parlemen (%) | 76 | 14 | 76 | 14 | 76 | 14 |
| Dimensi Partisipasi Ekonomi & Pengambilan Keputusan | | | | | | |
| Proporsi dari manager, administrasi, profesional dan teknisi (%) | 52,76 | 47,24 | 52,79 | 47,21 | 56,31 | 43,69 |
| Dimensi Penguasaan Sumber Daya Ekonomi | | | | | | |
| Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja (%) | 71,00 | 29,00 | 70,64 | 29,36 | 70,62 | 29,38 |
| IDG | 63,99 | | 64,65 | | 64,46 | |

Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Keterangan :

- IDG Tahun 2016 tidak disajikan karena Sakernas tidak dilaksanakan untuk penghitungan angka ketenagakerjaan tingkat kabupaten/kota

*) Angka sementara

Kesimpulan dan Saran 5

Tujuan penulisan publikasi ini adalah untuk memberi gambaran mengenai pembangunan gender di Kabupaten Sidoarjo. Gambaran tersebut menyangkut faktor-faktor kesetaraan gender pada tingkatan rumahtangga, yang meliputi faktor endowment, faktor kesempatan ekonomi, dan faktor agency. Dari analisis yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya, berikut disampaikan kesimpulan dan saran yang bisa ditawarkan.

5.1. Kesimpulan

1. Saat ini pembangunan bidang pendidikan telah dapat dinikmati oleh laki-laki dan perempuan tanpa adanya diskriminasi, bahkan perempuan cenderung meraup manfaat lebih besar dengan meningkatnya partisipasi sekolah. Meski demikian, jurusan kuliah yang diambil oleh mahasiswi masih terkonsentrasi ke rumpun ilmu tertentu yang mengindikasikan masih adanya stereotipe gender.
2. Saat ini perempuan juga tengah menikmati hidup yang lebih lama daripada laki-laki. Meski demikian, perempuan juga mempunyai tingkat kesakitan dan tingkat disabilitas yang relatif lebih tinggi daripada laki-laki. Hidup lama namun sakit-sakitan dan menyandang disabilitas tentu bukanlah kondisi yang diharapkan semua orang.
3. Meski perempuan menikmati manfaat pembangunan paling besar, namun partisipasi kerja perempuan masih tetap rendah, bahkan paling rendah se-Jawa Timur. Selain itu, perempuan yang bekerja juga menyandang status sebagai pekerja rentan dan memiliki upah yang relatif lebih rendah dibanding laki-laki.
4. Faktor agency yang diwakili oleh indikator kepemilikan tabungan juga menunjukkan bahwa kemampuan perempuan Sidoarjo untuk membuat keputusan masih kurang menggembirakan
5. Pembangunan manusia perempuan Sidoarjo telah mencapai kategori tinggi, namun kecepatan pertumbuhan masing-masing komponen yang berbeda

antara laki-laki dan perempuan menyebabkan IPG sempat mengalami penurunan dan stagnan pada tahun ini.

6. Upaya pemberdayaan gender tahun ini menghadapi tantangan karena porsi perempuan yang bekerja sebagai manager, profesional, administrasi, dan teknisi mengalami penurunan.

5.2. Saran

1. Pemberian edukasi dan konsultasi tentang kesetaraan gender dan manfaatnya bagi kesejahteraan rumahtangga dan pencapaian tujuan pembangunan lainnya masih perlu dilakukan terus menerus melalui berbagai media dan kepada berbagai pihak. Tanpa kesadaran semua pihak, terutama lembaga pemerintahan, maka pembangunan gender tidak akan mendapat dukungan.
2. Adanya stereotipe gender pada dunia pendidikan perlu ditindaklanjuti dengan pemberian edukasi kepada siswa-siswi bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama dan berhak untuk mengambil jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka.
3. Perlu dilakukan perumusan strategi dan kebijakan untuk menghadapi meningkatnya jumlah perempuan manula, hidup sendiri, sakit-sakitan, dan menyandang disabilitas. Aksi-aksi yang dilakukan di kabupaten/kota lain perlu direplika dan disesuaikan dengan kondisi setempat.
4. Dunia kerja perlu dibuat seramah mungkin kepada pekerja perempuan, terutama pekerja perempuan yang telah memiliki anak. Karena sebagian besar keluarga di Sidoarjo bertipe keluarga inti, perempuan yang bekerja akan membuat anak tanpa pengasuhan. Oleh karena itu, penyediaan *daycare* yang ramah dan murah perlu mendapat dukungan.
5. Perempuan perlu didorong dan dikondisikan untuk mempunyai suara dalam menentukan kehidupannya sendiri. Kebijakan-kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan, seperti pendirian koperasi wanita (kopwan), perlu diperluas kepada bidang-bidang lain dengan memperhatikan konteks, budaya, dan norma setempat.

Daftar Pustaka

- Adioetomo, S.M. (2005). *Bonus Demografi : Menjelaskan Hubungan Antara Pertumbuhan Penduduk Dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Pidato Disampaikan pada Upacara Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ekonomi Kependudukan pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Universitas Indonesia, Jakarta.
- BPS Kabupaten Sidoarjo (2018). *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018*. Sidoarjo : BPS Kabupaten Sidoarjo
- Gary Backer (1957). *The Economics of Discrimination*. Chicago : Chicago University Press
- Goldin, C. (1995). The U-Shaped Female Labor Force Function in Economic Development and Economic History, *NBER Working Paper Series, no: 4707*
- Handayani, Dwini dan Pardede, Elda (2017). Gender : Disparitas Sumber Daya Manusia dan Ekonomi. Dalam Adioetomo dan Pardede Eds (2017). *Memetik Bonus Demografi : Membangun Manusia Sejak Dini*. Depok : Rajawali Pers
- International Labour Office (2016). *Key Indicators of Labour Market, 9th edition*. Geneva : ILO
- Jann, Ben (2008). The Blinder-Oaxaca decomposition for linear regression models. *The Stata Journal* 8(4) : 453-479
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik (2018). *Pembangunan Manusia berbasis Gender Tahun 2018*. Jakarta : KemenPPPA dan BPS
- Max Roser (2019). *Life Expectancy*. Dipublikasikan online di OurWorldInData.org. Diakses dari : 'https://ourworldindata.org/life-expectancy' pada tanggal 24 Juni 2019
- Oksuzyan, A., Guma, J., dan Doblhammer, G. (2018). Sex differences in Health and Survival. Dalam Guma, J. dan Doblhammer, G., Eds (2018). *A Demographic perspective on Gender, Family, and Health in Europe*. Cham, Switzerland : Springer Open
- Posadas, J., Paci, P., Sajala, Z., dan Lhoksin, M (2017). *Measuring Gender Inequality : Streamlined Analysis with AdePT Software*. Washington DC : The World Bank
- Priyono, Edy (2015). *Memahami Pasar Tenaga Kerja : Bacaan Ekonomi untuk non Ekonom, cetakan 1*. Jakarta : Pustaka Lentera
- Risman, B.J., Froyum, C.M., dan Scarborough, W.J., Eds (2018). *Handbook of the Sociology of gender, Second Edition*. Cham, Switzerland : Springer International publishing, AG
- Risman, Barbara J. (2018). Gender as a Social Structure. Dalam Risman, B.J., Froyum, C.M., dan Scarborough, W.J., Eds (2018). *Handbook of the Sociology of gender, Second Edition*. Cham, Switzerland : Springer International publishing, AG

- Verbrugge, L. M. dan Jette, A. M (1994). The Disablement Process. *Social Science and Medicine*, 38(1), 1-14
- West, C. dan Zimmerman, D. H. (1987). Doing Gender. *Gender and Society*, 1, 125-151
- World Development Report (2012). *Gender Equality and Development*. Washington DC : The World Bank

Lampiran 1

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*). Kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

Umur Harapan Hidup saat Lahir

Umur Harapan Hidup saat lahir (AHH) merupakan rata-rata perkiraan lama tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Penghitungan angka harapan hidup melalui pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Jenis data yang digunakan adalah Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Paket program Mortpack digunakan untuk menghitung angka harapan hidup berdasarkan input data ALH dan AMH. Selanjutnya, dipilih metode Trussell dengan model West, yang sesuai dengan histori kependudukan dan kondisi Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara umumnya.

Indeks harapan hidup dihitung dengan menghitung nilai maksimum dan nilai minimum harapan hidup sesuai standar UNDP, yaitu angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks adalah 85 tahun dan terendah sebagai batas bawah adalah 20 tahun.

Tingkat Pendidikan

Salah satu komponen pembentuk IPM adalah dimensi pengetahuan yang diukur melalui tingkat pendidikan. Dalam hal ini, indikator yang digunakan adalah rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*) dan harapan lama sekolah (*expected years of schooling*). Pada proses pembentukan IPM, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah diberi bobot yang sama, kemudian penggabungan kedua indikator ini digunakan sebagai indeks pendidikan yang menjadi salah satu komponen pembentuk IPM.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan rata-rata lama sekolah menggunakan dua batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Rata-rata lama sekolah memiliki batas maksimumnya 15 tahun dan batas minimum sebesar 0 tahun.

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Indikator ini dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Seperti halnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah juga menggunakan batasan yang dipakai sesuai kesepakatan UNDP. Batas maksimum untuk harapan lama sekolah adalah 18 tahun, sedangkan batas minimumnya 0 (nol).

Standar Hidup Layak

Dimensi lain dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas, standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power parity*) berbasis formula Rao.

$$PPP_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}} \right)^{1/m}$$

Keterangan:

PPP_j : paritas daya beli di wilayah j

p_{ij} : harga komoditas i di kabupaten/kota j

p_{ik} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

m : jumlah komoditas

Penyusunan Indeks

Sebelum menghitung IPM, setiap komponen IPM harus dihitung indeksnya. Formula yang digunakan dalam penghitungan indeks komponen IPM adalah sebagai berikut:

Penghitungan paritas daya beli dilakukan berdasarkan 96 komoditas kebutuhan pokok (Tabel 1). Batas maksimum dan minimum penghitungan pengeluaran per kapita yang digunakan dalam penghitungan IPM seperti terlihat dalam Tabel 2. Batas maksimum pengeluaran per kapita adalah sebesar Rp 26.572.352 sementara batas minimumnya adalah Rp 1.007.436.

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}{\ln(\text{pengeluaran}_{maks}) - \ln(\text{pengeluaran}_{min})}$$

Tabel 1 : Komoditi Kebutuhan Pokok sebagai Dasar Penghitungan Daya Beli (PPP)

| | | |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| Beras | Pisang lainnya | Rokok kretek tanpa filter |
| Tepung terigu | Pepaya | Rokok putih |
| Ketela | Minyak kelapa | Rumah sendiri/bebas sewa |
| Kentang | Minyak goreng lainnya | Rumah kontrak |
| Tongkol/tuna/cakal | Kelapa | Rumah sewa |
| Kembung | Gula pasir | Rumah dinas |
| Bandeng | Teh | Listrik |
| Mujair | Kopi | Air PAM |
| Mas | Garam | LPG |
| Lele | Kecap | Minyak tanah |
| Ikan segar lainnya | Penyedap | Lainnya(batu baterai,aki,korek,obat |
| Daging sapi | Mie instan | Perlengkapan mandi |
| Daging ayam ras | Roti manis/roti lainnya | Barang kecantikan |
| Daging ayam | Kue kering | Perawatan kulit,muka,kuku,rambut |
| Telur ayam ras | Kue basah | Sabun cuci |
| Susu kental manis | Makanan gorengan | Biaya RS Pemerintah |
| Susu bubuk | Gado-gado/ketoprak | Biaya RS Swasta |
| Susu bubuk bayi | Nasi campur/rames | Puskesmas/pustu |
| Bayam | Nasi goreng | Praktek dokter/poliklinik |
| Kangkung | Nasi putih | SPP |
| Kacang panjang | Lontong/ketupat sayur | Bensin |
| Bawang merah | Soto/gule/sop/rawon/c | Transportasi/pengangkutan umum |
| Bawang putih | Sate/tongseng | Pos dan Telekomunikasi |
| Cabe merah | Mie bakso/mie | Pakaian jadi laki-laki dewasa |
| Cabe rawit | Makanan ringan anak | Pakaian jadi perempuan dewasa |
| Tahu | Ikan (goreng/bakar | Pakaian jadi anak-anak |
| Tempe | Ayam/daging (goreng | Alas kaki |
| Jeruk | Makanan jadi lainnya | Minyak Pelumas |
| Mangga | Air kemasan galon | Meubelair |
| Salak | Minuman jadi lainnya | Peralatan Rumah Tangga |
| Pisang ambon | Es lainnya | Perlengkapan perabot rumah |
| Pisang raja | Roko kretek filter | Alat-alat Dapur/Makan |

Untuk menghitung indeks masing-masing komponen IPM digunakan batas maksimum dan minimum seperti terlihat dalam Tabel 2.

Tabel 2 : Nilai Maksimum dan Minimum dari Setiap Komponen IPM

| Komponen IPM | Satuan | Minimum | Maksimum |
|------------------------------|--------|-----------|------------|
| Angka Harapan Hidup saat | Tahun | 20 | 85 |
| Harapan Lama Sekolah (HLS) | Tahun | 0 | 18 |
| Rata-rata Lama Sekolah (RLS) | Tahun | 0 | 15 |
| Pengeluaran per Kapita | Rupiah | 1.007.436 | 26.572.352 |

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara -Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Status Pembangunan Manusia

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

- Kelompok “sangat tinggi” : $IPM \geq 80$
- Kelompok “tinggi” : $70 \leq IPM < 80$
- Kelompok “sedang” : $60 \leq IPM < 70$
- Kelompok “rendah” : $IPM < 60$

Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara perubahan capaian terkini dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan IPM, maka semakin cepat pula peningkatan IPM. Indikator pertumbuhan IPM ini dapat digunakan sebagai kinerja pembangunan manusia suatu wilayah pada kurun waktu tertentu.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan :

IPM_t : IPM suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{(t-1)}$: IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan pertama kali oleh UNDP pada tahun 1995, lima tahun setelah UNDP memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). UNDP menggunakan metode yang sama hingga tahun 2009. Pada metode lama tersebut, IPG tidak mengukur langsung ketimpangan antar gender yang terjadi, namun hanya disparitas dari masing-masing komponen IPM untuk setiap gender. Selain itu, angka IPG metode ini tidak bisa diinterpretasikan terpisah dari IPM.

Penghitungan IPG berhenti dilakukan oleh UNDP mulai tahun 2010 hingga 2013. Pada tahun 2014, UNDP kembali melakukan penghitungan IPG dengan menggunakan metode baru. Perubahan metode ini merupakan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi pada IPM. Selain sebagai penyempurnaan dari metode sebelumnya, IPG metode baru ini merupakan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antar gender dalam pencapaian IPM. Pada metode baru ini digunakan rasio IPM perempuan dengan IPM laki-laki, sehingga bisa terlihat pencapaian pembangunan manusia antara perempuan dengan laki-laki.

Bagaimana Metode Baru?

IPG pada tahun 2014 mengalami perubahan pada indikator yang digunakan dan juga metodologi penghitungannya. Dalam metode baru ini, dimensi yang digunakan masih sama seperti yang disampaikan sebelumnya, yaitu:

- 1) umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*)
- 2) pengetahuan (*knowledge*); dan
- 3) standar hidup layak (*decent standard of living*).

Menurut UNDP, ketiga dimensi tersebut digunakan sebagai pendekatan dalam mengukur kualitas hidup, dimana hakikatnya adalah mengukur capaian pembangunan manusia. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Pada tahun 2014, UNDP mengganti beberapa indikator untuk menyempurnakan metodologi yang digunakan. Pada dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak digunakan Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita.

BPS mengukur dimensi umur panjang dan hidup sehat dengan menggunakan angka harapan hidup saat lahir yang didapatkan dari data Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Kemudian mengukur dimensi pengetahuan dengan menggunakan angka harapan lama sekolah dan angka rata-rata lama sekolah yang didapatkan dari data SUSENAS. Selanjutnya untuk mengukur dimensi standar hidup layak tidak menggunakan PNB per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga kabupaten/kota. Untuk dimensi ini, dilakukan pendekatan/proksi dengan menggunakan pengeluaran per kapita yang disesuaikan yang didapatkan dari SUSENAS.

Pada penghitungan IPG, keseluruhan indikator di atas dihitung berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Pada indikator angka harapan lama sekolah, batas usia yang digunakan adalah 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. Sedangkan angka rata-rata lama sekolah memiliki batas usia yaitu 25 tahun ke atas. Indikator ini digunakan sebagai tolok ukur output dari dimensi pengetahuan. Sehingga pada dimensi ini, sudah mencakup baik indikator input maupun indikator output.

Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat serta pengetahuan tidak diperlukan data sekunder dalam penghitungannya. Hanya pada dimensi standar hidup layak dibutuhkan beberapa data sekunder guna mendapatkan angka pengeluaran per kapita berdasarkan jenis kelamin. Data sekunder yang digunakan adalah upah yang diterima, jumlah angkatan kerja, serta jumlah penduduk untuk laki-laki dan perempuan.

Penyusunan Indeks Komposit

Penyusunan indeks komposit dimulai dengan membangun indeks untuk masing-masing komponen. Indeks untuk masing-masing komponen dihitung

sama seperti pada metode lama. Perbedaannya hanya pada batasan untuk masing- masing komponen. Berikut adalah nilai minimum dan maksimum untuk masing- masing komponen.

Tabel 3 : Batas Minimum dan Maksimum Indikator IPG

| Indikator | Minimum | | Maksimum | |
|---|-----------|-----------|------------|-----------|
| | Laki-laki | Perempuan | Laki-laki | Perempuan |
| Umur Harapan Hidup (tahun) | 17,55 | 22,5 | 82,5 | 87,5 |
| Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) | 0 | 0 | 18 | 18 |
| Angka Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan | 1.007.436 | | 26.572.352 | |

Dalam penyusunan indeks IPM laki-laki dan Perempuan, digunakan rumus yang berlaku untuk masing-masing jenis kelamin, yaitu sebagai berikut:

$$I_{UHH} = \frac{UHH - UHH_{min}}{UHH_{maks} - UHH_{min}}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengetahuan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$

Metode agregasi yang dilakukan guna mendapatkan angka IPM laki-laki dan perempuan sama seperti metode agregasi yang dilakukan ketika ingin mendapatkan angka IPM. Metode agregasi yang digunakan adalah rata-rata geometrik dengan rumus sebagai berikut.

$$IPM_P = \sqrt[3]{I_{kesehatan_p} \times I_{pendidikan_p} \times I_{pengeluaran_p}}$$

$$IPM_L = \sqrt[3]{I_{kesehatan_L} \times I_{pendidikan_L} \times I_{pengeluaran_L}}$$

Penggunaan rata-rata geometrik ini sangat beralasan, yaitu rata-rata geometrik cenderung sensitif terhadap ketimpangan. Tidak seperti rata-rata

aritmatik yang dapat menutupi ketimpangan yang terjadi antardimensi, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan antardimensi.

Pada metode baru, penghitungan angka IPG tidak lagi dengan membandingkannya dengan angka IPM, namun dengan menggunakan rasio sebagai berikut.

$$IPG = \frac{IPM_P}{IPM_L} \times 100$$

Angka ini menunjukkan rasio antara pembangunan perempuan dan pembangunan laki-laki. Ketika angka indeks pembangunan gender makin mendekati 100, maka pembangunan gender semakin seimbang atau merata. Namun semakin menjauhi 100, maka pembangunan gender makin timpang antar jenis kelamin.

Perubahan Interpretasi

Akibat perubahan metodologi yang terjadi, terjadi pula perubahan interpretasi dari angka IPG. Pada metode lama, angka IPG yang dihasilkan harus dibandingkan dengan angka IPM. Semakin kecil selisih angka IPG dengan angka IPM, maka semakin kecil ketimpangan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan.

Pada metode baru, interpretasi dari angka IPG berubah. Interpretasi angka IPG tidak perlu dibandingkan lagi dengan angka IPM. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.

3. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks pemberdayaan gender (IDG) memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik,

partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Dalam penghitungan IDG, terlebih dahulu dihitung EDEP yaitu indeks untuk masing-masing komponen berdasarkan persentase yang ekuivalen dengan distribusi yang merata (*Equally Distributed Equivalent Percentage*). Selanjutnya, masing-masing indeks komponen, yaitu nilai EDEP dibagi 50. Nilai 50 dianggap sebagai kontribusi ideal dari masing-masing kelompok gender untuk semua komponen IDG. Untuk penghitungan masing-masing indeks dapat dilakukan sebagai berikut.

Penyusunan Indeks

4. Indeks keterwakilan di parlemen (I_{par})

$$EDEP_{(par)} = \left(\frac{P_f}{X_f} + \frac{P_m}{X_m} \right)^{-1} \times 100$$

dan

$$I_{(par)} = \frac{\{EDEP_{(par)}\}}{50}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

X_f = proporsi keterwakilan perempuan di parlemen

X_m = proporsi keterwakilan laki-laki di parlemen

5. Indeks Pengambilan Keputusan (I_{DM})

$$EDEP_{(DM)} = \left(\frac{P_f}{Y_f} + \frac{P_m}{Y_m} \right)^{-1} \times 100$$

dan

$$I_{(DM)} = \frac{\{EDEP_{(DM)}\}}{50}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

Y_f = proporsi perempuan sebagai tenaga profesional

Y_m = proporsi laki-laki sebagai tenaga profesional

6. Indeks distribusi pendapatan ($I_{inc-dis}$)

Penghitungan indeks distribusi pendapatan menggunakan formula yang sama dengan penghitungan IPM metode lama. Untuk menghitung indeks ini digunakan batas maksimum dan minimum dari pengeluaran perkapita. Batas maksimum dan minimum pengeluaran perkapita pada metode lama adalah sebagai berikut:

| Komponen | Satuan | Minimum | Maksimum |
|------------------------|--------|--|----------|
| Pengeluaran per kapita | Rupiah | a. 300.000 (1996) b. 360.000 (1999 dst) | 732.720 |

$$\text{Rasio Upah}_i = \frac{\text{Upah buruh nonpertanian}_i}{\text{Upah buruh nonpertanian}_m}$$

$$\begin{aligned} \text{Rata - rata Upah}_i &= (\text{Rasio upah}_m \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_m) \\ &+ (\text{Rasio upah}_f \times \text{Proporsi Angkatan Kerja}_f) \end{aligned}$$

$$\text{Rasio Terhadap Rata - rata Upah}_i = \frac{\text{Rasio Upah}_i}{\text{Rata - rata Upah}_m}$$

Sumbangan Pendapatan_i

$$= \text{Proporsi Angkatan Kerja}_i \times \text{Rasio terhadap Rata - rata Upah}_i$$

$$\text{Proporsi Sumbangan Pendapatan}_i = \frac{\text{Sumbangan Pendapatan}_i}{\text{Proporsi Penduduk}_m}$$

dimana

i = Laki-laki (m) atau perempuan (f)

Kemudian menghitung EDEP dengan rumus sebagai berikut.

$$EDEP_{(inc-dis)} = \left(\frac{P_f}{Z_f} + \frac{P_m}{Z_m} \right)^{-1} \times 100$$

dan

$$I_{(inc-dis)} = \frac{(EDEP_{(inc-dis)} \times \text{Pengeluaran per Kapita (yang disesuaikan)}) - 360}{732,72 - 300}$$

dimana,

P_f = proporsi penduduk perempuan

P_m = proporsi penduduk laki-laki

Z_f = proporsi sumbangan pendapatan perempuan

Z_m = proporsi sumbangan pendapatan laki-laki

7. Indeks pemberdayaan gender

$$IDG = \frac{(I_{(par)} + I_{(DM)} + I_{(inc-dis)})}{3}$$

Lampiran 2

```
. probit lfp i.manu i.service i.fullhour if b4_k6==2

Iteration 0:  log likelihood = -630.44189
Iteration 1:  log likelihood = -157.71459
Iteration 2:  log likelihood = -142.28985
Iteration 3:  log likelihood = -142.02924
Iteration 4:  log likelihood = -142.029
Iteration 5:  log likelihood = -142.029

Probit regression                               Number of obs   =       911
                                                LR chi2(3)      =       976.83
                                                Prob > chi2     =       0.0000
Log likelihood = -142.029                    Pseudo R2       =       0.7747

-----+-----
      lfp |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-----+-----
      1.manu |    2.857034   .3406239     8.39   0.000     2.189424   3.524645
      1.service |    3.284302   .2969142    11.06   0.000     2.702361   3.866243
      1.fullhour |    1.434451   .3499645     4.10   0.000     .7485331   2.120369
      _cons |   -1.518003   .0867262    -17.50   0.000    -1.687984  -1.348023
-----+-----

. drop xb

. drop mills

. probit lfp i.manu i.service i.fullhour if b4_k6==2

Iteration 0:  log likelihood = -630.44189
Iteration 1:  log likelihood = -157.71459
Iteration 2:  log likelihood = -142.28985
Iteration 3:  log likelihood = -142.02924
Iteration 4:  log likelihood = -142.029
Iteration 5:  log likelihood = -142.029

Probit regression                               Number of obs   =       911
                                                LR chi2(3)      =       976.83
                                                Prob > chi2     =       0.0000
Log likelihood = -142.029                    Pseudo R2       =       0.7747

-----+-----
      lfp |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
-----+-----
      1.manu |    2.857034   .3406239     8.39   0.000     2.189424   3.524645
      1.service |    3.284302   .2969142    11.06   0.000     2.702361   3.866243
      1.fullhour |    1.434451   .3499645     4.10   0.000     .7485331   2.120369
      _cons |   -1.518003   .0867262    -17.50   0.000    -1.687984  -1.348023
-----+-----

. predict xb if e(sample), xb
(903 missing values generated)

. generate mills=normalden(-xb)/(1-normal(-xb))
(903 missing values generated)

. replace mills=0 if b4_k6==1
(903 real changes made)

. oaxaca LNWage MYS exprienc mills, by(b4_k6) adjust(mills) noisily relax

Model for group 1
```

| Source | SS | df | MS | Number of obs = | 420 |
|----------|------------|-----|------------|-----------------|--------|
| Model | 28.5966927 | 2 | 14.2983463 | F(2, 417) = | 59.54 |
| Residual | 100.149606 | 417 | .24016692 | Prob > F = | 0.0000 |
| | | | | R-squared = | 0.2221 |
| | | | | Adj R-squared = | 0.2184 |
| Total | 128.746298 | 419 | .307270402 | Root MSE = | .49007 |

| LNWage | Coef. | Std. Err. | t | P> t | [95% Conf. Interval] | |
|----------|----------|-----------|-------|-------|----------------------|----------|
| MYS | .0922086 | .0085673 | 10.76 | 0.000 | .0753682 | .109049 |
| exprienc | .0088404 | .0018802 | 4.70 | 0.000 | .0051447 | .0125362 |
| mills | 0 | (omitted) | | | | |
| _cons | 9.886116 | .1211891 | 81.58 | 0.000 | 9.647898 | 10.12433 |

(model 1 has zero variance coefficients)

Model for group 2

| Source | SS | df | MS | Number of obs = | 232 |
|----------|------------|-----|------------|-----------------|--------|
| Model | 47.9229094 | 3 | 15.9743031 | F(3, 228) = | 37.57 |
| Residual | 96.9456734 | 228 | .425200322 | Prob > F = | 0.0000 |
| | | | | R-squared = | 0.3308 |
| | | | | Adj R-squared = | 0.3220 |
| Total | 144.868583 | 231 | .627136722 | Root MSE = | .65207 |

| LNWage | Coef. | Std. Err. | t | P> t | [95% Conf. Interval] | |
|----------|-----------|-----------|-------|-------|----------------------|----------|
| MYS | .1359543 | .0138396 | 9.82 | 0.000 | .1086844 | .1632242 |
| exprienc | .0077322 | .0036744 | 2.10 | 0.036 | .0004921 | .0149723 |
| mills | -1.256531 | 1.112924 | -1.13 | 0.260 | -3.449462 | .9363999 |
| _cons | 9.099465 | .2123046 | 42.86 | 0.000 | 8.681135 | 9.517794 |

Blinder-Oaxaca decomposition

| | | |
|--------------------|-----------------|--------|
| Group 1: b4_k6 = 1 | Number of obs = | 652 |
| Group 2: b4_k6 = 2 | Model = | linear |
| | N of obs 1 = | 420 |
| | N of obs 2 = | 232 |

| LNWage | Coef. | Std. Err. | z | P> z | [95% Conf. Interval] | |
|--------------|----------|-----------|--------|-------|----------------------|-----------|
| overall | | | | | | |
| group_1 | 11.16868 | .0270984 | 412.15 | 0.000 | 11.11557 | 11.2218 |
| group_2 | 10.82201 | .0522205 | 207.24 | 0.000 | 10.71966 | 10.92436 |
| difference | .3466715 | .0588328 | 5.89 | 0.000 | .2313613 | .4619818 |
| adjusted | | | | | | |
| group_1 | 11.16868 | .0270984 | 412.15 | 0.000 | 11.11557 | 11.2218 |
| group_2 | 10.84534 | .0558137 | 194.31 | 0.000 | 10.73595 | 10.95474 |
| difference | .3233401 | .0620443 | 5.21 | 0.000 | .2017355 | .4449448 |
| endowments | .0382501 | .0350595 | 1.09 | 0.275 | -.0304653 | .1069655 |
| coefficients | .294319 | .0543835 | 5.41 | 0.000 | .1877293 | .4009087 |
| interaction | -.009229 | .0140516 | -0.66 | 0.511 | -.0367695 | .0183116 |
| endowments | | | | | | |
| MYS | .0316306 | .0375602 | 0.84 | 0.400 | -.0419861 | .1052473 |
| exprienc | .0066195 | .0090761 | 0.73 | 0.466 | -.0111693 | .0244084 |
| coefficients | | | | | | |
| MYS | -.51373 | .191425 | -2.68 | 0.007 | -.888916 | -.1385439 |
| exprienc | .0213976 | .0797002 | 0.27 | 0.788 | -.1348119 | .1776071 |
| _cons | .7866514 | .2444587 | 3.22 | 0.001 | .3075212 | 1.265782 |

```

interaction_ |
  MYS | -.0101777 .0126226 -0.81 0.420 -.0349176 .0145622
  exprienc | .0009487 .0037383 0.25 0.800 -.0063781 .0082756

```

(adjusted by mills)

. oaxaca, eform

```

Blinder-Oaxaca decomposition          Number of obs =      652
                                         Model          =      linear
Group 1: b4_k6 = 1                    N of obs 1     =      420
Group 2: b4_k6 = 2                    N of obs 2     =      232

```

| | LNWage | exp(b) | Std. Err. | z | P> z | [95% Conf. Interval] | |
|--------------|--------|----------|-----------|--------|-------|----------------------|----------|
| ----- | | | | | | | |
| overall | | | | | | | |
| group_1 | | 70875.8 | 1920.624 | 412.15 | 0.000 | 67209.67 | 74741.92 |
| group_2 | | 50111.85 | 2616.865 | 207.24 | 0.000 | 45236.64 | 55512.48 |
| difference | | 1.414352 | .0832104 | 5.89 | 0.000 | 1.260314 | 1.587216 |
| ----- | | | | | | | |
| adjusted | | | | | | | |
| group_1 | | 70875.8 | 1920.624 | 412.15 | 0.000 | 67209.67 | 74741.92 |
| group_2 | | 51294.78 | 2862.953 | 194.31 | 0.000 | 45979.52 | 57224.48 |
| difference | | 1.381735 | .0857288 | 5.21 | 0.000 | 1.223524 | 1.560404 |
| endowments | | 1.038991 | .0364265 | 1.09 | 0.275 | .9699941 | 1.112896 |
| coefficients | | 1.342212 | .0729942 | 5.41 | 0.000 | 1.206507 | 1.493181 |
| interaction | | .9908135 | .0139225 | -0.66 | 0.511 | .9638983 | 1.01848 |
| ----- | | | | | | | |
| endowments | | | | | | | |
| MYS | | 1.032136 | .0387673 | 0.84 | 0.400 | .9588831 | 1.110985 |
| exprienc | | 1.006641 | .0091364 | 0.73 | 0.466 | .9888928 | 1.024709 |
| ----- | | | | | | | |
| coefficients | | | | | | | |
| MYS | | .5982599 | .1145219 | -2.68 | 0.007 | .4111011 | .870625 |
| exprienc | | 1.021628 | .0814239 | 0.27 | 0.788 | .8738803 | 1.194356 |
| __cons | | 2.19603 | .5368387 | 3.22 | 0.001 | 1.36005 | 3.545863 |
| ----- | | | | | | | |
| interaction | | | | | | | |
| MYS | | .9898739 | .0124948 | -0.81 | 0.420 | .965685 | 1.014669 |
| exprienc | | 1.000949 | .0037418 | 0.25 | 0.800 | .9936422 | 1.00831 |

(adjusted by mills)

.